



PEDOMAN FASILITATOR

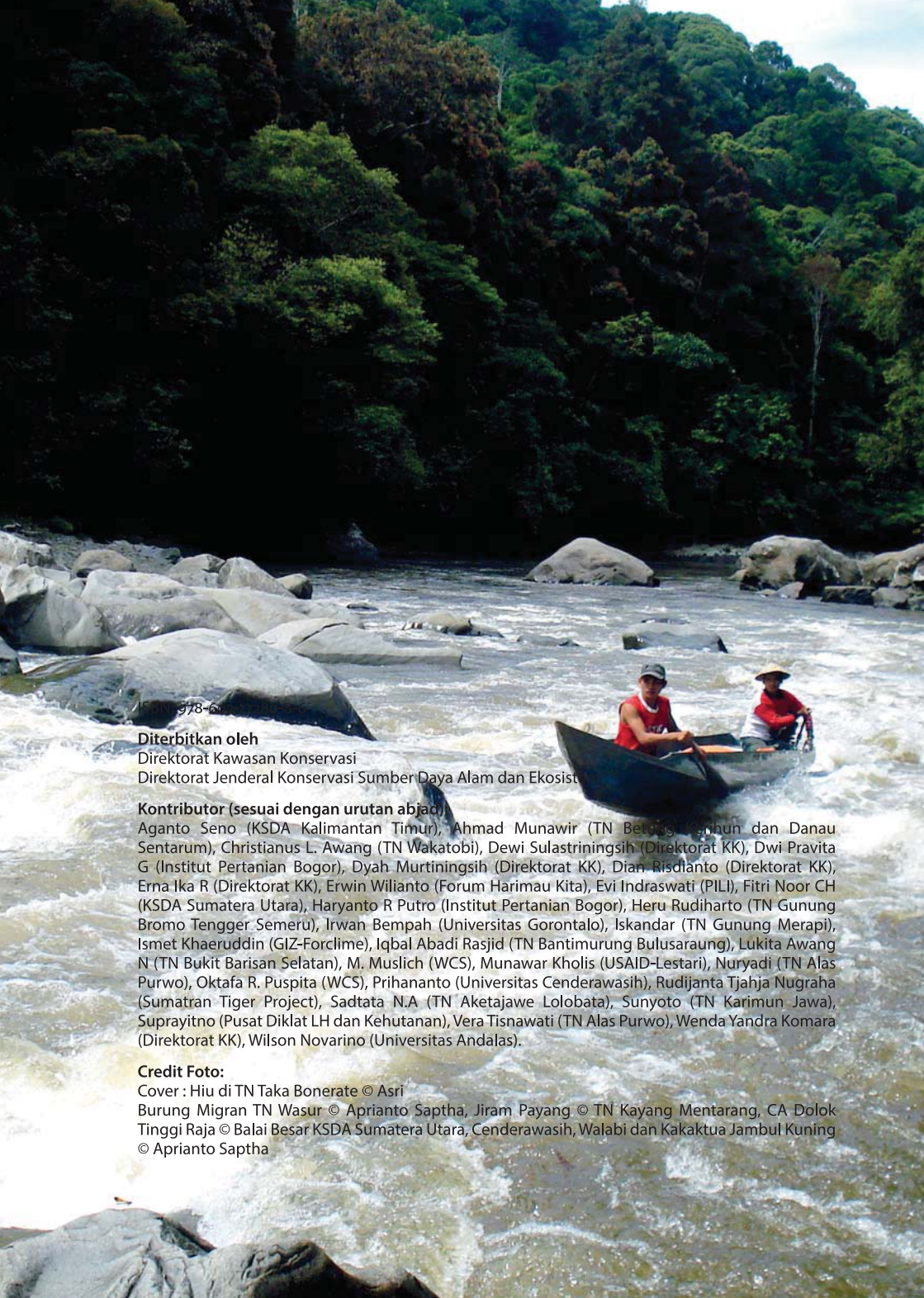
**PENILAIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI**

PEDOMAN FASILITATOR

PENILAIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
2017



Diterbitkan oleh

Direktorat Kawasan Konservasi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Kontributor (sesuai dengan urutan abjad)

Aganto Seno (KSDA Kalimantan Timur), Ahmad Munawir (TN Betung, Gunung dan Danau Sentarum), Christianus L. Awang (TN Wakatobi), Dewi Sulastriningsih (Direktorat KK), Dwi Pravita G (Institut Pertanian Bogor), Dyah Murtiningsih (Direktorat KK), Dian Risdianto (Direktorat KK), Erna Ika R (Direktorat KK), Erwin Wilianto (Forum Harimau Kita), Evi Indraswati (PILI), Fitri Noor CH (KSDA Sumatera Utara), Haryanto R Putro (Institut Pertanian Bogor), Heru Rudiharto (TN Gunung Bromo Tengger Semeru), Irwan Bempah (Universitas Gorontalo), Iskandar (TN Gunung Merapi), Ismet Khaeruddin (GIZ-Forclime), Iqbal Abadi Rasjid (TN Bantimurung Bulusaraung), Lukita Awang N (TN Bukit Barisan Selatan), M. Muslich (WCS), Munawar Kholis (USAID-Lestari), Nuryadi (TN Alas Purwo), Oktafa R. Puspita (WCS), Prihananto (Universitas Cenderawasih), Rudijanta Tjahja Nugraha (Sumatran Tiger Project), Sadtata N.A (TN Aketajawe Lolobata), Sunyoto (TN Karimun Jawa), Suprayitno (Pusat Diklat LH dan Kehutanan), Vera Tisnawati (TN Alas Purwo), Wenda Yandra Komara (Direktorat KK), Wilson Novarino (Universitas Andalas).

Credit Foto:

Cover : Hiu di TN Taka Bonerate © Asri

Burung Migran TN Wasur © Aprianto Saptha, Jiram Payang © TN Kayang Mentarang, CA Dolok Tinggi Raja © Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Cenderawasih, Walabi dan Kakaktua Jambul Kuning © Aprianto Saptha

Kata Pengantar



Pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Program peningkatan efektivitas pengelolaan menjadi program nasional, untuk mendukung target tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah mengadopsi *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB sehingga memungkinkan pengelola untuk menerapkan *adaptive management* sesuai kebutuhan pengelolaan dari waktu ke waktu. Metode tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.

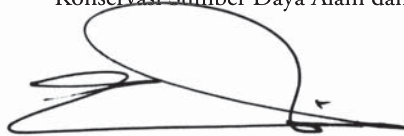
Evaluasi dan monitoring merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, dari proses tersebut akan diketahui sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sehingga proses evaluasi dan monitoring pengelolaan kawasan konservasi juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama pada

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses penilaian yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, partisipasi, kepedulian dan kerjasama, baik internal pengelola maupun dengan pihak-pihak mitra lain, sehingga proses penilaian METT membutuhkan pemahaman dan persepsi yang setara. Untuk meminimalisasi subyektivitas yang menimbulkan bias pada hasil penilaian, peran fasilitator menjadi kunci dalam proses penilaian dan penyusunan rekomendasi untuk rencana aksi ke depan. Agar proses fasilitasi penilaian METT dapat berjalan dengan optimal maka dengan adanya dokumen pedoman bagi fasilitator METT ini, dapat menjadi bekal yang berharga dalam memandu proses penilaian.

Direktur Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward tick at the end.

Wiratno

Ucapan Terima Kasih



Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.15/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian diperbaharui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, sehingga diharapkan adanya pemahaman dan pemaknaan yang sama dalam proses penilaian METT.

Proses penilaian dalam kerangka peningkatan efektivitas pengelolaan dilakukan setiap periode tertentu. Dimana proses penilaian ini akan dilakukan melalui forum diskusi antara pengelola kawasan dan para pemangku kepentingan dengan difasilitasi oleh fasilitator yang mempunyai pemahaman cukup terhadap perangkat ini, namun berdasarkan pengalaman penilaian tahun 2015-2016 masih terdapat perbedaan persepsi pada beberapa bagian pertanyaan. Oleh karena itu diperlukan beberapa informasi tambahan yang diharapkan dapat mengurangi bias yang mungkin timbul yang dapat dijadikan pedoman terutama bagi para fasilitator untuk dapat memfasilitasi proses penilaian efektivitas dengan baik.

Pedoman Fasilitator ini disusun melalui sejumlah rangkaian diskusi dengan para pihak yang banyak terlibat dalam penilaian METT terutama fasilitator penilaian METT. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini, terutama kepada anggota Kelompok Kerja Penilaian METT, serta lembaga pendukung implementasi diantaranya *Sumatran Tiger Project*, USAID-Lestari, GIZ FORCLIME, dan WCS Indonesia Program. Semoga buku ini bermanfaat.

Direktur Kawasan Konservasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suyatno', with a long horizontal stroke extending to the right.

Suyatno Sukandar

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I. PENGENALAN METT SEBAGAI PERANGKAT EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	 01
A. Memahami Konteks dan Penilaian METT	03
B. Penilaian Kawasan Konservasi Perairan	08
C. Prinsip-Prinsip Penilaian METT	09
D. Keunggulan, Kelemahan, dan Kemungkinan Bias	10
 BAB II. FASILITATOR PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.....	 13
A. Kriteria Fasilitator	13
B. Peran dan Tugas Fasilitator	14
C. Prinsip-Prinsip Fasilitasi dan Menjadi Fasilitator yang Baik.....	16
D. Teknik Pemecahan Masalah	22
E. Membuat Keputusan Kelompok.....	23

BAB III. TAHAPAN FASILITASI PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.....	25
A. Prakondisi.....	25
B. Proses Penilaian	27
C. Penyusunan Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	31
D. Penyusunan laporan	33
BAB IV. PENUTUP	35

BAB I Pengenalan METT Sebagai Perangkat Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Saat ini berbagai metode penilaian efektivitas pengelolaan telah banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia. Menurut Leverington *et al* (2008)¹, sampai tahun 2008 telah tercatat lebih dari 40 metode penilaian efektivitas dan saat masih terus bertambah. Stoll-Kleemann (2010)² menyebutkan bahwa *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), *Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management* (RAPAM) dan UNESCO's *Enhancing our Heritage* (EoH) *Toolkit* merupakan metode yang paling banyak digunakan di dunia. Selanjutnya menurut Hockings *et al* (2015)³ menyebutkan bahwa METT telah digunakan di 100 lebih negara dan diimplementasikan di lebih dari 2000 kawasan konservasi di dunia.

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) menargetkan nilai efektivitas pengelolaan minimal 70% di 260 kawasan pada tahun 2019. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan pedoman penilaian dan evaluasi dan ditetapkan melalui Perdirjen KSDAE Nomor P.15/SET-KSDAE/2015 yang kemudian diterapkan sebagai dasar melakukan penilaian awal METT di Indonesia. Hal ini sejalan dengan dokumen *Program of Work Convention on Biological Diversity* (PoW CBD) yang mengamanatkan agar seluruh negara yang meratifikasi CBD mengimplementasikan evaluasi efektivitas pengelolaan

- 1 Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M. Hockings. 2010. *Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study*. Second Edition. The University of Queensland. Brisbane, Australia.
- 2 Stoll-Kleemann, S. 2010. Evaluation of management effectiveness in protected areas: Methodologies and results. *Basic and Applied Ecology* 11 (2010) 377–382.
- 3 Hockings, M., Leverington, F. and Cook, C. (2015) 'Protected area management effectiveness', in G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary and I. Pulsford (eds) *Protected Area Governance and Management*, pp. 889–928, ANU Press, Canberra.

pada minimal 60% kawasan konservasi pada tahun 2015.

METT yang dikembangkan oleh WWF dan Bank Dunia menjadi pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: pengalaman implementasi, perangkat sederhana, dan menghasilkan gambaran yang terukur. Perangkat ini telah disesuaikan dengan penambahan beberapa penjelasan terkait dengan kuisioner pertanyaan berdasarkan pengalaman-pengalaman implementasi penilaian yang dilakukan di Indonesia. Hasil penilaian METT disusun menjadi laporan sesuai dengan struktur laporan penilaian METT yang diatur melalui penetapan nilai awal hasil penilaian METT pada tahun 2015 dan 2016 melalui Keputusan Dirjen KSDAE No.357/KSDAE-SET/2015 dan Keputusan Dirjen KSDAE No.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016. Sistematika penilaian hingga penyusunan laporan kemajuan pengelolaan merupakan proses *'closing the loop'* untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan menerapkan rekomendasi-rekomendasi dalam pengelolaan kawasan.

Pada perkembangannya, Perdirjen P.15/SET-KSDAE/2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia kemudian diperbaharui dengan Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Hal ini mempertimbangkan bahwa evaluasi pengelolaan kawasan konservasi merupakan suatu kebutuhan bukan hanya karena amanat konvensi CBD atau merupakan Indikator Kinerja Pemerintah (IKP) KLHK, namun juga merupakan tugas Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk dapat menjalankan amanat-amanat tersebut di atas maka pengetahuan-pengetahuan dan wawasan-wawasan mengenai evaluasi pengelolaan kawasan

Kotak 1

Apa manfaat dari lembar penilaian METT?

Lembar penilaian METT adalah alat yang sederhana dan fleksible untuk mengumpulkan penilaian terhadap:

- Capaian kegiatan pengelolaan dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta sistem sosial budaya
- Arah kebijakan pengelolaan kawasan konservasi
- Dampak dari kebijakan serta program pengelola dalam jangka pendek
- Tingkat partisipasi yang demokratis oleh setiap unsur stakeholder di kawasan

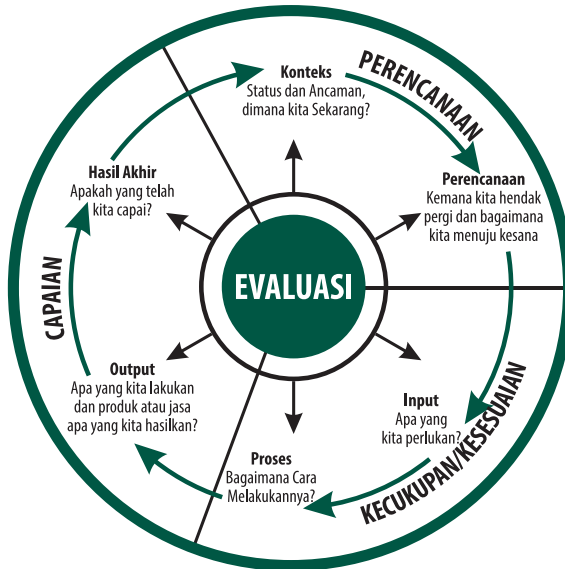
konservasi perlu disebarluaskan. Melalui Keputusan Direktur Kawasan Konservasi No.SK.27/KK/PPKK.1/KSA/5/2016, telah ditetapkan 32 orang fasilitator yang akan memandu dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan metode METT. Dengan adanya kebijakan bahwa evaluasi pengelolaan kawasan merupakan kegiatan rutin pengelolaan, maka penilaian efektivitas pengelolaan kawasan kedepan tidak hanya mengandalkan fasilitator yang telah ditetapkan saja, namun dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing UPT maupun UPTD. Untuk itulah maka disusun pedoman fasilitator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ini sebagai panduan bagi pengelola untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan kawasannya.

A. Memahami Konteks dan Penilaian METT

Penilaian METT dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 aspek utama, yaitu :

1. Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, para pihak yang terlibat, serta status hukum kawasan.
2. Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan.
3. Alokasi sumberdaya (*input*), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan.
4. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses),
5. Produk dan jasa (*output*) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan,
6. Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Rangkaian keenam elemen pengelolaan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan yang saling hubungannya tergambar dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas

Metode penilaian METT tetap mengikuti kerangka kerja umum penilaian yang diberikan oleh *World Commission on Protected Areas* (WCPA) sebagai panduan umum penilaian efektivitas di seluruh dunia. Dimana keenam elemen penilaian sesuai kerangka kerja WCPA dinilai dengan kriteria-indikator yang diukur sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Elemen-elemen dari evaluasi METT

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Indikator yang dinilai dalam Panduan METT	Fokus evaluasi
Konteks	Dimana kita sekarang? Penilaian akan arti penting, ancaman dan iklim kebijakan konservasi	Nilai Penting Kawasan Konservasi Ancaman Kerawanan Konteks nasional Mitra	Menganalisis dan mensintesis kepastian status hukum terhadap status faktual Kawasan Konservasi yang dituangkan pada hasil penilaian pada Lembar Data 1 dan 2. Dalam hal ini, evaluasi harus menggambarkan mengenai arti penting Kawasan Konservasi dalam konteks nasional, relevansi antara kondisi saat ini dengan nilai penting yang dinyatakan, tingkat kerawanan kawasan terhadap berbagai ancaman yang terjadi, dukungan kebijakan (nasional dan daerah) untuk penyelesaian masalah atau mengungkap potensi pengelolaan, serta mitra yang memberikan dukungan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi.
Perencanaan	Kemana kita hendak pergi? Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan konservasi	Peraturan dan kebijakan kawasan konservasi (pengendalian penggunaan lahan) Tujuan utama pengelolaan Kawasan Konservasi Desain kawasan konservasi Rencana Pengelolaan (jangka panjang dan operasional) dan "implementasinya" Perencanaan penggunaan lahan dan air sekitar kawasan	Menganalisis dan mensintesis mengenai ketepatan perencanaan dan implementasinya sesuai konteks, nilai penting, ancaman yang dihadapi dan desain Kawasan Konservasi yang telah terlanjur ditunjuk/ ditetapkan agar tujuan pengelolaan dapat tercapai. Ketepatan rencana pengelolaan dan dukungan kebijakan penggunaan lahan dan air di wilayah sekitarnya akan menjadi fondasi efektivitas pengelolaan kawasan.
Input	Apa yang kita perlukan? Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	Penegakan Hukum Inventarisasi sumberdaya Jumlah pegawai & staf terlatih Anggaran dan kepastian anggaran Ketersediaan sarana /prasarana (perlengkapan) secara memadai	Menganalisis dan mensintesis kesesuaian alokasi input (SDM yang kompeten, Dana, Sarpras) dengan rencana dan kebutuhan rutin pengelolaan Kawasan Konservasi agar tujuan pengelolaan dapat dicapai. Dalam panduan, hasil inventarisasi sumberdaya dianalisis ketersediaannya dan kecukupannya untuk digunakan sebagai baseline dalam pengelolaan. Selain itu, penegakan hukum sebagai penyediaan kondisi pemungkin pengelolaan Kawasan Konservasi juga dikaji kecukupannya.
Proses-Proses	Bagaimana cara melakukannya? Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	Demarkasi kawasan Sistem perlindungan Sistem penguatan kapasitas SDM Riset Pengelolaan sumberdaya Pengelolaan anggaran Pemeliharaan perlengkapan	Menganalisis dan mensintesis apakah proses-proses pengelolaan yang dilakukan telah direncanakan (rencana jangka panjang dan jangka pendek) sesuai dengan tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi. Dalam Panduan METT proses-proses mencakup proses secara rutin yang dilakukan dalam sistem pengelolaan Kawasan Konservasi serta aktor terkait yang dilibatkan, terutama Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. Fokus evaluasi semestinya menilai efisiensi dan kesesuaian proses pengelolaan dengan tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi dan nilai yang dipertahankan.

Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Indikator yang dinilai dalam Panduan METT	Fokus evaluasi
Output	Apakah hasilnya? Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa	Pendidikan dan penyadaran Pemerintah dan Swasta sekitar Keterlibatan masyarakat adat dan lokal Monitoring dan evaluasi Operator wisata komersial Pungutan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Fasilitas pengunjung Rencana kerja reguler	Menganalisis dan mensintesis hasil langsung dari proses pengelolaan yang terkait dengan tersedianya rencana kerja operasional rutin dan fasilitas pengunjung. Fokus evaluasi adalah pada efektivitas proses pengelolaan untuk menghasilkan secara langsung produk berupa barang dan jasa yang dapat dinikmati publik. Walaupun tidak dinilai dalam Panduan METT, termasuk kategori output seharusnya juga mencakup hasil langsung dari proses-proses pengelolaan yang dilakukan, antara lain: batas kawasan yang diakui masyarakat, menurunnya tingkat gangguan, peningkatan kualitas habitat satwa liar, jumlah kunjungan wisata alam, dan jasa lingkungan dan pencegahan kawasan konservasi dari ekstraksi ilegal sumber daya alam, termasuk kayu dan satwa liar-hasil penelitian, kesesuaian alokasi anggaran, jumlah pungutan, hasil money peningkatkan dukungan para pihak. Penilaian untuk output yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam panduan METT tersebut sebaiknya dilakukan sebagai "bukti" pada saat penilaian proses dan direkam dalam lembar terpisah untuk kepentingan evaluasi internal.
Hasil akhir	Apa yang telah kita capai? Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	Kelembagaan sistem perlindungan Keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal/adat Kondisi nilai-nilai	Menganalisis dan mensintesis dampak dari pengelolaan Kawasan Konservasi sesuai dengan tujuan pengelolaan. Dampak pengelolaan Kawasan Konservasi ditunjukkan dengan memebaganya sistem perlindungan Kawasan Konservasi yang didukung para pihak, manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat local/adat, serta tingkat keutuhan nilai-nilai penting Kawasan Konservasi. Fokus penilaian adalah pada efektivitas dan ketepatan dampak jangka panjang pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana diharapkan.

Sumber : Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Penilaian Kawasan Konservasi (KLHK, 2015) dengan perubahan

Setiap indikator dalam setiap elemen selanjutnya dianalisis untuk menentukan secara spesifik indikator yang dinilai lemah atau kuat guna memberikan arah bagi tindakan manajemen lebih lanjut dan intervensi pelatihan yang diperlukan.

Kerangka kerja penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi kemudian dijabarkan menjadi 3 instrumen penilaian yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, yaitu:

- 1) **Lembar Data** yang berisi informasi kunci mengenai kawasan konservasi, terdiri dari data mengenai informasi dasar (Lampiran 1 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia) dan informasi penting terkait dengan ancaman terhadap kawasan konservasi (Lampiran 2 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia). Informasi penting ini mencakup 12 kategori ancaman yang dijabarkan kedalam 54 pertanyaan. Pengisian lembar data ini harus dipahami secara utuh oleh fasilitator, mengingat banyak informasi dasar yang tidak tersedia dan/atau harus digali dari sumber-sumber di luar pengelolaan kawasan, serta ketepatan argument untuk menentukan derajat ancaman yang harus ditransformasikan menjadi tiga kategori (tinggi, sedang dan rendah).
- 2) **Lembar Penilaian**, berisi kuesioner untuk menjawab lebih kurang 30 pertanyaan utama plus 12 pertanyaan tambahan sebagai basis untuk menilai alur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, mulai dari konteks, perencanaan, input, proses, output dan hasil akhir. Konstruksi kuesioner ini harus dikenali betul oleh fasilitator mengingat indikator yang dinilai seringkali harus dievaluasi secara mendalam dan ditafsirkan secara obyektif untuk memahami efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu indikator yang dinilai harus dievaluasi keterkaitannya dengan indikator lain.

Kotak 2.

APA PENTINGNYA EVALUASI?

Review dan analisis efektivitas manajemen kawasan konservasi dilakukan dengan tujuan:

- (1) Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi kawasan konservasi;
- (2) Memberikan gambaran kondisi terbaru dan status manajemen kawasan konservasi;
- (3) Menyajikan deskripsi mendalam dari Situasi di kawasan konservasi
- (4) Menggambarkan beberapa pengalaman berbagi dan praktik terbaik; dan
- (5) Merumuskan arah strategi umum untuk merespon tantangan konservasi berkelanjutan dan penggunaan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

- 3) **Lembar Rekomendasi**, dikembangkan sebagai alat bantu untuk mensintesis hasil penilaian setiap indikator dan menyimpulkannya pada setiap elemen penilaian (Lampiran 7 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia). Dalam hal ini, fasilitator diharapkan dapat memaknai secara tepat kekuatan, kelemahan, isu prioritas untuk setiap elemen berdasarkan penilaian seluruh indikator yang telah dilakukan, sehingga dapat memandu perumusan rekomendasi guna memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

B. Penilaian Kawasan Konservasi Perairan

Mempertimbangkan bahwa METT lebih banyak difokuskan untuk penilaian efektivitas kawasan daratan, maka untuk kawasan konservasi yang didominasi oleh perairan dilakukan dengan menggunakan *Scorecard to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Area*, yang merupakan adopsi dari METT. Tujuan *Scorecard* ini adalah untuk membantu pengelola kawasan konservasi perairan menentukan dimana kesuksesan mereka dan dimana sektor yang harus ditingkatkan. Perangkat ini merupakan adaptasi dari perangkat penilaian yang ditujukan untuk kawasan konservasi daratan. Metode penilaian ini telah diadaptasi atau dikembangkan untuk memberikan gambaran singkat dari keadaan awal, upaya pengelolaan dan kemajuan yang telah dicapai selama periode tertentu, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pendekatan ini juga berguna untuk melihat indikator prioritas dan meningkatkan proses pengelolaan, akan tetapi tidak banyak menggambarkan pencapaian dari tujuan pengelolaan.

Untuk menentukan metode penilaian yang digunakan, pendekatan yang digunakan adalah dengan memperhatikan mandat pengelolaan, nilai penting kawasan dan perbandingan luas perairan laut dengan daratannya. Misalnya pada kawasan konservasi yang mempunyai mandat pengelolaan berupa terumbu karang, maka menggunakan *score card* untuk penilaian efektivitas pengelolaan kawasan tersebut. Pertimbangan penggunaan metode ditentukan oleh pengelola kawasan, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak ada keterangan mengenai pemisahan antara kawasan konservasi daratan (*terrestrial*) maupun perairan laut (*marine*).

C. Prinsip-Prinsip Penilaian METT

METT merupakan perangkat yang didesain untuk digunakan pengelola kawasan konservasi secara mandiri. Namun demikian dalam perkembangannya dirasakan perlu melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif. Penilaian efektivitas harus menjadi bagian dari siklus manajemen yang efektif, yang terkait dengan nilai, tujuan, dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan proses penilaian adalah:

1. **Objektif**, hasil penilaian diharapkan menggambarkan kondisi faktual pengelolaan yang ada. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi dengan beberapa informasi pendukung untuk meyakinkan gambaran yang diberikan dalam penilaian.
2. **Transparan**, proses dan hasil penilaian dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepada publik.
3. **Partisipatif**, proses penilaian dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang terlibat mulai dari petugas lapangan pengelola kawasan konservasi hingga staf kantor (balai/bidang/seksi). Sedangkan pihak eksternal yang penting untuk terlibat adalah masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah dari instansi yang terkait, mitra kerja pengelolaan, pihak swasta yang bekerja di dalam kawasan (penyedia jasa layanan ataupun fasilitas sarana kunjungan), pengelola daerah sekitar/area penyangga kawasan, dan otoritas ilmiah atau perguruan tinggi yang memiliki interest terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai.
4. **Reguler**, mengingat penilaian digunakan untuk memantau kemajuan pengelolaan sehingga penilaian dilakukan secara reguler setiap periode waktu tertentu. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan setiap tahun atau paling lama 2 (dua) tahun sekali.
5. **Independen**, penilaian efektivitas pengelolaan digunakan murni untuk kepentingan pengelolaan, sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan lainnya.

6. **Introspeksi**, proses penilaian ini dimaksudkan sebagai salah satu cara pengelola untuk melihat kembali kemajuan pengelolaan yang dilakukan. Sehingga pengelola menyadari sejauh mana tahapan kegiatan yang telah dilakukan dan kekurangan-kekurangan yang penting untuk ditindaklanjuti.
7. **Berbagi pengetahuan/sharing knowledge**, para pihak yang terlibat dalam proses penilaian diharapkan dapat saling berbagi informasi dari proses penilaian yang dilakukan baik diantara pengelola dan pihak-pihak diluar pengelola.

D. Keunggulan, Kelemahan, dan Kemungkinan Bias

Keunggulan perangkat METT adalah relatif mudah dan cepat untuk diselesaikan, dan dapat implementasikan dengan biaya rendah, metode ini memiliki 30 pertanyaan yang telah mencakup semua elemen Kerangka WCPA yang dikembangkan IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*). Jika METT diterapkan dalam suatu lokakarya, dapat mengarahkan pada banyak diskusi dan refleksi terkait pengelolaan kawasan. METT juga dilengkapi dengan komentar dan ‘langkah selanjutnya’, suatu poin berharga dalam menetapkan arah kebijakan dan mengevaluasi kemajuan pengelolaan Kawasan Konservasi. *Tracking tools* telah terbukti menjadi alat yang berguna untuk membangun dasar efektivitas manajemen, melacak kemajuan dari waktu ke waktu, memberikan informasi penting tentang indikator-indikator prioritas, dan memberikan sistem pemantauan sederhana di kawasan yang tidak akan mampu mengembangkan sistem monitoring yang lebih rinci di beberapa waktu mendatang (MacKinnon dan Higgins-Zogib, 2006⁴).

METT awalnya merupakan perangkat yang didesain untuk digunakan pengelola kawasan konservasi secara mandiri. Namun demikian dalam perkembangannya dirasakan perlu melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif. Lembar penilaian METT memiliki beberapa keterbatasan dan bias yang mungkin mempengaruhi hasil akhir evaluasi, antara lain:

- a. Interpretasi Evaluator
Meskipun tersedia pilihan untuk jawaban, mungkin ada beberapa perbedaan dalam interpretasi jawaban, menciptakan beberapa bias pada hasil aktual. Penilaian oleh tim internal dapat mengakibatkan subyektifitas

4 MacKinnon dan Higgins-Zogib. (2006). World Bank/WWF Alliance Tracking Tool: reporting conservation progress at protected area sites. In Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. and Courrau, J. (2006). *Evaluating Effectiveness: A framework for assessing management effectiveness of protected areas. 2nd edition.* IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xiv + 105 pp.

tinggi dibandingkan dengan penilaian oleh tim eksternal. Bias penilaian bisa diminimalkan melalui standardisasi kualitas nilai yang secara tepat menggambarkan pemaknaan indikator yang dinilai relatif terhadap elemen dan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

b. Keluwesan indikator

Kuesioner yang dikembangkan untuk METT bersifat umum dan diharapkan dapat berlaku secara generik, akibatnya dapat diaplikasikan untuk beberapa tipe kawasan konservasi seperti taman nasional, namun mungkin tidak relevan untuk kawasan konservasi tertentu yang didisain untuk tujuan khusus, misalnya Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Penerapan indikator secara serampangan tanpa melihat secara cermat tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi dapat menjadi sumber bias evaluasi METT.

c. Informasi yang tidak lengkap

Bias pada saat mengisi ancaman dan tantangan, serta penilaian indikator bisa terjadi karena tidak tersedia informasi yang lengkap dari kawasan konservasi yang dievaluasi. Setiap nilai yang diberikan harus dilengkapi dengan ketersediaan bukti yang digunakan dalam penilaian untuk menghindari bias penilaian yang bersifat sistemik. Bila diketahui bahwa bukti yang digunakan tidak lengkap harus dinyatakan dalam rekomendasi agar penilaian berikutnya lebih akurat.

d. Karakteristik METT

METT didesain secara sederhana untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi dan tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja pengelolaan Kawasan Konservasi, sehingga luaran yang dihasilkan relatif dangkal dan tidak mencakup semua aspek manajemen. Hasil penilaian METT seharusnya tidak dianggap sebagai kajian independen, atau sebagai satu-satunya dasar untuk pengelolaan adaptif. Hasil evaluasi METT yang tidak rinci sebaiknya digunakan secara komplementer dengan metode monitoring dan evaluasi lainnya.

e. Kelengkapan Indikator Penilaian

Jumlah dan komposisi indikator dalam 6 elemen pengelolaan tidak proporsional untuk menggambarkan secara utuh siklus pengelolaan. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam merumuskan kesimpulan dan rekomendasi penilaian secara holistik dalam satu kesatuan siklus pengelolaan.

Kotak 3.

Pembelajaran dari Implementasi METT Global Selama 15 Tahun⁵

Rencanakan implementasi METT secara hati-hati

1. Rencanakan proses penilaian METT dengan seksama. Tinjau ulang sebelum melaksanakan penilaian dan kumpulkan informasi yang tersedia untuk melengkapinya. Selanjutnya pikirkan mengenai kapasitas peserta dan kebutuhan pelatihan pra-penilaian, adaptasi, waktu, skala dan ruang lingkup, verifikasi, dll
 2. Berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan penilaian sepenuhnya. Penilaian METT yang baik tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat; sebagian besar pertanyaan memerlukan pemikiran yang mendalam. Pelaksanaan METT pertama kalinya setidaknya memerlukan waktu satu hari atau dua hari, namun proses penilaian berikutnya akan berjalan lebih cepat.
-

Lakukanlah dengan benar dan menyeluruh

3. Lengkapi semua lembar penilaian METT termasuk semua pertanyaan pada lembar data dan bagian naratif terkait dengan pertanyaan pilihan ganda. Bagian 'langkah selanjutnya' esensial untuk mengidentifikasi secara cepat daftar aksi yang perlu dilakukan.
 4. Gunakan data kuantitatif yang tersedia untuk mendukung penilaian, ini adalah bagian terpenting dari semua luaran pertanyaan
-

Adaptasikan dan terjemahkanlah

5. METT adalah alat generik yang dirancang untuk digunakan secara global; ada kemungkinan penilaian tidak sempurna bagi sistem/tipe kawasan konservasi di suatu daerah. Adaptasi dianjurkan; idealnya dengan menjaga kesamaan format dasar METT atau memberikan tambahan, daripada mengubah kata-kata dari METT (misal menyediakan informasi tambahan sebagai interpretasi untuk kondisi lokal atau dengan tambahan pertanyaan).
-

Ulangilah penilaian

6. METT dirancang untuk melacak kemajuan pengelolaan kawasan dari waktu ke waktu. Kawasan/jejaring yang berencana mengimplementasikan METT harus melakukan penilaian ulang setiap beberapa tahun sekali; idealnya METT menjadi bagian perencanaan tahunan.
-

BAB II Fasilitator Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

A. Kriteria Fasilitator

Keseragaman pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat melihat kondisi pengelolaan kawasan konservasi secara menyeluruh di Indonesia. Namun, bias pemahaman masih dapat terjadi dalam pengisian lembar penilaian METT jika tidak difasilitasi oleh tenaga pendamping. Kata fasilitasi berakar dari kata “facile” (Bahasa Prancis) yang memiliki padanan kata Bahasa Indonesia “mudah”. Terminologi atau definisi dari kata fasilitasi adalah proses memudahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuannya dalam suatu pertemuan.

Dengan berkembangnya jaman, fasilitasi dirumuskan sebagai proses sadar, sepenuh hati dan sekuat tenaga membantu kelompok sukses meraih tujuan terbaiknya dengan taat pada nilai-nilai dasar partisipasi. Maka, fasilitator METT adalah orang yang mempermudah proses dan membantu menyeragamkan persepsi pengelola dalam memahami konteks dan mengisi lembar penilaian efektivitas kawasan konservasi.

Berikut ini adalah kriteria fasilitator METT :

1. Memahami konteks penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan perangkat METT. Patut ditekankan bahwa penilaian dengan menggunakan perangkat METT dirancang untuk mengetahui kemajuan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tapak tertentu sepanjang waktu. Informasi METT lebih dititikberatkan pada seberapa baik kawasan konservasi dikelola (fokus pada aspek proses dan output pengelolaan) dibandingkan dengan informasi mengenai keberhasilan pengelolaan (fokus pada capaian keberhasilan konservasi alam atau nilai-nilai lainnya). Posisi

penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan perangkat METT adalah evaluasi internal (*self evaluation*) pengelola kawasan yang mengedepankan fakta dan realitas obyektif pengelolaan pada saat evaluasi dilakukan, sehingga umpan balik hasil penilaian dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaan pada periode mendatang.

2. Memahami proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan perangkat METT sehingga bisa mengawal proses penilaian dari awal sampai akhir.
3. Memastikan bahwa partisipasi dalam diskusi merata (semua peserta aktif dalam memberikan pendapatnya), tidak ada dominasi dari peserta tertentu.
4. Fasilitator harus mengetahui tujuan dan indikator yang dianggap penting di dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, untuk menghindari perdebatan atau diskusi yang pada akhirnya tidak mampu menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penilaian.
5. Fasilitator harus bisa menentukan dan mengoptimalkan alokasi waktu yang diberikan per indikator METT hingga mencapai keputusan penilaian.
6. Harus memiliki keterampilan dalam mengelola dinamika kelompok.
7. Memiliki pengetahuan, gambaran umum, serta kondisi terkini pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Terutama, peraturan perundangan terkait kawasan konservasi serta indikator konservasi pada tingkat nasional dan lokal.

B. Peran dan Tugas Fasilitator

PERAN FASILITATOR ADALAH :

1. *Pemandu Proses*, maksudnya fasilitator bertanggung jawab merancang, mengelola dan memandu proses jalannya pertemuan dengan taat pada nilai-nilai dasar fasilitasi. Sebagai fasilitator ia diuntut netral terhadap konten, maksudnya tidak mengambil posisi dalam pertemuan dan tidak memiliki kepentingan akan hasil yang akan di capai dari proses pertemuan.
2. *Pendidik proses* yaitu berperan membuat peserta paham tentang proses yang sedang dan akan berjalan selama fasilitasi berlangsung.
3. *Penantang*, maksudnya fasilitator harus bisa memberikan dorongan dan tantangan kepada masing-masing individu untuk keluar dari zona aman dan

mempelajari hal-hal yang baru (diluar kebiasaan). Dalam konteks METT, fasilitator memberikan tantangan kepada peserta dalam mengembangkan langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan pengelolaan ke depannya.

4. *Pemberi alat pemudah cara/menciptakan alat-alat bantu yang bisa membuat jalannya fasilitasi lebih cepat dan lebih mudah.* Fasilitator adalah pemberi alat bantu (*tool giver*) bagi peserta untuk memahami konteks penilaian METT, tetapi bukan alat bantu tekstual. Berikan stimulan berupa pertanyaan, contoh kasus, atau simulasi yang merangsang otak kanan peserta.

SEDANGKAN TUGAS FASILITATOR METT ADALAH :

1. Mempelajari data/informasi/fakta/bukti dari berbagai sumber tertulis maupun pengetahuan peserta yang dapat digunakan dalam penilaian untuk setiap indikator.
2. Membuat *pre-assesment* METT terhadap kawasan yang akan dinilai untuk memandu proses fasilitasi, sebagai gambaran awal penilaian METT.
3. Menjelaskan konteks penilaian METT dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di dalamnya hubungan antar elemen
4. Memfasilitasi pengisian lembar penilaian METT yang dilakukan oleh tim penilai secara lengkap termasuk komentar (berbasis fakta atau informasi yang valid) dan tindak lanjut.
5. Memfasilitasi sintesis untuk menentukan justifikasi penilaian untuk setiap indikator.
6. Memfasilitasi pengambilan keputusan penilaian untuk setiap indikator.
7. Memfasilitasi perhitungan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan.
8. Memfasilitasi penyusunan resume hasil penilaian.
9. Bekerjasama dengan *co-fasilitator* dan pencatat proses yang ditugaskan oleh kepala UPT dalam pengumpulan dan pencatatan hasil diskusi agar tersusun baik dan mudah diolah untuk penilaian.
10. Menuliskan catatan-catatan penting yang tidak terakomodasi dalam lembar penilaian METT.

C. Prinsip-Prinsip Fasilitasi dan Menjadi Fasilitator yang Baik

Beberapa prinsip yang harus diketahui oleh seorang fasilitator untuk dapat memfasilitasi adalah:

1. Mengenali peserta penilaian sesuai dengan asal lembaga, wilayah dan bidang kerjanya
2. Bersikap kritis dan berusaha menggali lebih dalam setiap pokok bahasan dalam diskusi.
3. Sabar dan tidak terburu-buru dalam memfasilitasi proses,
4. Tidak langsung menjawab terhadap pertanyaan peserta, tetapi mengembalikan mereka untuk mencoba menjawabnya (tidak memberikan solusi, solusi ada pada peserta sendiri).
5. Mampu menerima dan mengelola perbedaan pendapat.
6. Mampu memimpin dan mengarahkan pembicaraan tanpa “memaksakan”.
7. Bersedia dan mampu menerima kondisi peserta secara apa adanya, menghindari memberikan cap buruk, menertawakan dan sebagainya. Berdasarkan prinsip kesetaraan, tidak ada yang dianggap lebih tinggi (upper) atau dianggap lebih rendah (lower).

Selain memegang tujuh prinsip dalam memfasilitasi tersebut di atas, terdapat beberapa tips yang perlu diperhatikan oleh fasilitator agar dapat menjalankan tugas dan peran dengan baik, yaitu :

1. Pembukaan
Fasilitator meminta kepala UPT/pengelola untuk membuka *workshop* penilaian METT dengan arahan agar peserta berkomitmen untuk menghadiri seluruh proses penilaian efektivitas kinerja
2. Sesi Perkenalan
Fasilitator memfasilitasi perkenalan antar peserta dan membuat kesepakatan prinsip di awal pertemuan (kontrak belajar), misalnya: terbuka, aktif, santai tapi serius, agenda atau waktu mulai dan selesai, dll. Prinsip-prinsip yang disepakati sebaiknya dituliskan pada kertas plano, kemudian ditempelkan pada dinding atau tempat yang mudah terlihat.
3. Gunakan Media *Ice Breaking* (Pemecah Suasana)
Untuk memecahkan suasana supaya selalu mencair maka diperlukan media pembantu yang sering kita sebut dengan media *ice breaking*, media ini diharapkan

dapat kembali menggairahkan peserta dari proses kejenuhan, mengantuk dan sebagainya sehingga peserta kembali mengikuti kegiatan dengan penuh semangat.

4. Fasilitasi yang Efektif

Sebuah fasilitasi yang efektif akan membuat proses penilaian METT menjadi lebih mudah. Seorang fasilitator harus tidak hanya menolong kelompok mendiskusikan isu, tetapi juga memandu kelompok untuk merancang dan mencapai hasil-hasil yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Tiap peserta harus mampu memberitahu yang lain apa yang mereka capai serta merasa terlibat dan berguna dalam penilaian, bukan merasa membuang-buang waktu

Dalam memfasilitasi, adalah sangat penting untuk menaruh tujuan di depan dan mencoba realistis atas apa yang dapat dituntaskan. Bagaimana menjadi fasilitator METT yang efektif? Selain memiliki pengetahuan terkait pengelolaan kawasan konservasi, seorang fasilitator harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan fokus mereka terhadap 3 dimensi, yaitu: proses, hasil dan hubungan.

Untuk mencapai hal tersebut, fasilitator perlu menguasai teknik dasar fasilitasi, antara lain:

1. Seni Bertanya

Salah satu kesalahan terbesar seorang fasilitator adalah memaksakan gagasannya sendiri pada kelompok yang sedang mencari jalan keluar dari satu masalah. Ini sering terjadi karena si fasilitator mempunyai lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan anggota kelompok dan mungkin sudah melihat situasi serupa di tempat lain di masa lampau. Fasilitator harus menyadari bahwa dalam banyak situasi kita bekerja dengan peserta-peserta yang sudah berpengalaman, dan

Kotak 4.

TEKNIK BERTANYA

Pertanyaan adalah modal utama dalam melakukan proses fasilitasi, biasanya pertanyaan ini kita sebut dengan pertanyaan penggerak. Dalam memberikan pertanyaan penggerak, ada beberapa jenis yaitu :

1. Pertanyaan individu, kita tujukan kepada satu orang tertentu yang biasanya kita kenal (misalnya: ketua kelompok, tokoh masyarakat dan lainnya)
2. Pertanyaan umum, ditujukan untuk semua peserta
3. Pertanyaan bergilir, ditujukan kepada peserta secara bergiliran misalnya dari sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya
4. Pertanyaan ingatan, ditujukan kepada peserta agar peserta mengingat kejadian yang telah lalu
5. Pertanyaan memilih, jawabannya telah disebutkan oleh fasilitator dan peserta hanya tinggal memilih yang mereka anggap paling sesuai.

karena itu kita harus mengesampingkan pandangan atau cara pandang kita sendiri dan tetap netral dalam membantu mereka.

2. Seni Menggali Lebih Dalam

Seni menggali lebih dalam termasuk dalam ketrampilan dasar fasilitasi. Biasa juga disebut probing. Teknik ini digunakan untuk menggali lebih dalam lagi dan menjaga agar orang tetap berbicara. Seni *probing* dapat dikatakan sebagai teknik wajib bagi para fasilitator karena dapat membuat sebuah perbedaan positif – di tingkat kualitas dan kedalaman – serta, tidak membiarkan diskusi sebuah kelompok macet. Sebagai contoh, ketika diskusi melebar ke kemana-mana sehingga orang kehilangan benang merah, probing dapat digunakan untuk memindahkan diskusi pada hal-hal yang lebih detil dan spesifik. Komunikasi non-verbal juga dapat digunakan untuk melakukan *probing*: menganggukkan kepala, menjaga kontak mata langsung, dan tetap berdiam diri. Cara ini seringkali lebih menyemangati anggota kelompok untuk mengeksplorasi pemikirannya lebih lanjut. Namun, terlalu sering melakukan *probing* dapat menyebabkan peserta merasa diinterogasi atau anggota lain merasa tidak dipedulikan.

3. Seni Membuat Ikhtisar

Seni membuat ikhtisar ini disebut juga parafrase. Teknik ini berarti mengulang, dalam bahasa Anda sendiri, apa yang telah dikatakan seseorang. Parafrase sangat berguna untuk memeriksa pemahaman dengan si pembicara. Ketika fasilitator mengulang kalimat-kalimat si pembicara, peserta yang lain juga akan saling memeriksa pemahaman mereka atas apa yang dimaksudkan pembicara. Jika Anda salah menangkap pesan yang dimaksud, si pembicara akan dapat langsung memperbaiki kesalahpahaman itu. Contoh penggunaan parafrase: "Anda tadi mengatakan bahwa" atau "Saya memahami maksud anda yaitu.....". Anda juga dapat melakukan *mirroring* yaitu menangkap apa yang dikatakan orang lain dengan mengulang kembali setiap kata yang diucapkan. Kadang-kadang ini dibutuhkan untuk meyakinkan orang-orang tertentu bahwa mereka betul-betul didengarkan. Parafrase paling cocok digunakan untuk membantu kalimat-kalimat peserta yang tidak jelas, terlalu abstrak, konsep tidak terang, atau mempunyai terlalu banyak ide.

4. Seni Mengaitkan (Pertanyaan dan Komentar)

Seni mengaitkan atau *referencing back* mendorong anggota untuk mengetahui dan membangun di atas salah satu ide yang lain. Ini juga memberi kesempatan untuk tidak setuju dan menunjuk perbedaan di antara ide-ide yang ada. Teknik ini juga mendorong partisipan untuk mendengarkan satu sama lain. Kadang kala, partisipan mengulang apa yang telah dikatakan sebelumnya karena mereka tidak mendengar apa yang dikatakan atau ingin mengatakan dengan caranya sendiri. Dengan menunjukkan komentar mirip yang telah disampaikan peserta lain sebelumnya, para peserta didorong untuk mendengar lebih teliti dan mengkaitkan komentar-komentar mereka pada apa yang telah dikatakan orang lain.

Keuntungan lainnya, *referencing back* dapat dikatakan sebagai demonstrasi bahwa Anda mendengarkan setiap orang dan memberi perhatian pada para peserta atas komentar-komentar mereka.

5. Seni Mengamati

- a. *Observasi* atau pengamatan adalah kemampuan untuk: mengamati apa yang sedang terjadi tanpa menghakimi memahami tanda-tanda non-verbal seseorang dan kelompok secara objektif Mengapa ini penting? Seringkali kita menyampaikan sesuatu dengan kata-kata tetapi sebetulnya secara nonverbal ada pesan lain yang disampaikan. Ini terjadi karena lebih mudah mengendalikan kata-kata kita dibandingkan dengan kelakuan kita. Sebagai seorang fasilitator, pengamatan memberikan peluang bagi Anda untuk mengetahui apa yang dipikirkan atau diyakini seseorang dari perilakunya. Sesungguhnya komunikasi non-verbal dapat menyampaikan pesan-pesan yang sangat kuat. Apa saja yang dapat diamati? Di dalam sebuah kelompok, orang akan berinteraksi dengan cara yang berbeda-beda. Bukan saja karena apa yang dikatakan berbeda tetapi juga karena dipengaruhi bagaimana sesuatu dikatakan Pengamatan yang baik akan membantu fasilitator untuk mendapat gambaran tentang perasaan dan sikap para peserta serta memantau dinamika, proses-proses dan partisipasi kelompok.

Karenanya, sangat penting bagi fasilitator untuk mengembangkan ketrampilan mengamati jenis-jenis komunikasi non-verbal. Fasilitator harus melakukannya dalam waktu singkat, dan tanpa diketahui oleh yang lain.

Dua teknik yang berkaitan dengan keterampilan ini adalah:

- b. *Encouraging*: Seni memberikan ruang bagi setiap peserta untuk berpartisipasi tanpa paksaan. Mendorong dalam hal ini terutama membantu pada tahap-tahap awal diskusi, pada waktu para peserta masih *warming-up*. Beberapa contoh *teknik encouraging*: ” Siapa lagi yang punya gagasan?” atau “Kita sudah mendengar pendapat bapak-bapak, mari kita dengarkan pendapat para ibu.”
 - c. *Making Space*: Setiap pertemuan kelompok akan ada peserta yang banyak bicara dan ada pula yang jarang berbicara. Perhatikan peserta yang pendiam, perhatikan gerak-gerik tubuh atau ekspresi muka mereka yang mungkin menunjukkan bahwa mereka ingin bicara. Undang mereka berbicara. Misalnya: “Apakah ada gagasan yang ingin anda ungkapkan?” atau ” Ada yang ingin ditambahkan?”. Kalau mereka menolak, jangan memaksa dan teruskan proses.
6. Seni Menyimak
- a. Sifat “dua arah” dari komunikasi, yang penting untuk meningkatkan pemahaman antar pihak, seringkali diabaikan orang. *Ketrampilan menyimak adalah ketrampilan kunci seorang fasilitator* karena cara Fasilitator menyimak mempunyai arti bagi orang yang sedang berbicara dan membantu meningkatkan kualitas komunikasi antara Fasilitator dan orang itu. Disamping itu, fasilitator juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam kelompok, dan membantu anggota kelompok saling menyimak dengan lebih baik. Beberapa teknik yang berkaitan dengan seni menyimak ini antara lain :
 - b. *Stacking*: Proses membantu orang bergiliran berbicara ketika beberapa orang ingin berbicara bersamaan.
 - c. *Drawing Out*: Proses menggali lebih jauh dengan cara mendukung orang supaya menjeleaskan lebih lanjut ide atau gagasannya. Contoh: ” Bisa jelaskan lebih lanjut?” atau “Apa yang anda maksud dengan.....?”
 - d. *Gathering*: Merupakan teknik mengumpulkan gagasan, bukan membahasnya. Mengumpulkan adalah ketrampilan yang memadukan antara *mirroring* dan *paraphrasing* ditambah dengan gerakan-gerakan fisik. Ketrampilan mendengar dan memberikan pengakuan pada pendapat atau gagasan orang dapat mengurangi kecenderungan mereka untuk membela gagasannya.

Mengumpulkan gagasan dengan efektif dimulai dengan penjelasan singkat tentang tugas yang akan dikerjakan. Misalnya : “Dalam 10 menit mendatang, berikan tanggapan pada usulan ini dengan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya!”

- e. *Tracking*: Terkadang beberapa pokok-pokok pikiran muncul bersamaan dalam sebuah diskusi. Fasilitator membuat ringkasan pembicaraan, kemudian menyebutkan setiap isu yang muncul dan meminta pendapat peserta, apa isu yang disebutkan sesuai atau tidak.
- f. *Balancing*: Diskusi seringkali mengikuti pembicaraan orang pertama. Dengan teknik *balancing*, fasilitator membantu menyeimbangkan diskusi dengan cara memancing pandangan-pandangan lain yang tidak terungkap.
- g. *Intentional Silence*: Teknik ini dibutuhkan untuk memberikan kesempatan memikirkan apa yang ingin dikatakan; memberikan kesempatan peserta lain berfikir lebih dalam. Gunakan kontak mata dan bahasa tubuh; fokuskan perhatian pada pembicara. Jangan katakan apa-apa, tidak juga “hmmm...” maupun “ya....” Tidak juga mengganggu ataupun menggelengkan kepala. Tetap rileks & perhatikan pembicaraan. Fasilitator dapat mengatakan, “Mari kita diam sejenak untuk mencoba memahami arti diskusi ini.”

7. Fasilitasi Vibran

Vibran dalam bahasa Inggris berarti penuh dengan energi dan antusiasme. Kata ini menjadi sebuah jiwa baru yang dikolaborasikan ke dalam dunia fasilitasi. Fasilitasi Vibran adalah proses antusiasme membantu kelompok menciptakan pilihan baru terbaiknya dengan taat pada nilai-nilai keagungan insani.

Untuk mengaktifkan nilai keagungan insani, elemen-elemen manusia seperti *feeling* (merasa), *thinking* (berpikir) dan *acting* (bertindak) perlu diaktifkan. Dimulai dengan hati, vibran menstimulus antusiasme yang penuh energy dan menular. Sehingga, energi positif beresonansi di antara peserta, menyebarkan gairah dan semangat terhadap masing-masing individu, antar individu.

Ada tiga hal penting membuat fasilitasi menjadi proses sadar dan sepenuh hati membantu kelompok sukses mencapai tujuan atau menemukan solusi-solusi baru. Pertama, menyimak adalah jantung fasilitasi. Kedua, membangun rasa saling percaya adalah kunci masuk pertemuan yang efektif. Ketiga, fasilitator percaya pada kekuatan kelompok dan kekuatan proses.

D. Teknik Pemecahan Masalah

Dalam menfasilitasi, biasanya fasilitator menemui beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut harus segera diatasi agar jalannya diskusi dalam pengerjaan lembar penilaian METT sesuai dengan tujuan. Beberapa hambatan dan alternatif pemecahannya yang sering ditemui fasilitator antara lain dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Teknik Pemecahan Masalah

Hambatan	Alternatif mengatasinya
<i>Ketidakhahaman peserta terhadap indikator yang dibahas</i>	Memberikan ilustrasi dengan berbagai media yang memungkinkan untuk memperjelas indikator yang sedang dibahas Memberikan gambaran melalui contoh kasus yang relevan
<i>Keengganan para peserta untuk menyampaikan pendapat</i>	Tinjaulah kembali maksud dan tujuan penilaian. Pancinglah peserta agar mengemukakan hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Untuk hal ini terkadang fasilitator perlu membuat pertanyaan kunci terkait indikator yang sedang didiskusikan. Memberikan kesempatan kepada salah satu peserta untuk memberikan respon awal terkait indikator yang sedang dibahas
<i>Jumlah kehadiran pada lokakarya berkurang</i>	Dalam mengawali lokakarya, nyatakanlah tujuan dengan jelas dan tinjaulah kembali susunan acara lokakarya. Berilah kesempatan para peserta untuk mengubah atau menambah tujuan dan isi dari agenda tersebut. Pancinglah peserta untuk menyatakan setiap hal yang menjadi perhatian mereka, atau yang masih mereka pertanyakan. Jika hal tersebut membutuhkan penyelesaian, selesaikanlah secepat mungkin. Usahakan agar suasana lokakarya gembira, meriah, dan aktif. Jelaskanlah pada setiap peserta bahwa keterlibatannya merupakan sesuatu yang penting bagi kelompok.
<i>Kekurangan bukti dan fakta untuk memutuskan skor penilaian</i>	Memfasilitasi peserta untuk menyepakati pendekatan dalam pengambilan keputusan dalam penetapan nilai terkait indikator tersebut Masukkan pengumpulan bukti dan fakta sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan akurasi penilaian METT pada periode berikutnya.
<i>Diskusi kurang efektif</i>	Pemecahan kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Peserta yang mendominasi diskusi perlu diingatkan. Jika diskusi kurang hidup, gunakan teknik bertanya atau berikan kesempatan menuliskan aspirasi peserta dalam selembarnya.

Hambatan	Alternatif mengatasinya
<i>Subjektifitas penilai</i>	Fasilitator menjembatani celah subyektifitas dengan memastikan rencana dan fakta obyektif terkait indikator yang dibahas sebagai dasar memutuskan skor Fasilitator memberikan contoh-contoh kawasan konservasi lain yang memiliki kondisi lebih baik sehingga peserta dapat melihat kondisi kawasannya dengan lebih obyektif Setelah menimbang proporsi antara frekuensi dan intensitas kegiatan terkait dengan penilaian efektivitas, fasilitator bersama tim penilai kemudian menyimpulkan sudahkah intervensi manajemen untuk setiap indikator mencukupi.
<i>Jawaban terkunci</i>	Kriteria skoring pada lembar penilaian METT seringkali membuat <i>deadlock</i> dalam mengeksplorasi lebih lanjut setiap indikator. Memancing pertanyaan yang mengarahkan eksplorasi mendalam atas fakta-fakta yang terkait dengan indikator tersebut Fasilitator harus menjelaskan agar penilai tidak fokus kepada kriteria skoring dan mengarahkan pembahasan mendalam terkait indikator terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian

E. Membuat Keputusan Kelompok

Banyak hambatan yang menghalangi efektivitas kelompok dalam pengambilan keputusan karena kurangnya kejelasan tentang isi dan proses keputusan itu. Diperlukan keterampilan (kemampuan) untuk membuat keputusan kelompok, di mana seluruh anggota kelompok secara penuh berpartisipasi dan sungguh-sungguh terlibat, serta menyepakati keputusan itu secara obyektif. Keputusan dapat dievaluasi dengan dua cara, yaitu:

1. Kita bisa memandangnya (mengevaluasinya) dari segi isi keputusan, dengan kata lain keputusan apa yang telah dibuat. Apakah keputusan ini cukup mantap? punya arti sesuatu? adakah alasan-alasan yang masuk akal yang mendukung keputusan itu?
2. Kita juga bisa memandangnya (mengevaluasinya) dari segi proses, atau bagaimana keputusan itu dibuat. Adakah orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan ikut dilibatkan? Adakah orang-orang yang terlibat itu ikut ambil bagian? Apakah semua peserta sungguh-sungguh setuju? Apakah pilihan-pilihan lain yang ada juga ikut dipertimbangkan? Apakah nanti ada akibat-akibat bagi orang yang harus menjalankan keputusan tersebut.

Kesalahan yang kerap kali terjadi ialah kita hanya memandang pada isi keputusan itu saja, padahal proses (atau bagaimana keputusan itu dibuat) sangat berkaitan dengan seberapa banyak dukungan yang bisa diterimanya.

Kotak 5

Tahap-tahap pengambilan keputusan

1. **Persiapan** → peserta menyepakati hal-hal yang akan dibahas dan aturan main dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kapan pertemuan akan diakhiri
2. **Informasi** → Peserta memperoleh dan menguji kebenaran informasi
3. **Pembahasan** → Peserta mengembangkan pembahasan untuk menelaah konsekuensi-konsekuensi secara pribadi maupun kelompok
4. **Keputusan** → Keputusan diambil dari penyampaian pilihan oleh peserta. Penyampaian pilihan secara pribadi (terbuka maupun tertutup/voting) tidak menjadi persoalan asalkan sudah disepakati sejak awal
5. **Pengamanan** → peserta membahas aspek legalitas dari keputusan ini (seperti, misalnya tanda tangan dari setiap peserta yang hadir maupun notulen rapat).

Catatan : Notulen mesti dengan tegas memisahkan hal-hal yang bersifat informatif dengan keputusan. Adalah baik memisahkan lembar-lembar dalam buku pada lajur kanan dan kiri untuk masing-masing diisi dengan informasi dan keputusan.

BAB III Tahapan Fasilitasi Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

A. Prakondisi

Tahap prakondisi merupakan tahap persiapan dari mulai persiapan tim penilaian yang berasal dari lingkup internal unit pengelola, mengidentifikasi pihak-pihak eksternal yang perlu dilibatkan, hingga persiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penilaian.

Tahapan kegiatan dalam prakondisi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi rencana penilaian Efektivitas pengelolaan kawasan
Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak pengelola kepada petugas dan staf yang dinilai mampu untuk melakukan penilaian. Kepala UPT melakukan sosialisasi rencana penilaian efektivitas pengelolaan kawasan dan membentuk tim penilaian internal.
2. Tim penilaian internal
Tim internal di tingkat pengelola ditunjuk oleh kepala unit pengelola sesuai dengan kebutuhan pengelola yang bertugas untuk menyiapkan proses penilaian. Penilai internal terdiri dari staf lapangan dan staf kantor (balai, bidang, seksi dan resort). Penunjukan tim internal ini bertujuan sebagai tim yang bertanggung jawab dalam penilaian METT, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dari tim internal ini diharapkan ada minimal satu orang yang dapat berperan sebagai fasilitator pada proses penilaian nantinya.

Untuk penilaian lanjutan, fasilitator dapat juga mempelajari hasil penilaian sebelumnya melalui laman mett.ksdae.menlhk.go.id . Fasilitator dapat melihat apakah rencana tindak lanjut dalam penilaian METT sudah menjadi bagian

rencana aksi atau tidak. Hal ini dapat dikonfirmasi lagi dalam penilaian lanjutan.

Setelah tim penilai internal UPT melakukan *pre-assesment* sebagai simulasi awal sebelum melakukan penilaian METT yang sesungguhnya. Data *pre-assesment* tersebut berfungsi sebagai *baseline* bagi fasilitator maupun tim penilai agar mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi terkini kawasan konservasi yang hendak dinilai efektivitasnya.

3. Penyiapan data dan hasil analisis

Setelah dilakukan penyiapan tim, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian mulai dari nilai penting kawasan, anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, gangguan kerawanan dan penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi yang akan dinilai. Data dan hasil analisis akan digunakan sebagai alat verifikasi penilaian. Beberapa dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dapat bersumber dari dokumen internal dan dokumen eksternal sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jenis dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dalam penilaian

No	Jenis Dokumen	Penggunaan
1.	Rencana Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek	Melihat sejauh mana nilai penting kawasan dikelola
2.	Zonasi/Blok Pengelolaan	Melihat pola penggunaan kawasan
3.	Anggaran Pengelolaan	Melihat alokasi penganggaran terhadap kebutuhan pengelolaan nilai penting kawasan
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil setempat, perencanaan detail lainnya seperti Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah,	Melihat pola penggunaan lahan disekitar kawasan konservasi
5.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Melihat dampak-dampak signifikan pembangunan sekitar kawasan konservasi
6.	Dokumen kerjasama	Melihat kerjasama pengelolaan yang telah dilakukan
7.	Laporan-laporan survey/riset (internal, mitra maupun pihak lain)	Informasi mengenai status konservasi nilai-nilai penting kawasan, analisa sosial ekonomi masyarakat
8.	Dokumen pendukung lainnya	Terkait dengan SDM, hasil riset, program penyadartahuan, sarana prasarana pengelola, inventarisasi potensi, ancaman kerawanan, kerjasama kemitraan, izin pemanfaatan kawasan, dan lain-lain.

4. Identifikasi pihak eksternal yang perlu dilibatkan.

Untuk memperkuat hasil penilaian dan menjaga independensi, maka proses penilaian dilakukan oleh pengelola kawasan bersama-sama dengan pihak terkait. Unsur penilai dari pihak terkait terdiri dari masyarakat dan pemangku kepentingan dari dan di sekitar kawasan.

Pemangku kepentingan diantaranya berasal dari badan/instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penilaian dan dari perwakilan mitra kerja. Proses penilaian penting untuk melibatkan perwakilan masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan. Sebagai catatan, apabila terdapat masyarakat adat di wilayah pengelolaan suatu kawasan konservasi, maka perwakilan masyarakat adat tersebut perlu dilibatkan. Adanya pihak swasta yang menjalin kerjasama dengan pengelola kawasan (misalnya pengusaha pengelola air kemasan dan bentuk kerjasama lainnya) merupakan bagian dari pemangku kepentingan yang penting untuk terlibat dalam penilaian, selain juga pihak-pihak lain yang mempunyai informasi dan ketertarikan terhadap kawasan seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya. Pada kondisi tertentu dimana dibutuhkan pengetahuan khusus dari ahli, maka dalam proses penilaian dapat melibatkan tenaga ahli tertentu sebagai narasumber

B. Proses Penilaian

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan rangkaian dari aktivitas penilaian, perumusan ringkasan/resume hasil penilaian, pelaporan hasil dan tidak lanjut upaya-upaya perbaikan. Dimana pada akhirnya hasil-hasil yang diperoleh untuk seluruh kawasan konservasi di Indonesia perlu ditelaah lebih lanjut guna memberikan gambaran kondisi pengelolaan secara umum di Indonesia, selain itu hasil penilaian dapat dijadikan alat pemantauan oleh Direktorat Jenderal KSDAE terhadap aktivitas-aktivitas perbaikan yang dilakukan di setiap kawasan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengisian lembar penilaian METT adalah sebagai berikut:

- a. Diskusi dipandu oleh fasilitator yang memahami tentang proses penilaian efektivitas pengelolaan. Setelah tim internal dari pengelola terbentuk, maka proses penilaian dapat dilakukan melalui pertemuan antara tim internal dan pihak-pihak pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi pada tahap prakondisi dan diundang oleh pengelola kawasan.

- b. Apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian, maka disarankan untuk tetap menggunakan setidaknya anggota tim yang sama. Jika hal ini tidak dimungkinkan, informasi dari penilai sebelumnya juga dibutuhkan untuk mengarahkan penilaian dan memastikan konsistensi atas evaluasi yang akan dilaksanakan.
- c. Proses penilaian dilakukan melalui sebuah forum diskusi terbuka. Jawaban-jawaban yang diberikan pada proses penilaian diharapkan merupakan hasil diskusi yang terbuka dan kesepakatan peserta setelah memahami makna-makna dari setiap pertanyaan. Selain menyimpulkan jawaban, penilaian perlu memberikan penjelasan atas kondisi yang ada serta langkah-langkah ke depan untuk mengatasi indikator yang muncul.

Setelah memastikan persiapan-persiapan telah dilakukan maka proses selanjutnya adalah pengisian lembar data/kuisioner dalam METT. Pada tahap ini forum diminta untuk mengisi dan menyepakati bersama jawaban-jawaban pada tiga lembar data yang terdiri dari :

- a. Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi (Lampiran 1 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia)
Merupakan lembar isian yang berisi detail penilaian dan informasi dasar tentang situs, seperti nama, ukuran dan lokasi, dll. Jika ada kode unik situs kawasan konservasi yang terdapat dalam *World Database on Protected Area* (WDPA) juga dimasukkan. WDPA dapat diakses melalui situs web UNEP-World Conservation Monitoring Center di www.unep-wcmc.org/wdpa atau www.protectedplanet.net. Informasi kontekstual lain seperti penetapan lokal, seperti taman nasional, cagar alam, dll, serta kategori manajemen kawasan konservasi IUCN , kepemilikan, jumlah staf dan anggaran juga dimasukkan dalam lembar pertama ini serta informasi tentang siapa yang terlibat dalam penilaian. Informasi selanjutnya adalah tentang penetapan internasional pada kawasan yang dinilai, misalnya sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, *Man and Biosphere Reserves* (Cagar Biosfer), *Ramsar Site* dan sebagainya.
- b. Data Ancaman Kawasan Konservasi (Lampiran 2 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia)
Merupakan lembar isian yang berisi daftar generik ancaman yang dihadapi kawasan konservasi. Pada lembar data ini penilai diminta untuk mengidentifikasi ancaman dan tingkat dampaknya terhadap kawasan konservasi. Kolom

keterangan wajib diisi terutama jika terdapat ancaman dimaksud yang menggambarkan kondisi ancaman.

c. Lembar Penilaian

Terdiri dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk kolom-kolom untuk mencatat detil dari penilaian. Semua pertanyaan harus diisi kecuali untuk pertanyaan yang tidak kontekstual (contoh indikator masyarakat adat) atau tidak diwajibkan pada Kawasan Suaka Alam seperti Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

1) Pertanyaan - pertanyaan dan nilai

Penilaian dibuat dengan menggunakan skor sederhana antara 0 (buruk) hingga 3 (sangat baik). Empat alternatif jawaban disediakan untuk setiap pertanyaan yang akan membantu penilai memberikan penilaian yang sesuai dengan tingkatan skor yang ada. Sebagai tambahan, terdapat pertanyaan tambahan yang terkait dengan tema kunci pada pertanyaan sebelumnya dan memberikan tambahan informasi dan nilai. Apabila ada situasi dimana tidak satupun dari empat alternatif jawaban yang sangat sesuai dengan suatu kondisi kawasan konservasi, disarankan agar dipilih jawaban yang paling mendekati dan gunakan bagian komentar/penjelasan yang tersedia. Pertanyaan yang tidak relevan dengan suatu kawasan konservasi tertentu harus ditinggalkan, dengan menuliskan alasannya dibagian komentar/penjelasan (misalnya pertanyaan mengenai operator wisata pada kawasan cagar alam).

Lembar data 3 pada pedoman penilaian⁶ ditambahkan keterangan yang berisi verifikasi-verifikasi untuk setiap jawaban yang dipilih yang akan memberi panduan pengelola menentukan tahapan yang dicapai atau skor yang sesuai.

2) Komentar/Penjelasan

Kolom komentar/penjelasan disamping setiap pertanyaan memberikan tempat untuk penjelasan atas penilaian kualitatif dengan lebih detil. Kolom keterangan ini berisi verifikasi-verifikasi untuk setiap jawaban yang dipilih yang akan memberi panduan pengelola menentukan tahapan yang dicapai atau skor yang sesuai, sehingga kolom komentar/penjelasan ini wajib diisi.

⁶ Perdirjen KSDAE Nomor: P.15/ KSDAE-SET/2015 yang telah diperbaharui menjadi Perdirjen KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi di Indonesia

Kolom ini bisa diisi dengan pengetahuan pegawai setempat (dibanyak kasus, pengetahuan pegawai merupakan sumber yang paling informatif dan terpercaya), dokumen referensi, hasil pemantauan atau kajian dan penilaian dari luar – intinya adalah agar semua yang membaca laporan ini mendapatkan gambaran kenapa penilaian dibuat. Penjelasan yang lengkap akan memberikan kepercayaan yang lebih baik atas hasil dari penilaian dengan membuat dasar pembuatan keputusan menjadi lebih transparan. Kolom ini memberikan informasi referensi dan informasi untuk pengelola kawasan di masa mendatang.

3) Langkah kedepan

Kolom ini memberikan informasi referensi dan informasi untuk pengelola kawasan di masa mendatang. Untuk setiap pertanyaan, penilai diminta untuk mengidentifikasi setiap tindakan yang akan meningkatkan kinerja pengelolaan berupa intervensi pengelola kawasan.

Sebagai tambahan penjelasan untuk kawasan yang pengelolaannya meliputi daratan maka proses penilaian menggunakan Panduan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Daratan sebagaimana pada Lampiran 3 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia.

Untuk kawasan konservasi dengan mandat pengelolaan meliputi kawasan perairan dan potensi di dalamnya, proses penilaian menggunakan Scorecard Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana pada Lampiran 4 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia.

Dalam tahap pengisian lembar penilaian METT, fasilitator berperan memfasilitasi jalannya workshop dengan fokus untuk memastikan Lembar Data 1, Lembar Data 2 dan Lembar Penilaian (30 indikator) diisi dengan cara yang obyektif dan terstandar. Karenanya perlu peningkatan kapasitas fasilitator terkait sistem pengelolaan kawasan konservasi dengan pendekatan lanskap, karena kriteria skoring pada beberapa indikator seringkali membuat *deadlock* dalam mengeksplorasi lebih lanjut setiap indikator. Seringkali, dalam menentukan nilai, antara merasa cukup dan betul-betul cukup berbeda, oleh karenanya fasilitator harus menjembatani celah subyektifitas yang tinggi pada lembar penilaian METT. Fasilitator harus tajam melihat proporsi antara frekuensi dan intensitas kegiatan terkait dengan penilaian kinerja, menyimpulkan sudahkah intervensi manajemen untuk setiap indikator mencukupi.

Di tahap ini, tugas fasilitator akan dibantu dengan kertas kerja untuk meningkatkan hasil penilaian METT. Fasilitator akan menulis catatan tersendiri dan melaporkan ke direktur Kawasan Konservasi. Fasilitator juga perlu menghindari *one spot analysis* dengan memperhatikan nilai yang berkembang antara pre assesment atau evaluasi sebelumnya sebagai *baseline*, maka penilaian kedua bersifat progress.

Langkah selanjutnya dalam proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan adalah perhitungan nilai indeks efektivitas pengelolaan berdasarkan nilai- pada lembar penilaian yang tercantum pada Lampiran 5 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia. Pada pengulangan proses penilaian, diharapkan untuk melihat/merujuk pada hasil penilaian sebelumnya. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya dan kemudian dapat mengamati sejauh mana perkembangan pengelolaan kawasan dan melihat faktor-faktor penghambat dalam peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Leverington *et al.* (2010)⁷ melakukan analisis terhadap berbagai hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di seluruh dunia. Nilai efektivitas pengelolaan dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- < 33% : Pengelolaan kawasan tidak memadai (tidak efektif)
- 33 - 67% : Pengelolaan kawasan kurang memadai (kurang efektif)
- > 67% : Pengelolaan kawasan cukup baik (efektif)

C. Penyusunan Resume Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tahapan selanjutnya setelah proses penilaian adalah menyusun resume hasil penilaian efektivitas pengelolaan. Resume hasil penilaian memberikan masukan berupa beragam opsi perbaikan sesuai dengan hasil diskusi yang berkembang pada proses penilaian dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, indikator prioritas dan rekomendasi. Untuk mempermudah dalam penyusunan resume, digunakan tabel identifikasi yang memuat nilai-nilai setiap pertanyaan dan prosentase setiap aspek (Lampiran 6 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

⁷ Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M. Hockings. 2010. Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study. Second Edition. The University of Queensland. Brisbane, Australia.

Indonesia). Persentase masing-masing aspek tersebut menjadi salah satu input dalam resume hasil penilaian.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, dan indikator prioritas, langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai langkah-langkah perbaikan dalam rangka upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan. Langkah-langkah perbaikan yang dicantumkan dalam rekomendasi diharapkan bersifat konkret dan spesifik sehingga tindak lanjut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pengelola kawasan, direktorat teknis, institusi di internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah ataupun pihak terkait lainnya.

Resume hasil penilaian yang mencakup beberapa substansi, yaitu:

- ❖ Nilai efektivitas pengelolaan kawasan
- ❖ Faktor kekuatan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan (mengacu pada poin - poin dengan nilai maksimal)
- ❖ Faktor kelemahan dari pengelolaan masing-masing unit kawasan.
- ❖ indikator prioritas yang perlu ditingkatkan.

Resume langkah-langkah tindak lanjut yang didasarkan pada hasil penilaian (sesuai Lampiran 7 Buku Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia). Rekomendasi hasil penilaian akan diarahkan dan didistribusikan kepada unsur penilai dan Pemerintah pusat untuk mendapatkan respon dan tindak lanjut.

Dalam pengambilan keputusan dan rekomendasi, perlu sintesis antar indikator untuk membuat rekomendasi kebijakan/pengelolaan. Fasilitator perlu memastikan kembali kepada peserta agar Rencana Tindak Lanjut METT ditinjau sebagai masukan dan bahan perbaikan RKT. Sehingga ada perbaikan kontinyu yang meningkatkan kinerja efektivitas kawasan ke depannya

D. Penyusunan laporan

Pengelola kawasan (UPT) mempunyai kewajiban menyusun laporan hasil penilaian efektivitas pengelolaan dengan menarasikan resume penilaian yang ada. Laporan disusun secara ringkas dan memuat beberapa hal, yaitu:

- ❖ Informasi kawasan
- ❖ Ancaman yang dihadapi saat ini
- ❖ Kondisi pengelolaan saat penilaian
- ❖ Rekomendasi langkah-langkah perbaikan dan rencana aksi baik secara jangka panjang maupun yang perlu segera dilakukan dalam waktu dekat.

Laporan hasil penilaian efektivitas yang disusun oleh masing-masing pengelola (UPT/ UPTD) kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem melalui Direktorat Kawasan Konservasi. Penyampaian laporan ini dilakukan tidak lama setelah proses penilaian berlangsung. Data-data hasil penilaian yang diterima oleh Direktur Jenderal KSDAE akan dikumpulkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi untuk kemudian dilakukan telaahan dan analisa lebih lanjut.

Telaahan dan analisa yang dihasilkan kemudian akan dijadikan dasar untuk penyusunan laporan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara nasional. Disamping itu informasi juga digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan, baik yang akan dilakukan oleh Ditjen KSDAE maupun yang perlu diinformasikan ke lembaga-lembaga yang dirasakan mempunyai otoritas dalam peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.



BAB IV Penutup

Perangkat METT merupakan *internal assesment* bagi pengelola kawasan konservasi untuk mengevaluasi dirinya sendiri, yang akan memberi manfaat optimal jika dan hanya jika penilaian dilakukan secara berulang dan runut waktu dengan mengedepankan obyektivitas penilaian. Untuk meningkatkan obyektivitas penilaian dilakukan pelibatan para parapihak dalam proses penilaian melalui sebuah lokakarya. Untuk menjembatani kesepakatan dalam menetapkan nilai untuk setiap indikator, diperlukan fasilitator yang memahami konteks, tata cara dan substansi kriteria/indikator METT.

Panduan ini memberikan penekanan pada peran fasilitator dalam memandu jalannya penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan meminimalkan terjadinya bias mengenai pemahaman peserta penilaian terhadap kriteria dan indikator penilaian. Selain itu peran fasilitator juga sangat penting dalam memandu kesepakatan penilaian untuk setiap indikator. Panduan ini merupakan dokumen hidup (*living document*) yang secara periodik dapat diperbaharui berdasarkan akumulasi pengalaman dalam proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.



LAMPIRAN





Lampiran 1 . **Lembar Data I Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi**

Nama, Afiliasi dan detail kontak penanggung jawab penyelesaian METT (termasuk alamat email)				
Tanggal pelaksanaan penilaian				
Nama Kawasan Konservasi	Sesuai dengan nama kawasan konservasi pada SK penunjukan atau penetapan terakhir			
Kode situs WDPA (dapat ditemukan di www.unep-wcmc.org/wdpa)	Dapat dilihat juga dalam https://www.protectedplanet.net			
Penetapan	Nasional Penetapan atau penunjukan fungsi kawasan konservasi sesuai SK terakhir	Kategori IUCN Berdasarkan kategori yang tercantum dalam kategori IUCN. Dapat dilihat pada situs https://www.protectedplanet.net	Internasional (silakan dilengkapi juga pada halaman sebelah)	
Negara	Indonesia			
Lokasi Kawasan Konservasi (provinsi dan jika dimungkinkan juga peta acuan)	Fasilitator harus memastikan bahwa peta yang dilampirkan adalah peta resmi, sejauh mungkin merupakan bagian dari "one map policy", atau peta lampiran SK penetapan atau SK penunjukan tergantung dari sejauh mana kekuatan status hukum yang dimiliki kawasan konservasi			
Tanggal penetapan	Fasilitator harus memastikan tersedianya deskripsi mengenai sejarah pengukuhan/penetapan kawasan pada lembar yang terpisah.			
Detail Kepemilikan (Silakan di contreng)	Negara	Swasta	Masyarakat	Lainnya
Otoritas Manajemen	Maksudnya adalah UPT Pengelola Kawasan			
Luas Kawasan Konservasi (Ha)	Fasilitator harus memastikan tersedianya informasi mengenai perubahan luas kawasan secara kronologis dan pemicu perubahannya pada lembar terpisah. Pada kawasan konservasi tertentu memiliki dasar penunjukan yang berbeda-beda, termasuk perubahan luas karena perubahan RTRW setempat			
Jumlah Staf	Permanen Fasilitator harus memastikan tersedianya jumlah staf permanen menurut jabatan struktural dan fungsional. Sebaiknya data perkembangan staf permanen dicatat dalam lembar terpisah. Jika memungkinkan dalam bentuk tabel series selama 5 tahun terakhir.		Temporer Fasilitator harus memastikan tersedianya jumlah staf temporer menurut fungsinya. Sebaiknya data perkembangan staf temporer dicatat dalam lembar terpisah. Jika memungkinkan dalam bentuk tabel series selama 5 tahun terakhir	
Anggaran Tahunan (Rupiah) – tanpa anggaran gaji staf	Dana (operasional) rutin Fasilitator harus memastikan tersedianya informasi anggaran kegiatan sesuai peruntukannya dalam lembar terpisah. Sebaiknya tersedia data mengenai perkembangan anggaran selama 5 tahun terakhir. Sangat penting untuk memisahkan anggaran untuk gaji pegawai dan anggaran operasional.		Dana proyek / tambahan lain Fasilitator harus memastikan tersedianya informasi anggaran dana proyek/tambahan ini sesuai peruntukannya dalam lembar terpisah. Sebaiknya tersedia data mengenai perkembangan dana proyek/tambahan lain selama 5 tahun terakhir.	

PEDOMAN FASILITATOR

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Apakah nilai utama penetapan Kawasan Konservasi	Fasilitator memandu diskusi untuk menetapkan nilai utama kawasan konservasi yang disintesakan dari SK penunjukan/penetapannya. SK yang dijadikan acuan harus tersedia dalam bentuk hard dan soft copy. Jika dalam SK penunjukan/penetapan tidak secara jelas menyebutkan nilai utama, maka dapat dilihat kembali sejarah kawasan konservasi tersebut. Fasilitator juga dapat memandu diskusi menentukan nilai utama dari situasi saat ini (existing condition)			
Tuliskan dua tujuan primer pengelolaan Kawasan Konservasi				
Tujuan Pengelolaan 1	Fasilitator memandu diskusi untuk menetapkan tujuan primer pengelolaan kawasan konservasi yang disintesakan dari SK penunjukan/penetapannya dan dikuatkan dengan pernyataan dalam dokumen RP Kawasan Konservasi. Jika nilai penting yang dijadikan mandat sudah tidak ada atau tidak sesuai dengan kondisi faktual maka nilai penting mengacu pada dokumen Rencana Pengelolaan dan diberikan catatan. Dokumen yang dijadikan acuan harus tersedia dalam bentuk hard dan soft copy. Patut dicatat bahwa pencapaian tujuan pengelolaan akan dijabarkan dalam seluruh program/kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi.			
Tujuan Pengelolaan 2				
Jumlah orang yang terlibat dalam menyelesaikan penilaian				
Termasuk (conteng kotak)	Pengelola Kawasan Konservasi	Staf Kawasan Konservasi	Staf /Lembaga Kawasan Konservasi lain	LSM
	Masyarakat Lokal	Donors	Ahli dari luar	Lainnya
Harap dicatat jika penilaian dilakukan dengan asosiasi dengan projek tertentu, atas nama suatu organisasi atau donor				

Informasi tentang Penetapan Internasional			
Situs Warisan Dunia UNESCO (lihat: whc.unesco.org/en/list)			
Tanggal terdaftar	Nama situs	Site area	Geographical co-ordinates
Kriteria penetapan (misal: criteria i sampai x)			
Pernyataan Nilai Penting Universal	Fasilitator memandu diskusi untuk menetapkan pernyataan tentang Nilai Penting Universal yang disintesakan dari Surat Keputusan Situs Warisan Dunia yang dikonfirmasi kesesuaiannya dengan SK Penunjukan/Penetapan kawasan.		
Ramsar site (see: www.wetlands.org/RSDB/)			
Tanggal Terdaftar	Nama situs	Luas situs	Koordinat geografis
Alasan Penetapan (lihat Lembar Informasi Ramsar)	Fasilitator memandu diskusi untuk menetapkan alasan penetapan Situs Ramsar yang disintesakan dari Surat Keputusan Situs Ramsar yang dikonfirmasi kesesuaiannya dengan SK Penunjukan/Penetapan kawasan.		
UNESCO Man and Biosphere Reserves (see: www.unesco.org/mab/wnbrs.shtml)			
Tanggal Terdaftar	Nama situs	Luas situs Total: Inti: Buffer: Transisi	Koordinat geografis
Kriteria penetapan (misal: criteria i sampai x)	Fasilitator memandu diskusi untuk mereview dan mendiskusikan kriteria penetapan MAB dengan mengacu pada Form Nominasi atau SK Penetapan MAB (Cagar Biosfer).		
Pemenuhan tiga fungsi MAB(dukungan konservasi, pembangunan dan logistik)	Fasilitator memandu diskusi untuk mereview dan mendiskusikan pemenuhan tiga fungsi MAB, yaitu: Fungsi Konservasi, Fungsi Pembangunan dan Fungsi Logistik, sebagaimana dituangkan dalam Form Nominasi, SK Penetapan MAB dan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang MAB. Dalam hal ini diskusi difokuskan pada kontribusi kawasan konservasi dalam konteks landscape MAB.		
Tuliskan penunjukkan lain (misal: ASEAN Heritage, Natura 2000) dan informasi pendukung lainnya dibawah			
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		
Nama:	Detil:		

Lampiran 2. Lembar Data II Ancaman Kawasan Konservasi

Lembar Ancaman berfungsi mengidentifikasi kerawanan kawasan. Meskipun pengisian lembar ini tidak memperoleh poin dalam penilaian METT, namun esensial untuk memberikan gambaran langkah selanjutnya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan. Jika lembar ancaman dapat diisi dengan baik berarti pengelola memahami kawasannya dengan baik.

Fasilitator memandu diskusi untuk:

- 1) Mengumpulkan fakta tentang ancaman terhadap Kawasan Konservasi, termasuk data pendukungnya baik data kuantitatif maupun kualitatif. Data tentang fakta ancaman terhadap kawasan konservasi sejauh mungkin harus menggambarkan karakteristik ancaman tersebut, terutama: jenis ancaman (sesuai penilaian METT), lokasi (dilampiri dengan peta), skala luas, frekuensi ancaman, intensitas ancaman, lamanya dampak yang ditimbulkan, serta derajat keterpulihan (reversibility) dampak yang ditimbulkan.
- 2) Menetapkan derajat ancaman (Tinggi/Sedang/Rendah/NA) berdasarkan penilaian atas fakta tentang ancaman yang didiskusikan pada Butir 1 serta panduan ini. Dalam dokumen ini hanya diuraikan panduan untuk penilaian ancaman yang umum ditemukan di Indonesia. Secara umum penetapan derajat ancaman adalah sebagai berikut:
Tinggi : ancaman-ancaman yang merusak secara serius dan berpotensi tinggi merusak terhadap nilai-nilai penting;
Sedang : ancaman-ancaman yang merusak secara serius dan berpotensi sedang merusak terhadap nilai-nilai penting
Rendah : ancaman-ancaman ada tetapi tidak memiliki dampak serius;
N/A : ancaman-ancaman tidak ada atau tidak berlaku di kawasan konservasi tersebut.
- 3) Mendiskusikan secara jelas mengenai keterkaitan antara karakteristik ancaman dengan isu yang dinilai dalam METT.
- 4) Meminta peserta untuk mendokumentasikan seluruh hasil diskusi dalam lembar yang terpisah sebagai basis untuk melakukan evaluasi hasil penilaian dan memverifikasi justifikasi bukti/data yang relevan

mengenai adanya ancaman: Kronologis, lokasi, ukuran, rentang waktu, pelaku. Sumber: laporan, data patrol, hasil riset, bukti foto/video dll.

Untuk mempermudah pengisian skala ancaman, fasilitator dan peserta penilaian METT dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika tidak ada ancaman atau data tidak diketahui maka ancaman tergolong N/A
- 2) Jika ancaman terjadi:

- a. Melihat lokus/sebaran kejadian

Jika ancaman terjadi di wilayah inti (*core area*) baik di zona inti/blok perlindungan maupun zona/blok lainnya yang berdampak pada nilai penting yang dilindungi kawasan, maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila ancaman terjadi di luar wilayah inti namun masih terus berekspansi, skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila perkembangannya dapat ditekan atau dikeluarkan dari kawasan.

- b. Melihat intensitas ancaman

Jika ancaman berlangsung massif dan intensif penetrasinya ke dalam kawasan, maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila penetrasi ancaman masih dapat dikendalikan maka skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila penetrasinya dapat dihentikan dan dikeluarkan dari kawasan.

- c. Melihat keterpulihan

Jika ancaman yang terjadi sulit dipulihkan atau perlu jangka waktu lama untuk kembali pulih (>5 tahun) maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila ancaman dapat dipulihkan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun, skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila dapat segera ditanggulangi dan ekosistem dapat segera dipulihkan.

- d. Melihat spesies terdampak

Jika ancaman terbukti berdampak pada spesies kunci dalam kawasan, maka skala ancaman tergolong tinggi. Sedangkan bila ancaman berpotensi mengganggu spesies kunci dan spesies lainnya, skala ancaman tergolong sedang. Ancaman dikatakan rendah bila tidak berdampak pada spesies kunci maupun spesies lainnya dalam kawasan.

Ketersediaan alat bantu berupa peta *time series* akan membantu peserta menentukan skala ancaman. Untuk dapat mengatakan skala ancaman harus ada baseline dari tahun berapa ancaman dimulai. Lihat juga perubahan ancaman sebelum kawasan konservasi ditetapkan dan setelah penetapan. Apakah penunjukkan kawasan dapat menekan ancaman atau justru memperparah? Proxy jika data tidak ada : lihat penetrasi ancaman terhadap sistem zonasi atau blok.

1. Pembangunan pemukiman dan komersial didalam kawasan konservasi

Ancaman dari pemukiman manusia atau penggunaan lahan bukan pertanian dengan dampak (*footprint*) yang substansial
Substansial: signifikan pada wilayah inti bagi eksistensi kawasan atau signifikan bagi nilai penting kawasan

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
1.1 Perumahan dan pemukiman Mengacu pada segala bentuk pemukiman di dalam kawasan baik yang legal maupun ilegal	Apabila terjadi di wilayah inti, penetrasi pemukiman ke dalam kawasan terus berkembang atau berdampak substansial	Apabila pemukiman masih berkembang namun dapat di lokalisir dengan kesepakatan-kesepakatan formal antara pengelola dan pelaku agar tidak semakin masuk ke dalam kawasan dan mengganggu nilai penting	Apabila terdapat pemukiman namun sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat pemukiman dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
1.2 Kawasan komersil dan industri Kawasan komersil (pasar, dermaga kapal, lokasi tujuan wisata umum, dll) dan Industri (pabrik, tempat pengolahan produksi perkebunan dan tambang, dll) – areal perkebunan dan lokasi eksploitasi tambang dibahas di point lain	Apabila terjadi di wilayah inti, penetrasi kawasan industri ke dalam kawasan terus berkembang atau berdampak substansial	Apabila kawasan industri/ komersil masih berkembang namun dapat di lokalisir dengan kesepakatan-kesepakatan formal antara pengelola dan pelaku agar tidak semakin masuk ke dalam kawasan dan mengganggu nilai penting	Apabila terdapat kawasan komersil dan industri yang sudah tidak berkembang atau tidak berdampak signifikan pada nilai penting kawasan	Apabila tidak terdapat kawasan komersil dan industri dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi ancaman termasuk potensi pemulihannya.
1.3 Infrastruktur wisata dan rekreasi Infrastruktur yang mendukung kegiatan wisata dan rekreasi (misalnya: resort/hotel/ guesthouse/ rumah pohon), jalan dan jalur wisata permanen dan semi permanen, MCK, warung, alat penerangan –kabel listrik, genset- dll). Hal ini menyangkut aktivitas pembangunan dan operasinya Efek dari aktivitas manusia didalamnya dinilai pada ancaman no.6	Apabila pembangunan dan operasionalisasi infrastruktur wisata dan rekreasi berada di wilayah inti, berpe- ngaruh/ membatasi persebaran tumbuhan dan satwa sehingga cenderung mengisolasi (jadi barrier)	Apabila infrastruktur wisata dan rekreasi tidak/belum memberikan dampak terhadap nilai penting kawasan namun jika tidak terkontrol berpotensi merusak lingkungan	Apabila infrastruktur wisata dan rekreasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai penting kawasan	Apabila tidak ada pembangun atau infrastruktur existing maupun potensi wisata	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

2. Budidaya pertanian dan perikanan didalam kawasan konservasi

Ancaman dari pertanian dan penggembalaan akibat perluasan dan intensifikasi pertanian, termasuk silvikultur, marikultur, dan akuakultur

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
2.1 Budidaya non kayu tahunan atau sepanjang tahun (Sawit, karet, kopi, coklat, ladang, sawah, termasuk tanaman obat)	Apabila aktivitas ini terjadi di wilayah inti dan laju pertambahan lahan budidaya sulit dibendung, tanaman berkompetisi negatif dengan tumbuhan asli.	Apabila aktivitas ini tidak mengganggu wilayah inti, namun masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan.	Apabila aktivitas tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat kegiatan budidaya non kayu dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
2.1a Perladangan obat terlarang (drugs) Perladangan obat-obatan terlarang (ganja, opium, Khat, dll)	Apabila aktivitas ini terjadi di kawasan inti secara masif dan laju pertambahan ladang masih terjadi serta sulit dibendung, tanaman berkompetisi negatif dengan tumbuhan asli.	Apabila aktivitas ini tidak mengganggu wilayah inti, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan.	Apabila aktivitas tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat perladangan obat terlarang dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
2.2 Perkebunan kayu dan pulp Perkebunan kayu dan pulp milik masyarakat atau perusahaan	Apabila aktivitas ini terjadi di kawasan inti secara masif dan laju pertambahan kebun/ lahan sulit dibendung, tanaman berkompetisi negatif dengan tumbuhan asli.	Apabila aktivitas ini tidak berada di wilayah inti, masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan.	Apabila terdapat aktivitas dalam kawasan namun tidak memberikan dampak terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang atau dapat keluar dari kawasan	Apabila tidak terdapat aktivitas perkebunan kayu dan pulp dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
2.3 Peternakan dan pengembalaan kegiatan beternak dan menggembala di dalam kawasan. Termasuk pengelolaan/ penggunaan sumber daya dari dalam	Apabila aktivitas terjadi di wilayah inti, berkompetisi dengan satwa dalam kawasan, terlebih bila ternak terdeteksi memiliki penyakit yang dapat menular pada satwa liar dalam kawasan.	Apabila aktivitas ini dapat terkontrol dan wilayah yang dapat digunakan untuk pengembalaan disepakati bersama	Apabila intensitas pengembalaan rendah, tidak memberikan dampak terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat kegiatan pengembalaan dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
2.4 Akuakultur laut dan air tawar	Apabila aktivitas dilakukan di wilayah inti, berkompetisi dengan satwa dalam kawasan, terlebih bila terdeteksi memiliki penyakit yang dapat menular pada satwa air dalam kawasan.	Apabila aktivitas ini dapat terkontrol dan wilayah yang dapat digunakan untuk akuakultur disepakati bersama	Apabila intensitas akuakultur rendah, tidak memberikan dampak terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat kegiatan akuakultur dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya.

3. Produksi energi dan pertambangan di dalam kawasan konservasi

Ancaman dari produksi sumber-sumber non-biologis. Fasilitator perlu menjelaskan bahwa ekosistem terbentuk dari materi biologis dan non biologis, dan apa saja materi biologis dan non biologis tersebut. Ancaman dalam poin ini berasal dari dalam kawasan, kegiatan dari luar kawasan yang dampaknya dirasa berpengaruh ke dalam kawasan di sangkutkan ke pertanyaan 7.

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
3.1 Pengeboran minyak dan gas Kegiatan eksplorasi pengeboran minyak gas	Apabila kegiatan terjadi di wilayah inti dan operasionalisasi-nya terbukti berdampak negatif terhadap nilai-nilai penting kawasan, dan kerusakan sulit dipulihkan	Apabila kegiatan berlokasi diluar wilayah inti yang skala operasionalnya besar. Namun, kegiatan operasional dianggap berpotensi negatif terhadap nilai kawasan dalam jangka pendek (<5 tahun)	Apabila lokasi kegiatan tidak di wilayah inti, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tidak memberikan dampak pada nilai penting kawasan.	Apabila tidak ada kegiatan eksplorasi di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

3.2 Pertambahan dan penggalan kegiatan eksplorasi pertambangan dan penggalan di dalam kawasan	Apabila kegiatan terjadi di wilayah inti. Dianggap/ terbukti berdampak negatif terhadap nilai-nilai penting kawasan dan sulit atau tidak mungkin dipulihkan	Apabila kegiatan berlokasi bukan di wilayah inti. Namun, dianggap berpotensi negatif terhadap nilai kawasan dalam jangka pendek (<5 tahun)	Apabila lokasi kegiatan bukan di wilayah inti, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tidak memberikan dampak pada nilai penting kawasan.	Apabila tidak ada kegiatan pertambangan dan penggalan di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
3.3 Pembangkit energi, termasuk bendungan untuk PLTA dan Panasbumi	Apabila kegiatan terjadi di wilayah inti. Dianggap/ terbukti berdampak negatif terhadap nilai-nilai penting kawasan	Apabila kegiatan berlokasi bukan di wilayah inti. Namun, dianggap berpotensi negatif terhadap nilai kawasan dalam jangka pendek (<5 tahun)	Apabila kegiatan berlokasi bukan di wilayah inti, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tidak memberikan dampak pada nilai penting kawasan.	Apabila tidak ada kegiatan pembangkit energi di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

4. Koridor transportasi dan jasa dalam kawasan konservasi

Ancaman dari adanya jalur koridor transportasi yang panjang dan lebar dan kendaraan yang berjalan yang memanfaatkan jalur tersebut termasuk keterkaitan kematian satwa liar, termasuk didalamnya jalur listrik, telpon, pipa air dan gas

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
4.1 Jalan dan rel kereta (termasuk satwa yang mati di jalanan) Keberadaan jalan umum yang melintasi/ memotong kawasan, jalur lintas jalan dengan jalur perlintasan satwa, frekuensi penggunaan jalur dan efek suara dan polusinya bagi kawasan.	Apabila jalan dibangun dengan merubah lansekap (gali-timbun), frekuensi lalu lintas tinggi dan cenderung memfasilitasi banyak kegiatan ilegal, serta banyak gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan akibat keberadaan jalan/rel	Apabila jalan yang dibangun dengan merubah lansekap (gali-timbun) dengan penggunaan lalu lintas yang rendah namun masih mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan	Apabila jalan dibangun dengan prinsip "road ecology" atau green infrastructure dengan frekuensi lalu lintas yang rendah dan tidak mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan	Apabila tidak ada jalur jalan umum dan rel kereta di dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

4.2 Jalur layanan dan jasa (cth. kabel listrik dan telepon pipa air, gas, minyak bumi.) Keberadaan jalur layanan dan jasa melintasi/ memotong kawasan.	Apabila jalur listrik atau telepon pada wilayah ini tidak mengganggu habitat dan mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan.	Apabila jalur listrik atau telepon yang dibangun tidak pada wilayah ini meskipun mengakibatkan terfragmentasinya habitat, mengganggu ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan.	Apabila jalur layanan dan jasa yang dibangun tidak mempengaruhi nilai penting kawasan dan tidak mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci	Apabila tidak ada jalur layanan dan jasa di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
4.3 Jalur dan kanal perkakapan Keberadaan jalur dan kanal perkakapan yang melintasi kawasan, frekuensi penggunaan jalur dan efek suara dan polusinya bagi kawasan.	Apabila jalur/kanal perkakapan melalui wilayah ini dan mengakibatkan gangguan ekologi bagi satwa kunci dan nilai penting kawasan.	Apabila jalur/kanal perkakapan tidak melalui wilayah ini meskipun mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan.	Apabila jalur/kanal perkakapan tidak melalui wilayah ini dan tidak mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan	Apabila tidak ada jalur dan kanal perkakapan di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
4.4 Jalur penerbangan Keberadaan jalur penerbangan yang melintasi kawasan dalam jarak dekat, frekuensi penggunaan jalur, efek suara dan polusinya bagi kawasan.	Apabila jalur penerbangan melalui wilayah ini, mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan.	Apabila jalur penerbangan tidak melalui wilayah ini meskipun mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan.	Apabila jalur penerbangan tidak melalui wilayah ini, tidak mengakibatkan gangguan ekologi satwa kunci dan nilai penting kawasan	Apabila tidak ada jalur penerbangan melintasi kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

5. Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis didalam kawasan konservasi

Ancaman dari penggunaan konsumtif sumberdaya biologis “liar/alami” termasuk efek pemanenan yang disengaja maupun tidak disengaja; termasuk perburuan atau pengendalian spesies tertentu (catatan: ini termasuk perburuan dan pembunuhan satwa)

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
5.1 Perburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat (termasuk akibat konflik manusia dan satwa liar)	Apabila ancaman terjadi hingga wilayah ini dengan intensitas yang tinggi; hilangnya jenis/ spesies tertentu dan mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci	Apabila ancaman tidak mencapai wilayah ini namun intensitasnya menimbulkan dampak substansial bagi kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila ancaman terjadi namun intensitasnya rendah, dapat dihindarkan dan tidak berdampak pada nilai penting kawasan.	Apabila tidak terjadi ancaman perburuan/ pembunuhan satwa liar di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

5.2 Pengumpulan tanaman darat atau produk tanaman (bukan kayu)	Apabila ancaman terjadi hingga wilayah ini dengan intensitas yang tinggi; hilangnya jenis/ spesies tertentu dan mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci	Apabila ancaman tidak mencapai wilayah ini namun intensitasnya menimbulkan dampak substansial bagi kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila ancaman terjadi namun intensitasnya rendah, dapat diidentifikasi, dan tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak terjadi pengumpulan tanaman darat dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
5.3 Pembalakan dan pemanenan kayu	Apabila ancaman terjadi hingga wilayah ini dengan intensitas yang tinggi; hilangnya jenis/ spesies tertentu dan mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci	Apabila ancaman tidak mencapai wilayah ini namun intensitasnya menimbulkan dampak substansial bagi kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila ancaman terjadi namun intensitasnya rendah, dapat diidentifikasi, dan tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak terjadi pembalakan dan pemanenan kayu di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
5.4 Pemancingan, pembunuhan dan pemanenan sumberdaya air	Apabila ancaman terjadi hingga wilayah ini dengan intensitas yang tinggi; hilangnya jenis/spesies tertentu dan mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci	Apabila ancaman tidak mencapai wilayah ini namun intensitasnya menimbulkan dampak substansial bagi kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila ancaman terjadi namun intensitasnya rendah, dapat diidentifikasi, dan tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak terjadi pemanenan sumberdaya air di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

6. Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi

Ancaman dari kegiatan manusia yang merubah, menghancurkan, atau mengganggu habitat dan spesies yang diasosiasikan dengan penggunaan non-konsumsi sumberdaya biologis

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
6.1 Kegiatan rekreasi dan wisata	Apabila aktivitas ini merubah atau mengganggu wilayah ini, nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci serta sulit dipulihkan	Apabila aktivitas terjadi di luar wilayah ini, masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila gangguan terjadi namun intensitasnya rendah, dapat diidentifikasi, tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak ada kegiatan rekreasi dan wisata di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
6.2 Perang, kerusakan sipil dan latihan militer	Apabila aktivitas ini merubah atau mengganggu wilayah inti, nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci serta sulit dipulihkan	Apabila aktivitas terjadi di luar wilayah inti, masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila gangguan terjadi namun intensitasnya rendah, dapat dikendalikan, tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak ada perang, kerusakan, dan latihan militer di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
6.3 Penelitian, pendidikan dan kegiatan terkait pekerjaan lain di Kawasan Konservasi	Apabila aktivitas ini merubah atau mengganggu wilayah inti, nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci serta sulit dipulihkan	Apabila aktivitas terjadi di luar wilayah inti, masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila gangguan terjadi namun intensitasnya rendah, dapat dikendalikan, tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak ada kegiatan penelitian, pendidikan dan kegiatan terkait pekerjaan lain di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
6.4 Kegiatan pengelola kawasan konservasi (cth. pembuatan bangunan atau penggunaan kendaraan dan bendungan)	Apabila aktivitas ini merubah atau mengganggu wilayah inti, nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci serta sulit dipulihkan	Apabila aktivitas terjadi di luar wilayah inti, masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila gangguan terjadi namun intensitasnya rendah, dapat dikendalikan, tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak ada kegiatan pengelola kawasan konservasi di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
6.5 Vandalisme, kegiatan merusak atau ancaman terhadap pegawai atau pengunjung kawasan konservasi	Apabila aktivitas ini merubah atau mengganggu wilayah inti, nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci	Apabila aktivitas terjadi di luar wilayah inti, masih dapat terkontrol, namun berpotensi mengganggu nilai penting kawasan dan ekologi spesies kunci.	Apabila gangguan terjadi namun intensitasnya rendah, dapat dikendalikan, tidak berdampak pada nilai penting kawasan	Apabila tidak ada vandalisme dan ancaman di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

7. Modifikasi sistem alam

Ancaman dari kegiatan lain yang mengkonversi atau merusak habitat atau merubah fungsi ekosistem

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
7.1 Api dan penahan api (termasuk pembakaran secara sengaja) Apakah kegiatan modifikasi ini memberikan dampak negatif terhadap kebelangsungan populasi suatu spesies (tumbuhan & hewan) berikut ekosistem.	Apabila kegiatan memberi dampak negatif dan sulit ditanggulangi atau cenderung permanen.	Apabila kegiatan memberi dampak negatif, namun masih bisa ditanggulangi dalam jangka waktu tertentu	Apabila kegiatan memberi dampak negatif namun dapat ditanggulangi dengan segera	Apabila tidak ada kegiatan modifikasi api dan penahan api di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya. Apakah pembuatan sekat bakar pada hutan atau pembakaran savana sebagai bentuk manajemen habitat berdampak negative terhadap kawasan?
7.2 Bendungan, waduk, embung, modifikasi hidrologis dan pengelolaan /pemanfaatan air Perubahan hidrologis dilakukan pada wilayah gambut dalam bentuk pembuatan kanal drainase	Apabila kegiatan yang dimaksudkan untuk penanganan/ perlindungan memberi dampak negatif, dan sulit ditanggulangi atau cenderung permanen.	Apabila kegiatan yang dimaksudkan untuk penanganan/ perlindungan memberi dampak negatif, namun masih bisa ditanggulangi dalam jangka waktu tertentu	Apabila kegiatan yang dimaksudkan untuk penanganan/ perlindungan memberi dampak negatif, dan namun dapat ditanggulangi dengan segera	Apabila tidak ada modifikasi hidrologis dan pemanfaatan air di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya. Apakah ada efek dari modifikasi hidrologis terhadap nilai utama kawasan, misal apakah drainase untuk wilayah gambut telah menurunkan tinggi air tanah?

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
7.3a Peningkatan fragmentasi di kawasan konservasi Perlu menampilkan peta perubahan tutupan lahan dan bila memungkinkan dapat dikaji ada atau tidaknya peningkatan fragmentasi.	Apabila fragmentasi meningkat hingga mempengaruhi kawasan inti/bernilai penting, luasan bertambah dengan signifikan dan sulit dihentikan/ dipulihkan	Apabila fragmentasi meningkat namun belum mempengaruhi kawasan inti/bernilai penting dan masih dapat dipulihkan	Apabila fragmentasi terjadi namun tidak meningkat dan dapat segera dipulihkan	Apabila tidak ada peningkatan fragmentasi di dalam kawasan.	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
7.3b Isolasi dari habitat alami lain (cth. deforestasi, bendungan tanpa jalur yang efektif untuk komoditas keperluan satwa air) Terdapat pembangunan bendungan untuk tujuan irigasi dan pembangkit listrik.	Apabila isolasi yang terjadi di kawasan mempengaruhi kawasan inti/bernilai penting, ekologi spesies kunci, dan sulit dihentikan/ dipulihkan	Apabila isolasi yang terjadi di kawasan memberikan tekanan terhadap kawasan inti/bernilai penting, mempengaruhi ekologi spesies kunci, namun masih dapat dihentikan/ dipulihkan	Apabila isolasi yang terjadi tidak mempengaruhi kawasan inti/bernilai penting, tidak mempengaruhi ekologi spesies kunci, dan dapat dihentikan/ dipulihkan	Apabila tidak ada isolasi dari habitat alami lain di dalam kawasan.	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya. Apakah ada akibat dari bendungan yang menimbulkan sekat bagi spesies air tertentu untuk berkembang biak?
7.3c "Efek tepi" lain yang berpengaruh terhadap nilai kawasan konservasi Perlu dibuat peta fragmentasi dan estimasi nilai efek tepi	Apabila efek tepi yang terjadi mempengaruhi kawasan inti/bernilai penting, dan sulit dihentikan/ dipulihkan	Apabila efek tepi yang terjadi memberikan tekanan kawasan inti/bernilai penting dan ekologi spesies kunci namun masih dapat dihentikan/ dipulihkan	Apabila efek tepi yang terjadi mempengaruhi kawasan inti/bernilai penting, dan sulit dihentikan/ dipulihkan	Apabila tidak ada efek tepi yang berpengaruh di dalam kawasan.	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
7.3d Kehilangan spesies kunci (cth. predator puncak, penyerbuk, dll) Spesies kunci (keystone species) adalah suatu spesies yang menentukan kelulushidupan sejumlah spesies lain. Dengan kata lain spesies kunci adalah spesies yang keberadaannya menyebabkan suatu keragaman hidup dan kepunahannya secara konsekuen menimbulkan kepunahan bentuk kehidupan lain (Power & Mills, 1995 dalam Prianto, 2007).	Apabila laju kehilangan spesies kunci bertambah dengan signifikan dan sulit dihentikan/dipulihkan	Apabila kondisi spesies-spesies kunci mengalami tekanan dan populasinya cenderung menurun	Apabila spesies kunci menghadapi ancaman dari beberapa faktor namun tidak berpengaruh banyak terhadap populasinya. (populasi cenderung statis)	Apabila tidak ada kehilangan spesies kunci di dalam kawasan.	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

8. Masalah spesies atau gen invasif dan bermasalah

Ancaman dari tanaman, satwa, pathogen/mikroba atau materi genetik darat dan air baik asli maupun dari luar yang memiliki efek yang membahayakan keanekaragaman hayati setelah pengenalan, penyebaran dan/atau peningkatan populasi

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
8.1 Tanaman invasif native/ asli atau non-native/asing (sebagai contoh : gulma/ rerumputan/ spesies tanaman lainnya yang dianggap invasif) Tumbuhan yang tidak secara alami merupakan sebaran di wilayah tersebut namun berkembang dan menjadi tidak terkontrol sehingga mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan alami.	Apabila tanaman asing menginvasi kawasan inti dan berkompetisi negatif dengan tumbuhan asli atau mempengaruhi ekologi spesies kunci.	Apabila tanaman asing belum menginvasi kawasan inti namun menimbulkan kompetisi negatif dengan tumbuhan asli atau mempengaruhi ekologi spesies kunci.	Apabila invasi tanaman asing tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat invasi spesies tanaman asing dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya. Contoh : kasus invasi Langkap (Arenca obtusifolia) di TN Ujung Kulon dan Acacia nilotica di TN Baluran

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
8.1a Satwa invasif native/asli dan non-native/asing Satwa yang tidak secara alami merupakan sebaran di wilayah tersebut namun berkembang dan menjadi tidak terkontrol sehingga mempengaruhi keanekaragaman satwa maupun tanaman alami.	Apabila satwa asing menginvasi kawasan inti dan menimbulkan kompetisi negatif dengan tumbuhan asli atau mempengaruhi ekologi spesies kunci.	Apabila satwa asing belum menginvasi kawasan inti namun menimbulkan kompetisi negatif dengan tumbuhan asli atau mempengaruhi ekologi spesies kunci.	Apabila satwa tanaman asing tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat invasi spesies satwa non-native dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
8.1b Patogen (non-native atau native tetapi menimbulkan masalah baru/meningkatkan Penyakit yang dapat berasal dari dalam atau dari luar kawasan yang berkembang dan menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati	Apabila patogen menginvasi kawasan inti dan menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati kawasan serta mempengaruhi ekologi spesies kunci hingga kondisi yang sulit dipulihkan.	Apabila invasi patogen belum mencapai kawasan inti namun menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati kawasan dan mempengaruhi ekologi spesies kunci.	Apabila satwa tanaman asing tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai penting kawasan, sudah tidak berkembang dan dapat dikeluarkan dari kawasan	Apabila tidak terdapat invasi patogen dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya. Contoh kasus: Apakah bakteri anthrax mulai terdeteksi pada kawasan yang merupakan habitat banteng
8.2 Introduksi materi genetik (cth. organisme dengan genetik yang di modifikasi) Pengenalan materi genetik yang berpotensi mencemari genetic species lain yang masih punya kekerabatan.	Apabila terjadi pencemaran genetik yang sangat masif dan sulit ditangani	Apabila terjadi pencemaran genetik namun masih bisa terkontrol	Apabila pencemaran genetik terlokalisasi dan terkendali, serta dapat dihentikan atau dikeluarkan dari kawasan.	Apabila tidak terdapat pengenalan materi genetik dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

9. Polusi yang masuk atau muncul didalam kawasan konservasi

Ancaman dari penggunaan material-material non alami didalam kawasan yang terjadi pada lingkup/terlokalisir /tersebar di berbagai bagian kawasan. Polusi dapat saja bersumber dari luar kawasan namun masuk ke dalam kawasan (terutama bila kawasan konservasi terdapat di kawasan hilir/perairan). Diperlukan data pemantauan tingkat polusi (air, tanah, udara) untuk justifikasi ancaman.

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
9.1 Saluran buangan rumah tangga / saluran air limbah kota	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air sehingga bersifat toksik dan mempengaruhi keanekaragaman hayati dan nilai penting kawasan	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air dan berpotensi bersifat toksik jika tidak segera ditangani	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan menurunkan kualitas air namun masih bisa digunakan.	Apabila tidak terdapat saluran buangan limbah rumah tangga/ kota dalam kawasan	Penjelasan, bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya.
9.1a Saluran pembuatan atau air limbah dari fasilitas kawasan konservasi (cth. toilet, dormitory, rumah singgah stasiun riset, dll)	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air sehingga bersifat toksik dan mempengaruhi keanekaragaman hayati dan nilai penting kawasan	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air dan berpotensi bersifat toksik jika tidak segera ditangani	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan menurunkan kualitas air namun masih bisa digunakan.	Apabila tidak terdapat saluran limbah dari fasilitas kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
9.2 Limbah dan buangan industri, pertambangan dan militer (cth. kualitas air yang buruk buangan dari bendungan, cth suhu yang tidak normal, de-oksigenasi, polusi lain)	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air sehingga bersifat toksik dan mempengaruhi keanekaragaman hayati dan nilai penting kawasan	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air dan berpotensi bersifat toksik jika tidak segera ditangani	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan menurunkan kualitas air namun masih bisa digunakan.	Apabila tidak terdapat limbah pertambangan dan militer dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
9.3 Pembuangan dari pertanian dan kehutanan (cth. pupuk dan pestisida yang berlebihan)	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air sehingga bersifat toksik dan mempengaruhi keanekaragaman hayati dan nilai penting kawasan	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan merusak kualitas air dan berpotensi bersifat toksik jika tidak segera ditangani	Akumulasi limbah yang masuk ke dalam kawasan menurunkan kualitas air namun masih bisa digunakan.	Apabila tidak terdapat pembuangan dari pertanian dan kehutanan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
9.4 Sampah dan limbah padat	Akumulasi limbah padat yang masuk ke dalam kawasan merusak wilayah inti, mengganggu keanekaragaman hayati dan nilai penting kawasan	Akumulasi limbah padat yang masuk tidak sampai wilayah inti namun berpotensi merusak nilai penting kawasan jika tidak segera ditangani	Akumulasi limbah padat yang masuk ke dalam kawasan menurunkan kualitas lingkungan kawasan namun tidak mempengaruhi nilai penting atau masih bisa ditanggulangi segera.	Apabila tidak terdapat sampah dan limbah padat dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
9.5 Polusi yang terbawa udara (contoh : polusi udara, kabut asap, hujan debu dan pasir letusan gunung berapi, hujan asam)	Polusi ada diatas ambang batas dan berdampak negatif pada nilai-nilai penting dan keanekaragaman hayati	Polusi menimbulkan gangguan terhadap nilai-nilai penting namun masih dapat ditangani	Adanya polusi udara namun ada dibawah ambang batas dan tidak .	Apabila tidak terdapat polusi udara dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
9.6 Energi yang berlebih (cth. polusi panas, lampu, etc)	Energi yang berlebih ada diatas ambang batas dan berdampak negatif pada nilai-nilai penting dan keanekaragaman hayati	Energi yang berlebih menimbulkan gangguan terhadap nilai-nilai penting namun masih dapat ditangani	Energi yang berlebih terdeteksi dalam kawasan namun ada dibawah ambang batas dan mengganggu nilai penting	Apabila tidak terdapat energi yang berlebih dalam kawasan	Facilitator memandu pengumpulan data / fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya. Dikatakan berlebih jika energi yang dihasilkan berada diatas ambang batas atau kebutuhan atau daya tampung.

10. Peristiwa geologis

Peristiwa geologis mungkin merupakan bagian dari gangguan alami di banyak ekosistem, tetapi peristiwa ini dapat menjadi ancaman jika suatu spesies atau habitat menjadi rentan terhadap gangguan.

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
10.1 Gunung berapi	Apabila terdapat gunung berapi aktif di dalam kawasan yang letusannya berdampak tinggi bagi ekologi kawasan dan spesies kunci	Apabila terdapat gunung berapi tidur di dalam kawasan atau dalam radius yang masih bisa menimbulkan dampak ekologis	Apabila terdapat gunung berapi di dalam atau sekitar kawasan namun tidak aktif atau berdampak substansial terhadap kawasan	Apabila tidak terdapat gunung berapi dalam radius yang dapat berdampak pada kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
10.2 Gempa bumi/Tsunami	Apabila kawasan dilalui jalur gempa atau berada di zona rawan tsunami dan bencana tersebut dapat berdampak substansial bagi ekologi kawasan dan spesies kunci seta sulit dipulihkan	Apabila kawasan dilalui jalur gempa atau berada di zona rawan tsunami namun tersebut dapat berdampak substansial bagi ekologi kawasan dan spesies kunci namun dapat dipulihkan dalam jangka waktu tertentu	Apabila kawasan dekat jalur gempa atau zona rawan tsunami namun dampak bencana bagi ekologi kawasan dan spesies kunci dapat dipulihkan dengan segera	Apabila tidak terdapat kejadian gempa/tsunami yang berdampak pada kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
10.3 Salju/Tanah longsor	Apabila banyak titik rawan longsor dan kejadian tersebut berdampak substansial bagi ekologi kawasan dan spesies kunci	Apabila terdapat kawasan rawan longsor dengan kejadian longsor yang masih bisa menimbulkan dampak ekologis namun tidak berada di wilayah inti	Apabila terdapat kawasan rawan longsor namun kejadian longsor tidak berpotensi menimbulkan dampak ekologis	Apabila tidak terdapat kejadian longsor dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
10.4 Erosi dan pengendapan garam/tanah (cth. perubahan di pantai atau dasar sungai)	Apabila terdapat erosi dan pengendapan yang masif dan berdampak substansial bagi ekologi kawasan dan spesies kunci	Apabila terdapat gunung berapi tidur di dalam kawasan atau dalam radius yang masih bisa menimbulkan dampak ekologis	Apabila terdapat gunung berapi di dalam atau sekitar kawasan namun tidak aktif atau berdampak substansial terhadap kawasan	Apabila tidak terdapat erosi dan pengendapan di pantai atau dasar sungai dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

11. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim

Ancaman dari perubahan iklim jangka panjang mungkin terkait dengan peristiwa iklim/cuaca buruk lain diluar variasi rentang alam Evidence: diperlukan data presipitasi, insiden-insiden kekeringan dan banjir pada setiap bulan. Mungkin di setiap kawasan perlu membuat analisis seberapa efektif kawasan menjadi regulator hidrologis

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
11.1 Perubahan dan kerusakan habitat yang terjadi akibat dampak dari perubahan cuaca.	Terjadi perubahan dan kerusakan habitat yang berdampak signifikan terhadap ekosistem dan spesies didalamnya. Dalam suatu kondisi dapat pula menyebabkan hilangnya nilai-nilai penting kawasan dan keanekaragaman hayati yang tidak dapat/sulit dipulihkan	Terjadi perubahan dan kerusakan habitat yang berdampak signifikan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati didalamnya. Namun secara alami atau dengan adanya intervensi dapat dipulihkan dalam kurun waktu tertentu	Perubahan dan kerusakan habitat terjadi namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai penting kawasan dan keanekaragaman hayati	Apabila tidak terdapat perubahan/ kerusakan habitat akibat iklim dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
11.2 Kekeringan Adanya kondisi kekurangan ketersediaan air yang berpotensi memberikan dampak bagi ekosistem atau spesies-spesies tertentu yang sangat tergantung akan ketersediaan air.	Terjadi kekeringan menahun/jangka panjang yang berdampak besar seperti berubahnya tipe habitat atau hilangnya spesies yang sangat bergantung pada ketersediaan air	Terjadinya kekeringan menahun/jangka panjang yang mempengaruhi ekosistem dan/ atau keberadaan spesies secara temporary	Kekeringan yang terjadi tidak mempengaruhi ekosistem dan/atau spesies-spesies tertentu	Apabila tidak terjadi kekeringan dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
11.3 Perubahan suhu (ekstrim) Peningkatan atau penurunan suhu yang jauh dari kondisi normal dalam kurun waktu tertentu.	Suhu Ekstrim berdampak buruk terhadap ekosistem dan sebagian besar spesies tidak dapat beradaptasi/ bertahan dalam kondisi ini	Suhu Ekstrim berdampak buruk terhadap ekosistem namun sebagian besar spesies penting masih bisa bertahan	Bencana terjadi namun dampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap ekosistem dan spesies yang ada.	Apabila tidak terdapat suhu ekstrim dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
11.4 Badai dan banjir	Badai dan banjir berdampak buruk terhadap ekosistem dan spesies di dalamnya serta membutuhkan waktu yang lama (dan atau permanen) untuk pemulihannya	Bencana memberikan dampak negatif terhadap ekosistem dan spesies didalamnya, namun dapat pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama.	Bencana terjadi namun dampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap ekosistem dan spesies yang ada.	Apabila tidak terjadi banjir dan badai dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

12. Ancaman budaya dan sosial spesifik

Pengertian: adakah suatu kondisi yang mengancam kelestarian budaya dan sosial masyarakat di dalam atau sekitar kawasan konservasi

Evidence: kondisi situs-situs budaya; keterlibatan masyarakat lokal yang sejalan dengan program pengelolaan

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
12.1 Hilangnya kaitan budaya, pengetahuan lokal dan/atau praktik pengelolaan Pengertian: Untuk Kawasan-kawasan yang memiliki nilai budaya social, apakah ada kondisi yang menunjukkan hilangnya kaitan budaya masyarakat di dalam maupun diluar kawasan terhadap pelestarian kawasan dan/atau dukungan terhadap pengelolaan kawasan.	Apabila masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan tidak lagi menjalankan pelestarian kawasan sebagai salah satu nilai budaya	Apabila sebagian masyarakat mulai meninggalkan nilai budaya, namun masih ada sebagian kecil yang mengupayakan pelestarian nilai budaya yang berkorelasi dengan pelestarian kawasan	Apabila nilai budaya mulai ditinggalkan sebagian kecil masyarakat. Namun tidak berpotensi merusak budaya dan kelestarian kawasan secara signifikan	Apabila Tidak ada kaitan antara budaya lokal didalam atau diluar kawasan (sejak awal)	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya Data: Kronologis, lokasi, ukuran, rentang waktu, pelaku. Sumber: laporan, data patrol, hasil riset dll.

	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	Keterangan
12.2 Penurunan alami nilai-nilai penting situs budaya Nilai-nilai penting situs budaya mengalami degradasi nilai. Misalnya akibat menurunnya kepercayaan masyarakat akan budaya.	Apabila terjadi degradasi nilai situs budaya yang berimbas kepada tidak digunakannya/ dianggap lagi keberadaanya	Apabila nilai penting situs budaya mengalami penurunan namun dapat ditingkatkan kembali dengan intervensi pengelolaan	Apabila nilai penting situs budaya mengalami penurunan tetapi kepercayaan masyarakat masih kuat	Apabila tidak terjadi penurunan alami nilai penting situs budaya	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya
12.3 Kehancuran bangunan warisan budaya, taman, situs, dll	Situs tidak bisa dipugar kembali	Sebagian besar situs sudah rusak	Sebagian kecil situs mengalami kerusakan	Apabila tidak ada situs dalam kawasan	Fasilitator memandu pengumpulan data dan fakta serta alat bukti dan justifikasi kondisi ancaman, termasuk potensi pemulihannya

Lampiran 3. Lembar Data III Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

1. Status Hukum Kawasan Konservasi				
Indikator	Apakah kawasan konservasi ini memiliki status hukum?			
Pengertian	Indikator ini menilai status hukum kawasan konservasi tidak hanya dari segi hukum formal (dikeluarkannya SK) tetapi juga secara faktual dikaitkan dengan nilai penting yang dilindungi, ancaman, kerawanan, iklim kebijakan, konteks nasional, dan mitra.			
Nilai 0	Kawasan Konservasi ini tidak pernah ditetapkan secara hukum	Seluruh Kawasan Konservasi di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/ Menhutbun/ Menteri/ Gubernur Jendral Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.	Peran Fasilitator: Menjelaskan bahwa proses pembuktian kondisi faktual adalah bagian penting dalam pertimbangan pemberian skor dan memberi pemahaman meskipun status hukum kawasan konservasi terjamin, namun belum tentu diakui semua pihak atau kawasan tersebut bebas dari konflik tenurial setelah ditetapkan Meminta peserta menyepakati kondisi terkait isu status kawasan yang sudah diverifikasi ulang dengan sumber pembuktian, kemudian mentransferkan kesimpulan ke kriteria nilai yang cocok	
Nilai 1	Ada kesepakatan bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara umum tetapi prosesnya belum dimulai			
Nilai 2	Kawasan konservasi tersebut dalam proses penetapan status hukum tetapi prosesnya belum selesai			
Nilai 3	Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal			
Sumber pembuktian	Dokumen-dokumen pengukuhan kawasan: SK Penunjukan kawasan, BATB (dokumen penataan batas kawasan), Peta Tata Batas, SK Penetapan kawasan.		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan	
Penilaian Partisipatif	Bersama-sama melihat variabel pembuktian dan menyimpulkan kesepakatan.		Mengeksplorasi lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif Memastikan pembuktian dapat diverifikasi dan disepakati semua pihak	
Indikator Terkait	Peraturan kawasan (2), penegakan hukum (3), pengukuhan (6), dan sistem perlindungan (10)			
Tindak lanjut	Mendiskusikan tindak lanjut dari indikator status kawasan dengan persoalan riil yang dihadapi, mencatat informasi khusus yang muncul dalam diskusi.			

2. Peraturan kawasan konservasi				
Indikator	Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan kawasan dan kegiatan?			
Pengertian	Pertanyaan mengarah kepada keberadaan dan kesesuaian peraturan yang ada, bukan pada tataran implementasinya. Indikator peraturan kawasan dapat merujuk pada hukum (legal) yakni seluruh peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi, maupun kontrol adat; bagi kawasan yang dikelola secara kolaboratif harus memiliki aturan yang jelas mengenai batas-batas penggunaan lahan dan air yang kemudian diakomodasi dalam zona/blok pengelolaan dan disahkan oleh Dirjen KSDAE.			
Nilai 0	Tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di Kawasan Konservasi.	Peran Fasilitator: Mengarahkan diskusi mengenai keberadaan peraturan pengendalian penggunaan lahan/kegiatan serta kesesuaiannya dengan kontrol adat, bukan pada tataran implementasinya. Meminta peserta menyepakati kondisi terkait isu status kawasan yang sudah diverifikasi ulang dengan sumber pembuktian, kemudian mentransferkan kesimpulan ke kriteria nilai yang cocok	
Nilai 1	Ada beberapa peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar			
Nilai 2	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada beberapa kelemahan atau gap	Apabila penataan Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan		
Nilai 3	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	Apabila Penataan kawasan (zonasi/blok) telah disahkan.		
Sumber Pembuktian	SK dan peta Penetapan Zonasi/Blok, Rencana Pengelolaan (RP), Dokumen Desain Tapak (untuk zona pemanfaatan)		Memastikan sumber pembuktian terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan	
Penilaian Partisipatif	Tim penilai dan peserta bersama-sama mengeksplorasi lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan variabel pembuktian dan menyimpulkan kesepakatan.		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan pembuktian diverifikasi dan disepakati semua pihak	
Indikator Terkait	Status hukum (1), penegakan hukum (3), tujuan kawasan (4), desain kawasan (5), rencana pengelolaan (7)			
Tindak Lanjut	Mendiskusikan tindak lanjut dari indikator peraturan kawasan apakah sudah mengakomodasi permasalahan terkait pengendalian lahan dengan persoalan riil yang dihadapi			

3. Penegakan Peraturan			
Indikator	Dapatkan pegawai (cth. mereka yang bertanggung jawab mengelola situs) menegakkan peraturan kawasan konservasi dengan cukup baik?		
Pengertian	Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui kapasitas dan sumberdaya yang tersedia dalam hal penegakan peraturan/kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Apabila staf cukup terlatih dan dipertangkapi peralatan yang memadai namun masih belum percaya diri untuk melakukan penegakan hukum, perlu dijelaskan dalam jawaban. Indikator penegakan peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya berupa penegakan hukum melainkan juga peraturan kelola lainnya mencakup aspek-aspek yang meliputi 3 strategi utama yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, termasuk kebijakan mengenai keberadaan masyarakat di dalam kawasan konservasi. Sedangkan permasalahan efektivitas penegakan hukum ada pada pertanyaan nomor 10.		
Nilai 0	Pegawai tidak memiliki kapasitas/ sumberdaya yang efektif untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	Tidak ada pegawai (tetap/temporer) yang khusus mengurus kawasan yang dinilai.	Peran Fasilitator Mengarahkan diskusi mengenai kapasitas dan sumberdaya yang tersedia sudah cukup efektifkah melakukan penegakan hukum dan penegakan peraturan kelola lainnya. Menjelaskan pada peserta bahwa "Staf" dimaksud adalah yang dipekerjakan secara formal maupun orang-orang yang bertanggung jawab untuk manajemen penegakan hukum dalam lembaga pemerintahan lainnya
Nilai 1	Terdapat kekurangan besar dalam kapasitas/ sumberdaya pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi (cth. kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patroli, kurang dukungan kelembagaan)	Terdapat pegawai (tetap/temporer). Tidak tersedia anggaran dan dukungan kelembagaan lainnya.	Indikator juga mencakup ketersediaan SDM, personal skill, anggaran dan peralatan pendukung. Misalnya, apakah jumlah tenaga fungsional PEH dan penyuluh cukup memadai untuk menegakkan atau menjalankan kegiatan pengawetan dan pemanfaatan?
Nilai 2	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan	Terdapat pegawai (tetap/temporer). Anggaran tersedia namun belum secara spesifik menegakkan untuk kawasan yang dikelola. Penegakan peraturan dimaksud tidak selalu untuk yustisia, namun juga termasuk di dalamnya kegiatan pengelolaan lainnya.	
Nilai 3	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang sangat baik untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	Terdapat pegawai (tetap/temporer) beserta anggaran patrolinya / pendukung lainnya. Terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola.	
Sumber Pembuktian	Laporan kepegawaian, Daftar urutan kepangkatan, Dokumen Uji Kompetensi Polhut, Daftar pengembangan SDM Polhut, Data PPNS, SOP kegiatan perlindungan dan pengamanan, Rencana kegiatan Perlindungan dan pengamanan, RKAKL, Rencana perseorangan Polhut/SKP Polhut (penanganan kasus relative data ancaman), SOP kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan konservasi, SOP inventarisasi dan monitoring, dokumen izin-izin pemanfaatan, dokumen kerjasama		
	Memastikan bukti terlengkap, dibuat catatan sebagai respon ke depan		

Penilaian Partisipatif	Bersama-sama peserta mendiskusikan kapasitas pegawai (pelatihan, keterampilan) dan kecukupan sarana dan prasarana (kendaraan, rute untuk mengakses daerah-daerah terpelit, dll) kemudian menilai sumber pembuktian, penanganan kasus pelanggaran dianalisis relative terhadap ancaman (kebutuhan), jumlah kesepakatan antara UPT dan masyarakat terkait kegiatan pemantauan, peserta juga mereview jumlah izin-izin pemanfaatan seperti IPPA, IUPEA, IUPA dan jumlah kerjasama terkait penggunaan kawasan untuk kegiatan strategis.	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipati
Indikator terkait	Peraturan Kawasan (2), sistem perlindungan (10), jumlah pegawai (13), anggaran (15), dan masyarakat adat (23).	
Tindak lanjut	Bagian 'langkah selanjutnya' harus mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan jika skor rendah. Apabila staf cukup terlatih dan diperlangkapi peralatan yang memadai namun masih belum percaya diri untuk melakukan penegakan hukum, perlu dijelaskan dalam jawaban. Fasilitator memeriksa kembali capaian dari indikator peraturan kawasan yang memungkinkan kegiatan-kegiatan pengelolaan dilakukan sesuai dengan blok/zonasi. Indikator ini juga dapat dilihat dari capaian indikator inventarisasi sumberdaya dan penelitian, misalnya ketersediaan SOP inventarisasi sumberdaya. Fasilitator juga dapat mengelaborasi apakah pada aspek pemanfaatan telah dilakukan dengan masyarakat lokal/adat.	
4. Tujuan utama dari kawasan konservasi		
Indikator	Apakah pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati atau tercantum dalam mandat pengelolaan?	
Pengertian	Indikator ini menilai kesesuaian perencanaan dan pemuktahiran rencana. Suatu kawasan konservasi dikatakan baik bila memiliki rencana pengelolaan untuk memenuhi tujuan utama dari kawasan konservasi (idealnya secara eksplisit tercantum dalam SK penunjukan/penetapan). Kegiatan pengelolaan diarahkan untuk menjawab tujuan tersebut atau tujuan yang dituliskan dalam dokumen Rencana Pengelolaan atau dokumen proses-proses kesepakatan dengan parapihak yang dapat didokumentasikan	
Nilai 0	Belum ada tujuan yang disepakati untuk kawasan konservasi ini	Peran Fasilitator Mengarahkan diskusi mengenai tujuan utama kawasan konservasi dan apa yang sudah dilakukan pengelola untuk mencapai tujuan tersebut. Memverifikasi apakah rencana pengelolaan sudah memuat tujuan pengelolaan, skor tertinggi dapat diberikan apabila pengelolaan dilakukan sesuai tujuan yang telah ditetapkan (tidak harus semua aktivitas di rencana pengelolaan telah dilakukan untuk mendapatkan skor tertinggi)
Nilai 1	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi tidak dikelola sesuai tujuan-tujuan ini	KK tidak memiliki mandat pengelolaan yang jelas serta belum menyusun Rencana Pengelolaan (Jangka Panjang (RPJP) yang memuat tujuan pengelolaan secara spesifik. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) sudah disusun dan memuat tujuan pengelolaan secara spesifik, namun kegiatan tidak mengacu pada tujuan yang ditetapkan.
Nilai 2	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan hanya memenuhi beberapa tujuan	Kegiatan esensial sesuai tujuan pengelolaan yang direncanakan dalam RPJP sebagian telah dilaksanakan.
Nilai 3	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	Sasaran dan tujuan pengelolaan tidak harus tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan tetapi merujuk kepada nilai-nilai kawasan yang dilestarikan, dan bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Bukti yang dibutuhkan	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) 10 tahun, Rencana Jangka Pendek (tahunan/penjabaran RP), Rencana strategis (renstra), Rencana Kinerja (reja/tahunan), bisa ditambahkan dokumen perencanaan pelengkap lainnya. Master plan Wisata, Master plan pembinaan daerah penyangga, Rencana Pemulihan Ekosistem, dll. Jika ada, dokumen kajian tim (terpadu) usulan pembentukan kawasan konservasi, kajian timdu usulan perubahan RTRWP, dokumen National Conservation Plan for Indonesia	Memastikan bukti terlampai dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan. Fasilitator dapat membuat check list kegiatan pengelolaan yang sudah berjalan atau belum.
Penilaian Partisipatif	Mengupas isi RP apakah sudah sesuai dengan tujuan pengelolaan, mendaftarkan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam RP dan mengidentifikasi kegiatan yang telah dilakukan	Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Status hukum (1), Desain Kawasan (5), Rencana Pengelolaan (7), Sistem Perlindungan (10)	
Tindak lanjut	Jika ditemukan tujuan pengelolaan yang kurang jelas atau tidak terermin pada tidak pengelolaan mengindikasikan manajemen tidak terarah dan cenderung tidak efisien. Langkah tindak lanjut perlu mencatatkan suatu proses untuk menyatakan tujuan (misalnya lokakarya stakeholder). Perlu dikaji apakah dokumen anggaran mendukung tujuan pengelolaan.	
5. Desain Kawasan konservasi		
Indikator	Apakah kawasan konservasi memiliki luasan dan bentuk yang tepat untuk melindungi spesies, habitat, proses-proses ekologis dan tangkapan air sesuai kepentingan konservasi kuncinya? Kepentingan konservasi kunci dapat diartikan sebagai tujuan utama kawasan.	
Pengertian	Indikator ini menilai luasan yang cukup dan bentuk yang tepat untuk melindungi nilai konservasi kuncinya, misalnya dari intensitas dan frekuensi konflik satwa liar di sekitar kawasan. Berangkat dari kondisi eksisting, perlu adanya analisis untuk mengidentifikasi argumen guna menentukan kesepakan dalam menjawab pertanyaan ini dengan mempertimbangan informasi terkait penggunaan lahan di sekitarnya (lihat pertanyaan 21).	
Nilai 0	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti pencapaian tujuan utama kawasan konservasi yang sangat sulit	Peran Fasilitator: Fasilitator memberikan pemahaman perihal yang perlu dipertimbangkan dalam desain kawasan, antara lain:
Nilai 1	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai sehingga pencapaian tujuan utama yang sulit tetapi beberapa kegiatan mitigasi tengah dilakukan (contoh perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai)	Ukuran – kecukupan untuk core habitat dari jenis-jenis kunci (minimum viable habitat) Bentuk Konektivitas Kemudahan pengelolaan batas – misal batas alam berupa sungai, gunung, laut Enklave, jalan raya di dalam Kawasan Konservasi
Nilai 2	Desain kawasan konservasi tidak signifikan menghalangi pencapaian tujuan, tetapi perlu ditingkatkan (cth. terkait dengan proses-proses ekologis skala besar yang terjadi)	Fasilitator memandu jalannya diskusi dan penilaian, dalam melindungi habitat yang lebih luas dapat dijelaskan menggunakan teori umum biogeografi (Mac Arthur and Wilson 1967 ⁸) yang menyatakan bahwa dalam penetapan kawasan konservasi

8. teori umum biogeografi (Mac Arthur and Wilson 1967⁸) yang menyatakan bahwa dalam penetapan kawasan konservasi

Nilai 3	Desain kawasan konservasi membantu pencapaian tujuannya; desain memadai untuk konservasi spesies dan habitat; dan menjaga proses-proses ekologis seperti aliran permukaan dan bawah tanah pada skala DAS, pola gangguan alam, dll	Kawasan memadai baik secara luas, lokasi dan bentuknya sehingga tidak menghalangi pencapaian tujuan.	mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) kawasan yang tidak terganggu, (2) luasan yang cukup melindungi keberlanjutan populasi satwa atau tumbuhan, (3) bentuknya kompak - bulat lebih baik dari memanjang, (4) memiliki konektivitas dengan kawasan lainnya.
Bukti yang dibutuhkan	SK Penetapan Zonasi (peta dan bukunya), Dokumen evaluasi fungsi dengan stakeholder yang berbatasan langsung dengan kawasan, Peta2 sebaran satwa, upaya penanganan konflik di sekitar kawasan, peta bentang alam yang menunjukkan lokasi kawasan konservasi di antara kawasan di sekitarnya. Jika ada: Dokumen rencana tata ruang pulau, dokumen kawasan strategis nasional		Fasilitator memastikan bukti terlengkapi dengan baik, jika belum lengkap diberikan catatan untuk perbaikan ke depannya
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui evidence yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif, menganalisis peta kawasan, peta sebaran spsis kunci, kondisi fitur utama, peta kawasan hutan di sekitar kawasan.		Fasilitator memimpin proses penilaian partisipatif, memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator terkait	Tujuan Kawasan (4), Inventarisasi Sumberdaya (9), Rencana Pengelolaan (10), Pemerintah dan swasta disekitar (22), Masyarakat adat (23), Masyarakat Lokal (24), Kondisi nilai-nilai (30)		
Tindak Lanjut	Kecukupan luas atau bentuk suatu kawasan konservasi tergantung dengan tujuan penetapan kawasan itu sendiri. Jika fokus pengelolaan berupa benda tak bergerak (misal pohon atau batu), luas wilayah yang relatif kecil pun sudah cukup ideal. Lain halnya dengan satwa liar yang mempunyai daya jelajah luas. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini perlu dicatat oleh fasilitator, dan bersama-sama menilai langkah-langkah yang diperlukan apabila ada kesulitan pengelolaan akibat desain kawasan yang kurang tepat. Misalnya : membuat koridor, membina kawasan penyangga, penerapan sustainable landscape management, dan sebagainya.		
6. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi			
Indikator	Apakah batas kawasan diketahui dan dikukuhkan?		
Pengertian	Indikator ini ditujukan pada identifikasi batas kawasan. Konteks batas kawasan diketahui adalah bahwa tidak ada konflik khususnya dengan masyarakat atau pihak lainnya yang berbatasan. Sementara dikukuhkan artinya telah memiliki aspek legalisasi. Batas yang dimaksud adalah batas di lapangan.		
Nilai 0	Batas kawasan konservasi tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan.	Peran Fasilitator Fasilitator membantu diskusi mengenai identifikasi batas kawasan, apakah sudah diketahui semua pihak atau hanya diketahui pengelola saja. Ataulah otoritas pengelolaan juga tidak tahu pasti apakah batas tersebut ada/masih ada di lokasi yang sudah ditetapkan.
Nilai 1	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan.	

Nilai 2	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikuatkan dengan tepat	Petugas dan masyarakat mengetahui batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat).	Memastikan bukti terverifikasi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Nilai 3	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/pengguna lahan yang bertetangga dan di kukuhkan dengan tepat	Tata batas sudah temu gelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditanda tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait pal batas.	
Bukti yang dibutuhkan	BATB, Peta kawasan, peta tata batas, peta rekonstruksi batas kawasan, dokumentasi pal batas, laporan sosialisasi batas kawasan, laporan patroli pengamanan batas kawasan, laporan pemeliharaan jalur batas, (dokumen pengukuhan kawasan), jumlah kasis atau sebaran konflik tata batas.		
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap. Fasilitator memfasilitasi daftar desa di sekitar kawasan yang berkonflik dan membandingkan dengan jumlah total desa. Peta batas kawasan dapat digunakan sebagai media diskusi		Memastikan bukti terverifikasi, disepakati semua pihak dan memimpin penilaian partisipatif
Indikator Terkait	Status Hukum (1). Masyarakat lokal (24), pemerintah dan swasta di sekitar (22)		
Tindak Lanjut	Fasilitator kembali melihat capaian indikator Status hukum. misalnya apabila kawasan konservasi telah dikuatkan, apakah masih terdapat konflik dengan pihak ketiga, misalnya masyarakat adat, masyarakat lokal, atau perusahaan swasta di sekitarnya. Jika tata batas telah selesai, pastikan proses sosialisasi sudah menyeluruh atau belum; dan adakah monitoring batas berkala. Langkah selanjutnya berisi upaya-upaya untuk peningkatan pengakuan batas kawasan dan sosialisasi bagi semua pihak jika dirasa kurang.		
7. Rencana Pengelolaan (Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/RPIP)			
Indikator	Apakah ada rencana pengelolaan (RPIP) dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan?		
Pengertian	Kata kuncinya adalah ada dokumen rencana pengelolaan (RPIP) dan implementasinya, topik ini juga dapat menyinggung apakah RP sudah cukup relevan dengan tujuan kawasan. Rencana pengelolaan yang dimaksud adalah Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan PP/28/2011 dengan rentang waktu 10 tahun.		
Nilai 0	Tidak ada rencana pengelolaan untuk kawasan konservasi ini	RP belum disusun	Peran Fasilitator Mendiskusikan secara mendalam apakah RPIP yang ada saat ini masih relevan. relatif dengan konteks, mandat kawasan dan tujuan pengelolaan
Nilai 1	Rencana pengelolaan tengah disiapkan atau telah disiapkan tetapi belum diimplementasikan	Cukup jelas	
Nilai 2	Rencana pengelolaan telah ada tetapi baru sebagian yang diimplementasikan karena kendala pendanaan atau masalah lain	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah disahkan dan sebagian kegiatan penting telah dilakukan (tercantum dalam alokasi budget pengelola atau hibah)	Menjelaskan pada peserta bahwa rencana pengelolaan yang baik mengacu pada yang baik meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting

Nilai 3	Rencana pengelolaan telah ada dan tengah diimplementasikan	Kegiatan esensial dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah dilakukan (tercantum pada alokasi budget pengelola atau didanai melalui kerjasama (MoU) dengan pihak lain	dan mengurangi tekanan, zonasi, peta, peraturan, serta melihat perencanaan kawasan dikaitkan dengan rencana regional dan nasional.
Proses Perencanaan (+1)	Proses perencanaan memberikan kesempatan yang cukup bagi paripihak untuk mempengaruhi RP	Konsultasi publik terhadap RP dengan melibatkan para pihak	Analisis/ Identifikasi stakeholder kunci dan perlu diverifikasi kepada stakeholder kunci apakah mereka benar-benar telah terlibat dalam proses perencanaan (bukan pemberdayaan masyarakat saja).
Proses Perencanaan (+1)	Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan	Terdapat rencana review/evaluasi RP. Apabila RP telah disusun sesuai dengan PP Nomor 28 tahun 2011 dengan periode 10 tahun	Kalau belum waktunya/jadwalknya review, pertanyaan ini tidak perlu dijawab
Proses Perencanaan (+1)	Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin dimasukkan kedalam perencanaan	Cukup jelas.	Pertanyaan ini tidak hanya terbatas pada rencana pengelolaan, namun ke semua aspek perencanaan yang mempertimbangkan hasil riset; monitoring sebagai masukan yang memperbaiki perencanaan secara terus menerus.
Bukti yang dibutuhkan	Dokumen RP atau draft bila masih dalam proses penyusunan. BA Konsultasi Publik, Surat Rekomendasi Bappeda (Pemda), RKAKL, Dokumen kerjasama		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif, memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek, Tujuan Kawasan, Desain Kawasan, Perencanaan Penggunaan lahan dan air, Penegakan Hukum, Inventarisasi Sumberdaya, Jumlah Pegawai, Anggaran, Perlengkapan, Riset, Pengelolaan Sumberdaya, Pelatihan Pegawai, Pengelolaan Anggaran, Pemeliharaan Perlengkapan, Pendidikan dan penyadaran, Pemerintah dan swasta disekitar, Masyarakat adat, Masyarakat Lokal, Monitoring dan evaluasi. Fasilitas pengunjung, Keuntungan ekonomis, Kondisi nilai-nilai		
Tindak Lanjut	Mendiskusikan RPPJ berkaitan dengan konteks (status kawasan, ancaman, nilai penting), dan hampir seluruh aspek pengelolaan, sehingga tindak lanjut dalam indikator ini perlu menelaah lebih lanjut apakah dokumen RPPJ telah menjawab kebutuhan pengelolaan		
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPPJn) yang merupakan turunan dari RP			
Indikator	Apakah ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPPJn) dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan?		
Pengertian	Dengan disusunnya Rencana Pengelolaan Jangka Pendek maka asumsinya rencana kegiatan tahunan yang tercantum dalam RP Jangka Panjang akan siap diimplementasikan pada tahun tersebut. Maka jika belum menyusun RP Jangka Panjang sudah pasti tidak akan ada RP Jangka Pendek. Apabila ada dokumen RPPJ dan Renja (Turunan Renstra) maka harus di lihat apakah isi Renja tersebut sesuai dengan perencanaan tahunan yang tercantum dalam RPPJ. RPPJn juga merupakan dokumen yang komperhensif yang mencantumkan kegiatan pada kawasan tersebut baik yang terdapat biayanya (APBN/non APBN) maupun tidak.		

Nilai 0	Tidak ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn)	Kawasan tidak memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn)	Peran Fasilitator Mendiskusikan RPJ/Pn kawasan dari segi konteks dan tataran implementasinya. RPJ/Pn berdurasi 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RP sesuai dengan PP 28/2011 dan Peraturan No P35 Tahun 2016. RPJ/Pn bukanlah rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun UPT dalam implementasi APBN tahunan. Meskipun implementasi belum selesai apabila penilaian dilakukan di tengah tahun, namun apabila pengelolaan berjalan sesuai perencanaan maka dapat diberikan nilai maksimal
Nilai 1	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn) tetapi baru beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan	Kawasan memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn) dan telah diimplementasikan sebagian	
Nilai 2	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn) dan banyak kegiatan telah diimplementasikan	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn) sebagian besar telah diimplementasikan	
Nilai 3	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn) dan semua kegiatan telah diimplementasikan	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJ/Pn) diimplementasikan seluruhnya	
Bukti yang dibutuhkan	Dokumen rencana Tahunan, Renja, Laporan tahunan, laporan kinerja, Dokumen penetapan kinerja (tahunan antara kepala balai dgn dirjen)		
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		
Indikator Terkait	Penegakan Hukum (3), Tujuan Kawasan (4), Desain Kawasan (5), Rencana Pengelolaan (7), Inventarisasi Sumberdaya (9), Sistem Perlindungan (10), Riset (11), Pengelolaan Sumberdaya (12), Jumlah Pegawai (13), Pelatihan Pegawai (14), Anggaran (15), Kepastian Anggaran (16), Pengelolaan Anggaran (17), Pengelolaan Anggaran (18), Pemeliharaan Perlengkapan (19), Pendidikan dan penyadaran (20), Perencanaan Penggunaan lahan dan air (21), Pemerintah dan swasta disekitar (22), Masyarakat adat (23), Masyarakat Lokal (24), Monitoring dan evaluasi (26), Fasilitas pengunjung (27), Keuntungan ekonomis (25), Kondisi nilai-nilai(30)		
Tindak Lanjut	Berisikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk peningkatan efektivitas pengelolaan ke depannya.		
9. Inventarisasi sumberdaya			
Indikator	Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini?		
Pengertian	Inventarisasi sumberdaya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi kualitas dan kuantitas sumberdaya yang ada di dalam kawasan konservasi termasuk kegiatan monitoring sumberdaya tersebut sehingga informasinya up to date. Sumberdaya tersebut mencakup unsur fisik, biotik, dan proses-proses yang terjadi dalam ekosistem, dan sosial budaya. Kegiatan inventarisasi dapat dilakukan secara reguler berbasis unit kerja (misalnya resort, seksi, bidang) yang melekat pada tugas sehari-hari petugas lapangan atau inventarisasi tematik yang secara temporal dilakukan oleh Balai/Balai Besar dan atau pihak lainnya. Namun demikian sumberdaya tersebut diprioritaskan pada unsur-unsur yang mendukung pencapaian tujuan pengelolaan.		

Nilai 0	Terdapat sedikit informasi yang tersedia tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi	Cukup jelas.	Peran Fasilitator Mendiskusikan dan menggali informasi terkait inventarisasi kawasan. Misalnya, informasi yang dipunyai para linuwun yang melakukan riset (dijelaskan dalam catatan) yang sesuai dengan tujuan pengelolaan.
Nilai 1	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan	Cukup jelas.	Selama informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sudah ada, terutama terkait spesies atau ekosistem kunci yang jadi fokus tujuan pengelolaan sudah lengkap dan terintegrasi dalam kegiatan pengelolaan/sistem informasi manajemen, maka dapat diberikan skor maksimal. Namun apabila ada informasi yang masih belum tersedia (misal mengenai nilai budaya) maka skor tidak dapat maksimal.
Nilai 2	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	Informasi terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM).	Kriteria cukup relatif terhadap tujuan pengelolaan yang tercantum dalam RP. Misalkan, tujuan fokus pada pengelolaan harimau, maka inventarisasi apakah sudah dilakukan di beberapa kawasan atau belum? Kalau masih sedikit datanya berarti belum
Nilai 3	Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan		Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Bukti yang dibutuhkan	Data Base Informasi Konservasi Alam, SIDAK KSDAE, Peta sebaran satwa/tumbuhan, laporan hasil identifikasi, inventarisasi, Rencana pembinaan habitat, laporan keg pembinaan habitat, SIM RBW, laporan SMART		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		
Indikator Terkait	Penegakan Hukum (3), Tujuan Kawasan (4), Desain Kawasan (5), Rencana Pengelolaan (7), RPPJ (8), Sistem Perlindungan (10), Riset (11), Pengelolaan Sumberdaya (12), Jumlah Pegawai (13), Pelatihan Pegawai (14), Anggaran (15), Kestabilan Anggaran (16), Pengelolaan Anggaran (17), Pengelolaan (18), Pemeliharaan Perlengkapan (19), Pendidikan dan penyadaran (20), Perencanaan Penggunaan lahan dan air (21), Pemerintah dan swasta disekitar (22), Masyarakat adat (23), Masyarakat Lokal (24), Monitoring dan evaluasi (26), Fasilitas pengunjung (27), Keuntungan ekonomis (25), Kondisi nilai-nilai(30)		
Tindak Lanjut	Mendiskusikan data dan informasi apa yang relevan dengan pengelolaan kawasan, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana data dan informasi tersebut dikelola		

10. Sistem Perlindungan			
Indikator	Apakah sistem telah memadai untuk mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya di dalam Kawasan Konservasi?		
Pengertian	Kawasan konservasi memiliki sumberdaya yang juga sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak, diperlukan sebuah sistem yang memadai untuk mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya tersebut, agar tujuan pengelolaan tercapai namun pihak-pihak yang berkepentingan terutama masyarakat dapat tetap mendapatkan akses. Pertanyaan berfokus terutama pada penegakan hukum, dan akan berlaku di tempat-tempat di mana ada tekanan dari perburuan, perambahan, pertambangan ilegal, dll. Di kawasan konservasi tanpa tekanan tersebut, penunjukan dan pengelolaan dapat dinilai "sebagian besar atau seluruhnya efektif".		
Nilai 0	Sistem perlindungan (patroli, perijinan, dll) tidak ada atau tidak efektif mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	Tidak terdapat sistem perlindungan yang dibangun. Pernah dilakukan patroli kawasan dan belum ada sistem pemanfaatan.	Peran Fasilitator Memfasilitasi peserta untuk melakukan pembukaan terbalik dengan melihat fakta yang dapat ditelusuri tentang kelemahan sistem perlindungan kawasan, yang terdiri dari: early warning system mobilisasi informasi sistem komando untuk pengambilan keputusan sistem monitoring data
Nilai 1	Sistem perlindungan hanya efektif sebagian dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	Misal sistem diterapkan sebagian misalnya hanya kegiatan patroli saja namun belum ada pengawasan terhadap pemanfaatan atau sebaliknya.	Pertanyaan lebih ditujukan pada apakah kapasitas yang ada sudah digunakan dengan cukup efektif, bukan menyoroti kapasitas dan SDM untuk penegakan peraturan (sudah dibahas dalam pertanyaan 3)
Nilai 2	Sistem perlindungan secara moderat efektif mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya	Terdapat kegiatan patroli dan pengawasan pemanfaatan namun hanya pada sebagian kawasan dan masih terdapat pelanggaran yang besar.	Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Nilai 3	Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif dalam mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya	Terdapat kegiatan patroli dan pengawasan pemanfaatan. Tidak terdapat pelanggaran atau masih ada namun dalam skala kecil.	
Bukti yang dibutuhkan	Rencana kerja perlindungan dan pengamanan, Rencana pengelolaan Zona Tradisional, PKS dengan masyarakat terkait pengelolaan zona tradisional, SOP kegiatan perlindungan dan Pengamanan, SOP pengurusan SIMAKSI, Rekapitulasi SIMAKSI, daftar tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran (misalnya dari database Kosat Polhut), pembentukan dan kegiatan Masyarakat Mitra Polhut (MMIP)		
Penilaian Partisipatif	Bersama-sama menilai efektivitas sistem perlindungan relatif terhadap ancaman dan penggunaan kawasan/sumber daya di dalam kawasan		Skor diberikan berdasarkan penilaian partisipatif mengenai sudah cukupkah kegiatan perlindungan sumberdaya saat ini untuk menghadapi tekanan yang terjadi.
Indikator Terkait	Penegakan Hukum (3), Tujuan Kawasan (4), Desain Kawasan (5), Rencana Pengelolaan (7), RPP (8), Inventarisasi Sumberdaya (9), Sistem Perlindungan (10), Riset (11), Jumlah Pegawai (13), Pelatihan Pegawai (14), Anggaran (15), Kepastian Anggaran (16), Pengelolaan Anggaran (17), Penlempangan (18), Pemeliharaan Penlempangan (19), Pendidikan dan penyadaran (20), Perencanaan Penggunaan lahan dan air (21), Pemerintah dan swasta disekitar (22), Masyarakat adat (23), Masyarakat Lokal (24), Monitoring dan evaluasi (26), Fasilitas pengunjung (27), Keuntungan ekonomis (25), Kondisi nilai-nilai(30)		

Tindak Lanjut	Fasilitator mendiskusikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki indikator ini dan menuliskannya dalam catatan misalnya membangun kelembagaan sistem perlindungan (termasuk hubungan dan koordinasi dengan penegak hukum dan Ditjen Gakkum), SoP, frekuensi dan intensitas patroli, cakupan wilayah patroli, dan tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran, serta pengendalian terhadap akses penggunaan sumberdaya seperti pemanfaatan tradisional, wisata dan pemanfaatan air .			
11. Penelitian				
Indikator	Apakah ada penelitian yang dilakukan secara terprogram untuk mendukung pengelolaan? Apakah kegiatan penelitian berkontribusi pada pengelolaan kawasan konservasi? Penelitian mencakup kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh pengelola ataupun pihak lain.			
Pengertian	Penelitian yang dimaksud dalam indikator ini diartikan sebagai kegiatan penyelidikan (penelitian) atas suatu masalah atau objek yang dilakukan secara sistematis, menerapkan metode ilmiah, kritis, dan dalam periode waktu tertentu atau berseri. Hasil penelitian dapat dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pengelolaan kawasan konservasi, baik penyelesaian masalah maupun pengembangan potensi pemanfaatan secara berkelanjutan. Kegiatan ini dibedakan dengan kegiatan pengelolaan secara rutin, termasuk inventarisasi (dibahas di indikator no.9)			
Nilai 0	Tidak ada survey atau riset di kawasan konservasi	Belum ada penelitian kawasan	Peran Fasilitator Mendiskusikan apakah survey dan riset sudah dilakukan secara terprogram berdasarkan analisa kebutuhan untuk mendukung pengelolaan atau apakah hasil riset menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan, termasuk RKT. Penelitian dapat dilakukan oleh pengelola sendiri, maupun oleh asosiasi, relawan, mahasiswa dan akademisi.	
Nilai 1	Ada sedikit survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen). Data yang dihasilkan masih berupa cuplikan-cuplikan data dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan .	Fasilitator Perlu mengingatkan kembali tujuan pembentukan dan/atau pengelolaan kawasan kepada peserta. Juga perlu menanyakan keberadaan dokumen hasil analisa kebutuhan survey dan riset kawasan atau roadmap atau dokumen sejenisnya. Penilaian maksimal dapat diberikan hanya jika penelitian benar-benar terintegrasi ke dalam kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi.	
Nilai 2	Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen). Ada database namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	Pemberian nilai disesuaikan dengan bukti riset yang dilakukan mendukung kegiatan pengelolaan atau tidak. Sebagai contoh di TNHGS sudah menyusun protokol penelitian/riset apa saja yang diperlukan oleh pengelola. Mereka akan memberi insentif pada peneliti jika riset yang dilakukan mendukung tujuan pengelolaan	
Nilai 3	Ada program survey dan riset yang komprehensif dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	Terdapat roadmap atau research need untuk kawasan (kebutuhan kebutuhan kawasan, kebutuhan penelitian tertuang dalam RP) – Ada database dan pemutakhiran data.		
Bukti yang dibutuhkan	Dokumen analisa kebutuhan survey dan riset / rencana riset, Rekap SIMAKSI penelitian, Data base kegiatan riset/ penelitian, Dokumen kerjasama dengan lembaga penelitian/universitas, dokumen laporan, jurnal, dari hasil penelitian.			

Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif, di sini penekanan pada proyek-proyek penelitian tertentu yang bisa membantu untuk memahami lebih baik dalam mengelola kawasan.	Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak.
Indikator Terkait	rencana pengelolaan (7). Inventarisasi sumberdaya (9), kondisi nilai-nilai (30)	
Tindakan Lanjut	Apabila belum riset terprogram, fasilitator dapat membantu peserta menyusun kebutuhan riset dan/atau protokol riset yang diperlukan dalam pengelolaan. Mendukung pihak pengelola dalam hal memastikan adanya dokumen hasil analisa kebutuhan survey dan riset /penelitian, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kapasitas melakukan / mendukung pelaksanaan survey dan riset yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan. Kebutuhan survey dan riset ini meliputi aspek keanekaragaman hayati atau species tertentu dan aspek sosial budaya yang berpengaruh terhadap keberlanjutan eksistensi nilai-nilai kawasan. Dalam kasus kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat atau masyarakat adat, penelitian akan mencakup, misalnya, survei dari species yang digunakan masyarakat adat, seperti ikan atau hasil hutan non-kayu untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan.	
12. Pengelolaan Sumberdaya		
Indikator	Apakah pengelolaan sumberdaya secara aktif tengah dilakukan?	
Pengertian	Sumberdaya yang dimaksudkan adalah sumberdaya alam dan nilai-nilai budaya dari kawasan. Pengelolaan sumberdaya (mencakup unsur biotik, fisik, proses-proses dalam ekosistem, dan nilai budaya) dilakukan untuk mempercepat pemulihan dari sumberdaya yang dalam kondisi kritis. Pengelolaan sumberdaya termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan restorasi, rehabilitasi, dan kegiatan sejenisnya. Indikator pengelolaan sumberdaya sangat terkait erat dengan indikator kondisi nilai-nilai. Kegiatan pengelolaan yang penting (kritis) adalah aktivitas penting yang diperlukan dalam melestarikan nilai-nilai, memelihara infrastruktur, menjalin komunikasi yang intensif dengan masyarakat sekitar, sedangkan pengelolaan aktif adalah usaha yang dilakukan untuk melindungi nilai-nilai atau mengurangi ancaman yang ada terhadap nilai-nilai kawasan.	
Nilai 0	Pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan	Peran Fasilitator
Nilai 1	Sangat sedikit kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, species dan proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis yang sedang dilakukan	Mendiskusikan kegiatan pengelolaan sumberdaya yang telah dilakukan dan langkah-langkah pemulihannya. Pengelolaan disini mengacu pada kegiatan selain penegakan hukum, seperti berbagai bentuk restorasi dan pembuatan habitat, pemantauan populasi, pemangaran jika diperlukan, dan kontrol species invasif. Apabila ekstraksi sumber daya berkelanjutan diizinkan, pengelolaan akan mencakup pemantauan sumber daya tersebut, pengenalan zonasi dll. Pengelolaan juga termasuk langkah-langkah aktif untuk melindungi situs budaya dan situs sakral.
Nilai 2	Banyak kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, species, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis sedang dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan	
Nilai 3	Kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, species, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis secara substansial atau sepenuhnya tengah/ sedang dilaksanakan	
Bukti yang dibutuhkan	Rencana Pengelolaan, rencana pembinaan habitat, laporan-laporan kegiatan teknis, Monitoring satwa/tumbuhan, Lokasi PUP/PSP Data base dinamika Kehati, dokumen rancangan teknis	Memastikan bukti terungkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif	Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak

Indikator Terkait	Peneragaan Hukum (3), Tujuan Kawasan (4), Desain Kawasan (5), Rencana Pengelolaan (7), RPIP (8), Inventarisasi Sumberdaya (9), Sistem Perlindungan (10), Riset (11), Jumlah Pegawai (13), Pelatihan Pegawai (14), Anggaran (15), Kestabilan Anggaran (16), Pengelolaan Anggaran (17), Perlengkapan (18), Pemeliharaan Perlengkapan (19), Pendidikan dan penyadaran (20), Perencanaan Penggunaan lahan dan air (21), Pemerintah dan swasta disekitar (22), Masyarakat adat (23), Masyarakat Lokal (24), Monitoring dan evaluasi (26), Fasilitas pengunjung (27), Keuntungan ekonomis (25), Kondisi nilai-nilai (30)			
Tindak Lanjut	Membantu pengelola kawasan membuat pemetaan kondisi nilai-nilai, gangguan, kegiatan / intervensi yang sudah / sedang dan akan / perlu dilakukan, siapa yang melakukan, hasil dan hambatan yang dihadapi. Juga membantu menetapkan pihak-pihak yang mempunyai interest dan kapasitas mendukung pengelolaan intensive / pemulihan kondisi sumberdaya kawasan. Misalnya terjadi penurunan populasi suatu spesies kunci, maka diperlukan pengelolaan sumberdaya dalam bentuk pembinaan Pengelolaan sumberdaya dimaksud adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk memastikan keberadaan nilai-nilai kehati yang menjadi tujuan penetapan Kawasan Konservasi terjamin, e.g. perlu restorasi habitat, pembuatan pagar atau tanggul, kontrol invasive species, pembuatan zonasi sementara, pemeliharaan situs budaya, dll. dalam hal ini monitoring reguler terhadap kegiatan-kegiatan tersebut juga termasuk habitat atau pemulihan populasinya.			
13. Jumlah Pegawai				
Indikator	Apakah sudah ada cukup pegawai untuk mengelola kawasan konservasi?			
Pengertian	Indikator ini fokus pada jumlah atau kuantitas pegawai dalam pengelolaan satu unit kawasan konservasi. Penjelasan kecukupan jumlah pegawai dapat dilihat dari komposisi pegawai di tingkat resort, meliputi kepala resort, bagian administrasi, dan anggota, serta MMP. Kecukupan yang dimaksud dalam indikator ini relatif terhadap pencapaian kegiatan yang mendukung tujuan pengelolaan			
Nilai 0	Tidak ada pegawai	Pegawai yang dimaksud adalah yang bertugas di kawasan yang dinilai. Untuk UPT BKSDA adalah petugas resort/KPHK.	Peran Fasilitator Mendiskusikan kecukupan pegawai terhadap kegiatan pengelolaan kawasan dan ancaman yang ada. Menjawab pertanyaan ini mungkin sedikit lebih sulit untuk kawasan yang dikelola masyarakat; masalah umumnya terjadi saat salah satu kawasan memiliki cukup orang yang terlibat disana sebagai kapasitas yang perlu dikelola dibanding hubungan kerja dalam arti tradisional. Sementara, di beberapa kawasan konservasi terpendil, dengan sedikit tekanan, mungkin tidak ada staf permanen melainkan satu orang yang mengawasi beberapa kawasan konservasi; dalam hal ini nilainya akan jatuh diantara 1-3	
Nilai 1	Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk kegiatan pengelolaan yang penting	Pegawai belum cukup, baik jumlah dan fungsi (pengelolaan yang penting : tenaga administrasi dan teknis)		
Nilai 2	Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis (minimal)	Pegawai cukup secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) namun jumlahnya kurang.		
Nilai 3	Jumlah pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Pegawai cukup secara fungsi dan jumlah.		
Bukti yang dibutuhkan	Laporan kepegawaian, DUK (Daftar Urut Kepangkatan), SIMPEG, Analisis jabatan, Bezetting pegawai, SK penempatan pegawai, SKP (Sasaran Kerja Pegawai), daftar pegawai/pejabat tingkat resort			
Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif			
Indikator Terkait	peneragaan hukum (3), Rencana pengelolaan (7), RPIP (8), staf terlatih (14), anggaran (15), kestabilan anggaran (16), perlengkapan (19), kondisi nilai-nilai (30).			

Tindak Lanjut	Mendefinisikan / membuat kriteria pengelolaan penting / dasar untuk kawasan yang dinilai. Membantu menganalisa kebutuhan optimal pegawai (teknis dan administrasi) berdasarkan tujuan pengelolaan kawasan. Yang dimaksudkan dengan kegiatan pengelolaan yang penting (kritis) adalah aktivitas penting yang diperlukan dalam melestarikan nilai-nilai, memelihara infrastruktur jika ada dan diperlukan, menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar dan para pihak berkepentingan. Perlu membuat kesepakatan, harusnya tertulis, tentang pengelolaan penting / kritis / minimal bersama pihak pengelola kawasan.			
14. Pelatihan Pegawai				
Indikator	Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan?			
Pengertian	Kata kuncinya adalah staf yang memiliki keahlian sesuai tujuan pengelolannya kawasan konservasi dimaksud			
Nilai 0	Pegawai kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi	Tidak ada staf/petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	Peran Fasilitator Mendiskusikan keberadaan staf yang memiliki kompetensi sesuai perannya dalam memenuhi tujuan pengelolaan. Contohnya dalam menguasai manajemen habitat dan jenis; komunikasi dengan pemangku kepentingan termasuk masyarakat; atau kemampuan jagawana dalam mengamankan kawasan. Keahlian ini lebih dilihat pada staf permanen pengelola. Catatan: jabatan non struktural/umum tidak dijabat oleh fungsional. Pada banyak kasus, tenaga fungsional ditugaskan menjadi non struktural/fungsional umum, misal bendahara, penata usaha umum, anggota proyek dll.	
Nilai 1	Staf terlatih dan keahlian relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	Jumlah dan tingkat keahlian staf kurang dan belum sesuai dengan tujuan pengelolaan		
Nilai 2	Staf terlatih dan keahlian memadai, tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	Jumlah dan tingkat keahlian staf memadai namun perlu ditingkatkan sesuai tujuan pengelolaan		
Nilai 3	Staf terlatih dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Keahlian staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan. Misal. Kawasan dengan tujuan pengelolaan pelestarian kupu-kupu, memiliki staf yang memahami identifikasi kupu-kupu.		
Bukti yang dibutuhkan	Laporan kegiatan Peningkatan SDM, Rencana kebutuhan diklat, Sertifikat kompetensi pegawai, SK penempatan pegawai, SKP, DUK, Laporan Kepegawaian, SK Penempatan pegawai, Uraian tugas pegawai			
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak	
Indikator Terkait	penegakan hukum (3), Rencana pengelolaan (7), RPP (8), Riset (11), Pengelolaan Sumberdaya (12), Jumlah Pegawai (13), pelatihan pegawai (14), anggaran (15), kepastian anggaran (16), perlengkapan (18), pemeliharaan perlengkapan (19), kondisi nilai-nilai (30)			
Tindak Lanjut	Membantu pengelola kawasan mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan kapasitas (teknis sesuai nilai-nilai kawasan, administrasi/perencana & reporting) utama untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan. Membantu mengidentifikasi para pihak yang mempunyai interest yang sama dan berkemampuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pegawai dari pengelola kawasan konservasi untuk mencapai tujuan penetapan & pengelolaan kawasan. Langkah selanjutnya dapat berisikan daftar kesenjangan pelatihan yang penting dilaksanakan.			

15. Anggaran Saat Ini				
Indikator	Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi?			
Pengertian	Anggaran yang dimaksudkan bersumber dari dana APBN. Kriteria cukup atau tidak cukup seharusnya relatif terhadap perencanaan, kalau tidak ada perencanaan standarnya apa? anggaran yang dimaksud adalah anggaran operasional yang langsung dialokasikan pada kawasan.			
Nilai 0	Tidak ada anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	Peran Fasilitator : Mendiskusikan indikator yang berkaitan dengan jumlah total anggaran, sedangkan keberlanjutan anggaran akan dibahas dalam pertanyaan (16). Fasilitator perlu menyadari hampir setiap kawasan konservasi menilai anggaran mereka tidak cukup, karenanya poin ini tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah penambahan anggaran akan berguna melainkan apakah anggaran memadai untuk melaksanakan pengelolaan yang efektif dan menerapkan rencana pengelolaan yang realistis. Kriteria cukup atau tidak cukup seharusnya relatif terhadap perencanaan yang disusun.	
Nilai 1	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas untuk mengelola	Sudah jelas		
Nilai 2	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	Sudah jelas		
Nilai 3	Anggaran yang tersedia mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas		
Bukti yang dibutuhkan	RKAKL, Rencana Kinerja, Rencana Strategis, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Dokumen Kerjasama (PKS, RPP, RKT).		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan	
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif			
Indikator Terkait	Rencana pengelolaan (7), Kepastian anggaran (16)			
Tindak Lanjut	Mendiskusikan alternatif-alternatif pembiayaan			
16. Kepastian Anggaran				
Indikator	Apakah ada kepastian anggaran?			
Pengertian	Karena seluruh kawasan konservasi di Indonesia dikelola oleh pemerintah, maka pasti akan ada kepastian anggaran, tetapi untuk kawasan yang dikelola oleh BKSDA CA, SM dan TB belum tentu dialokasikan per kawasan/bagaimana kebijakan & perencanaan anggaran di BKSDA).			

Nilai 0	Tidak ada kepastian anggaran untuk kawasan konservasi dan pengelolaan sepenuhnya tergantung pada pihak luar atau pendanaan sangat tidak pasti	Tidak ada anggaran spesifik untuk pengelolaan kawasan.	Peran Fasilitator Mendiskusikan terkait kepastian anggaran untuk pengelolaan yang dimaksud adalah ketersediaan dari waktu ke waktu serta apabila ada ketergantungan dari donatur dapat dipastikan sejauh mana keberlanjutan ketersediaan dukungan dana tersebut. Dapat juga dilihat seberapa besar perubahan anggaran yang terseda dari waktu ke waktu. Poin ini juga melihat keberlanjutan dukungan pembiayaan dari luar (tidak hanya APBN) apabila sebuah proyek akan berakhir dan persiapan yang dilakukan dalam memastikan dukungan yang diperlukan terhadap anggaran kegiatan-kegiatan penting. Informasi lebih lanjut: <i>Sustainable Financing of Protected Areas</i> (Emerton et al. 2006.).
Nilai 1	Ada sedikit kepastian anggaran dan kawasan konservasi tidak dapat berfungsi secara memadai tanpa bantuan dana pihak luar	Hanya ada alokasi anggaran pengamanan untuk kawasan.	
Nilai 2	Ada cukup kepastian anggaran inti (core budget) untuk kegiatan regulir kawasan konservasi tetapi banyak inovasi dan inisiatif yang tergantung pendanaan dari luar	Terdapat alokasi anggaran pengelolaan untuk kawasan, (APBN maupun non APBN).	
Nilai 3	Ada kepastian anggaran untuk Kawasan Konservasi dan pemenuhan pengelolaan	Ada alokasi anggaran (APBN/non APBN) yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sesuai tujuan.	
Bukti yang dibutuhkan	RKAKL, DIPA, Dokumen kerjasama,		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak kepastian anggaran tidak mencerminkan kecukupan anggaran, sehingga bisa didiskusikan lebih dalam mengenai sumber-sumber pendanaan alternatif
Indikator Terkait	Pengelolaan anggaran (17). kecukupan anggaran (anggaran saat ini) (15)		
Tindak Lanjut	kepastian anggaran tidak mencerminkan kecukupan anggaran, sehingga bisa didiskusikan lebih dalam mengenai sumber-sumber pendanaan alternatif		
17. Pengelolaan Anggaran			
Indikator	Apakah anggaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang penting?		
Pengertian	Pengelolaan anggaran berkaitan dengan jumlah anggaran yang tersedia, maka pengelolaan anggaran yang baik akan tercermin dari adanya pemilihan prioritas pembiayaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran perlu dilihat sejauh mana alokasi digunakan untuk membiayai pengelolaan yang penting. Tidak dibatasi pada tujuan yang tercantum dalam rencana pengelolaan		
Nilai 0	Pengelolaan anggaran tidak baik dan secara signifikan mengurangi Efektivitas pengelolaan	Anggaran tidak membiayai kegiatan pengelolaan prioritas.	Peran Fasilitator Mendiskusikan terkait ketersediaan anggaran dan alokasi prioritas pengelolaan anggaran sebagai kegiatan administrasi yang menuntun prinsip tata kelola yang baik, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Nilai 1	Pengelolaan anggaran kurang baik dan mengurangi Efektivitas	Anggaran hanya sebagian kecil yang membiayai kegiatan pengelolaan prioritas.	
Nilai 2	Pengelolaan anggaran sudah memadai tetapi perlu ditingkatkan	Anggaran sebagian besar telah membiayai kegiatan pengelolaan prioritas.	

Nilai 3	Pengelolaan anggaran sangat baik dan memenuhi kebutuhan pengelolaan	anggaran yang ada digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan pengelolaan.	Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran umumnya adalah perencanaan yang baik, ketersediaan anggaran dan SDM yang memadai serta tersedianya sistem, aturan dan metode kerja.
Bukti yang dibutuhkan	SK Pengelola Keuangan, Laporan Keuangan, Dokumen Penetapan Kinerja, RKAKL		Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	anggaran (15) dan kepastian anggaran (16)		
Tindak Lanjut	Prinsip pengelolaan anggaran adalah keterkaitan antara perencanaan anggaran dengan tujuan yang dicapai, sehingga pada banyak kasus terutama anggaran Balai KSDA yang jumlahnya terbatas, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan pengelolaan yang menunjang pencapaian tujuan pengelolaan dan berpatokan pada Rencana Pengelolaan. Jika jawaban peserta mengungkapkan kelemahan serius terkait indikator ini, kolom langkah selanjutnya harus menyajikan cara-cara konkret ke depannya, seperti menyusun anggaran tahunan, menyewa akuntan yang berkualitas atau memberikan pelatihan manajemen bisnis dalam membantu pengelolaan kawasan.		
18. Perlengkapan			
Indikator	Apakah perlengkapan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengelolaan?		
Pengertian	Perlengkapan yang dimaksud mencakup kebutuhan kantor atau balai beserta fasilitas penunjang administrasi, mobilisasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) Secara khusus perlengkapan diarahkan pada kebutuhan dasar untuk melaksanakan kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.		
Nilai 0	Terdapat sedikit atau tidak ada perlengkapan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan	Perlengkapan yang ada sangat terbatas dan tidak merupakan perlengkapan utama pengelolaan. Misalnya, hanya ada papan informasi, papan petunjuk, gerbang dll.	Peran Fasilitator ketersediaan peralatan yang dibutuhkan termasuk untuk urusan administrasi perkantoran dan keperluan pengelolaan lapangan dan infrastruktur pengelolaan, ini juga dapat mencakup kebutuhan pendukung seperti bahan bakar.
Nilai 1	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	Terdapat perlengkapan utama namun masih sangat kurang untuk pengelolaan. Misalnya, hanya terdapat pondok kerja saja atau perlengkapan lapangan (GPS, kamera dll) dengan jumlah terbatas.	Melakukan pembuktian terbalik mengenai ketersediaan perlengkapan terkait kebutuhan pengelolaan dan mentransfernya ke kriteria nilai.

Nilai 2	Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan	Perlengkapan utama pengelolaan tersedia namun belum sepenuhnya memadai/ minimal untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan.	
Nilai 3	Perlengkapan dan fasilitas yang ada telah memadai	Terdapat perlengkapan (perlengkapan lapangan, mobilisasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) yang memadai untuk mendukung pengelolaan - pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil (<10 hektar), sarana digabung dengan kawasan lainnya.	
Bukti yang dibutuhkan	Data SIMAK BMN, Inventarisasi BMN, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN, SK Penetapan Status BMN, RKAKL, Rencana Kebutuhan BMN, SK Penanggung jawab dan pendistribusian BMN		Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Pengelolaan anggaran (17), jumlah pegawai (13)		
Tindak Lanjut	Mendiskusikan kebutuhan perlengkapan relatif terhadap mandat kawasan dan tujuan pengelolaan		
19. Pemeliharaan Perlengkapan			
Indikator	Apakah perlengkapan yang ada dipelihara secara memadai?		
Pengertian	Perlengkapan untuk kepentingan administrasi perkantoran, keperluan pengelolaan lapangan, dan infrastruktur pengelolaan dipelihara secara berkala agar barang tetap dalam keadaan baik dan siap pakai sampai habis lifetime-nya untuk menunjang kegiatan pengelolaan kawasan		
Nilai 0	Ada sedikit atau tidak ada pemeliharaan untuk perlengkapan dan fasilitas	Cukup jelas.	Peran Fasilitator Mendiskusikan apakah:
Nilai 1	Ada pemeliharaan yang bersifat ad hoc untuk perlengkapan dan fasilitas	Pemeliharaan dilakukan secara insidental	• ada staf terlatih yang secara khusus melakukan pemeliharaan Perlengkapan dan mengecek kondisi perlengkapan yang ada
Nilai 2	Ada pemeliharaan dasar untuk perlengkapan dan fasilitas	Pemeliharaan dilakukan pada perlengkapan dan fasilitas penting.	• Pengelolaan anggaran telah dikelola dengan baik sehingga kebutuhan untuk Pemeliharaan Perlengkapan dapat tersedia sesuai tata waktu yang telah direncanakan dan benar-benar dimanfaatkan untuk pemeliharaan perlengkapan,

Nilai 3	Perlengkapan dan fasilitas dipelihara secara memadai	semua perlengkapan dan fasilitas dipelihara dan berfungsi dengan baik.	Perlengkapan yang ada memang benar-benar dibutuhkan dan kondisinya masih layak dipertahankan ataulah keberadaan perlengkapan tersebut justru membebani anggaran dan sudah saatnya dihapuskan. Apabila tidak ada peralatan ataupun infrastruktur yang tersedia, tidak perlu menjawab pertanyaan ini.
Bukti yang dibutuhkan	RKAKL, Kartu Pemeliharaan BMN, Data Kondisi BMN (SIMAK), Data penghapusan BMN, SK Penangung jawab BMN		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Tujuan Kawasan (4) , jumlah pegawai (13), Staf terlatih (14), Pengelolaan anggaran (17)		
Tindak Lanjut	Jika ini skor pertanyaan rendah langkah selanjutnya harus menyarankan cara-cara praktis mengatasi ini, baik dengan mengidentifikasi atau mempekerjakan petugas pemeliharaan (misalnya dari masyarakat setempat) atau memperkenalkan pelatihan untuk memastikan bahwa staf Kawasan Konservasi memiliki keterampilan yang diperlukan dalam pemeliharaan alat.		
20. Pendidikan dan Penyadaran			
Indikator	Apakah ada perencanaan program pendidikan dan penyadartahuan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan pengelolaan?		
Pengertian	Pertanyaan lebih ditujukan keberadaan program edukasi dan awareness. Program pendidikan dan penyadartahuan tentang pentingnya keberadaan kawasan konservasi untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk manfaat yang dapat diterima dan resiko yang akan dihadapi masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pemahaman mengenai tujuan pelestarian kawasan konservasi. Program yang terencana ini menjangkau stakeholder utama di sekitar kawasan konservasi, khususnya masyarakat sekitar yang bergantung pada kawasan konservasi. Kegiatan pendidikan dan penyadaran yang dimaksud dapat merupakan kegiatan rutin ditingkat resort.		
Nilai 0	Tidak ada program pendidikan dan penyadaran	Sudah jelas	Peran Fasilitator
Nilai 1	Ada program pendidikan dan penyadaran yang terbatas dan bersifat ad hoc	Terdapat kegiatan pendidikan dan penyadartahuan namun masih bersifat insidental dan tidak terprogram.	Pertanyaan lebih ditujukan keberadaan program edukasi dan awareness. Tidak hanya pada perencanaan (pertanyaan perlu diluruskan, namun penjelasan pada kriteria dan keterangan sudah jelas).

Nilai 2	Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	Terdapat kegiatan pendidikan dan penyadartahuan yang terprogram namun tidak terlaksana semuanya atau kurang secara kuantitas.	Skor tertinggi diberikan jika kebutuhan sudah teridentifikasi semua, terrealisasi, dan mencapai output, misalnya poin pendidikan bicara tentang target group, sasaran strategis (jangka panjang/generasi selanjutnya). Pada saat ini, semua pihak menyadari pentingnya eksistensi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk menjadi ujung tombak bagi kelestarian kawasan konservasi. Namun demikian Lemahnya kapasitas masyarakat sekitar kawasan menyebabkan masyarakat tersebut masih belum mampu secara optimal berperan serta dalam pengelolaan kawasan, oleh karena itu oleh diperlukan perencanaan program pendidikan bagi masyarakat untuk memenuhi tujuan pengelolaan, Umumnya seluruh pengelola baik Balai KSDA maupun Balai TN telah memiliki kegiatan pendidikan dan penyadartahuan yang dianggarkan setiap tahunnya, meskipun dengan jumlah dan frekuensi yang masih sedikit, namun kegiatan tersebut masih belum terprogram dengan pencapaian target yang jelas
Nilai 3	Terdapat program pendidikan dan penyadaran yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan	Terdapat program pendidikan dan penyadartahuan dan sepenuhnya dilaksanakan	
Bukti yang dibutuhkan	Daftar desa penyangga yang bergantung pada kawasan konservasi, Daftar desa dan sekolah di sekitar kawasan yang telah menerima dan dilakukan evaluasi atas program pendidikan dan penyadaran, dokumen strategi pendidikan dan penyadaran, laporan kegiatan, material yang digunakan	Daftar desa dan sekolah di sekitar kawasan yang telah menerima dan dilakukan evaluasi atas program pendidikan dan penyadaran, dokumen strategi pendidikan dan penyadaran, laporan kegiatan, material yang digunakan	Memastikan bukti terlampirkan dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Tujuan pengelolaan (4), Rencana Pengelolaan (7), Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (8), Sistem Perlindungan (10), Jumlah Pegawai (14), Kepastian Anggaran (16), Pemerintah dan Swasta di Sekitar (22), Masyarakat Adat (23), Masyarakat lokal (24)		

Tindak Lanjut	Memberikan catatan perbaikan apabila Program Pendidikan dan Penyadaran belum sesuai dengan Peraturan Kawasan Konservasi, belum mendukung Tujuan utama Kawasan Konservasi, belum terakomodir dalam RPIP dan RPPn, program—program yang dapat diuulkan dalam indikator ini adalah program yang dapat mendukung Sistem Perlindungan, dapat dilakukan oleh staf yang ada, didukung oleh Kepastian Anggaran dan Pengelolaan anggaran yang baik sehingga program dapat dilaksanakan tepat waktu (termasuk tidak ditunda/ dibatalkan karena penghematan anggaran), dikordinasikan dan mendapat dukungan Pemerintah dan Swasta di Sektor kawasan serta tepat sasaran kepada Masyarakat Adat, Masyarakat lokal atau bagi masyarakat/pengunjung secara luas			
21. Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air				
Indikator	Apakah perencanaan penggunaan lahan dan air mempertimbangkan Kawasan Konservasi dan membantu pencapaian tujuan Kawasan Konservasi?			
Pengertian	Pengelolaan kawasan konservasi tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan lain di sekitarnya, sebagai bagian dari sebuah ecoregion, penggunaan lahan dan air di sekitar kawasan konservasi dapat sangat mempengaruhi proses-proses ekologis yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu perencanaan tata ruang yang baik sangat dibutuhkan. Apabila telah sesuai dengan kaidah dalam penyusunan RTRW maka penggunaan lahan dan air di sekitar Kawasan Konservasi dapat dikatakan telah mendukung tujuan pengelolaan, namun dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan lahan disekitarnya dapat digunakan sebagai pertimbangan.			
Nilai 0	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi dan kegiatan/ kebijakan yang merugikan kelangsungan kawasan	Misalnya, terdapat pemanfaatan air di luar kawasan konservasi berekosistem rawa/gambut yang berlebihan dan membuat rawa menjadi kering dan rentan kebakaran. Pembangunan di luar yang membuat kawasan terisolasi atau tidak terkoneksi dengan KK Lainnya.	Misalnya, Kawasan konservasi berada di hulu, apabila terdapat pemanfaatan air dibawahnya maka tidak merugikan keberadaan/mengurangi debit air.	Peran Fasilitator Mendiskusikan apakah kebutuhan dalam menjaga kelestarian Kawasan Konservasi sudah dipertimbangkan dalam tata ruang di sekitar. Di dalam Rencana Tata Ruang Nasional seluruh kawasan konservasi telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi nasional, namun demikian pada prakteknya, implementasi Rencana tata ruang wilayah propinsi maupun kabupaten kota, seringkali tidak banyak yang mendukung kelestarian kawasan konservasi Perencanaan penggunaan lahan dan air perlu dilihat dalam konteks RTRW, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Pengelola perlu secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan BKPRD agar setiap kebijakan pemanfaatan berbasis lahan maupun perijinan yang dikeluarkan di sekitar kawasan konservasi harus mengacu pada kepentingan fungsi kawasan konservasi tersebut, termasuk kebutuhan untuk pelestarian habitat dan ekosistem; terutama bila kawasan konservasi merupakan hulu dari DAS ataupun Sub DAS. Penataan kawasan ke dalam zonasi atau blok pengelolaan juga perlu mempertimbangkan keberadaan sumber air untuk menunjang pelestarian habitat dan ekosistem.
Nilai 1	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi, tetapi kegiatan yang ada tidak merugikan kelangsungan kawasan			
Nilai 2	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagian memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi			
Nilai 3	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi			

(+1)	Perencanaan lahan dan air untuk konservasi habitat	Lansekap yang didalamnya terdapat KK sudah memperimbangan daya dukung lingkungan yang memadai untuk menjamin keberlangsungan habitat-habitat penting Contoh : kawasan di hilir, perencanaan di hulu harus mempertimbangkan potensi polusi air secara kuantitatif sudah diperhitungkan. misalnya ambang batas kadar COD, BOD dll.	Pertanyaan tambahan berfokus pada kondisi lingkungan, seperti tingkat polusi, hidrologi dll. Relatif sedikit kawasan konservasi yang mampu mencetak poin tambahan ini.
(+1)	Perencanaan lahan dan air untuk keterhubungan (konektivitas)	Terdapat koridor yang menghubungkan kawasan konservasi dengan kawasan konservasi lainnya.	Pertanyaan berfokus pada keterhubungan kawasan konservasi ke habitat serupa lainnya ataukah terisolasi? Hal ini untuk mengakomodasi potensi migrasi hewan atau perpindahan satwa untuk mencegah inbreeding, peluang untuk migrasi ikan di sepanjang sungai, dan adanya zona penyangga di sekitar Kawasan Konservasi untuk mencegah efek tepi dan perambahan.
(+1)	Perencanaan lahan dan air untuk jasa-jasa ekosistem dan konservasi spesies	Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga selain melindungi kawasan konservasi juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas.	Ini adalah pertanyaan rumit karena bisa melibatkan dua isu yang berbeda: mengelola ekosistem untuk melindungi spesies tertentu (penggunaan mis api untuk menjaga habitat sabana) atau manajemen untuk pemanfaatan jasa ekosistem bagi masyarakat/manusia, (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air tawar untuk kelangsungan spesies tertentu, pengelolaan api untuk menjaga habitat savana, dll)”
Bukti yang dibutuhkan	Laporan survey potensi air, PKS/ijin Pemanfaatan air, rencana Pemulihan ekosistem (daerah tangkapan air), dokumen dan peta RTRW, zonasi/ penataan blok yang telah disahkan		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti diverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Peraturan Kawasan Konservasi (2), ujian utama Kawasan Konservasi (4), Desain Kawasan Konservasi (5), Rencana Pengelolaan (7), RP Jangka Pendek (8), sistem perlindungan (10), pengelolaan sumberdaya (12), staf terlatih (14), pengelolaan anggaran (17), pemerintah dan swasta di sekitar Kawasan Konservasi (22)		

Tindak Lanjut	Mendiskusikan apakah Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air: • sesuai dengan Peraturan Kawasan Konservasi, • sesuai dengan Desain Kawasan Konservasi untuk mendukung tujuan utama Kawasan Konservasi, • kegiatan dalam RPIP dan RPJn telah mendukung Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan • diarahkan untuk mendukung sistem perlindungan • diarahkan untuk pengelolaan sumberdaya, termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap fitur utama dan fitur kawasan lainnya. misalnya, kerjasama diarahkan untuk memulihkan nilai-nilai budaya yang kritis. • terdapat staf terlatih yang aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan BKPRD untuk mengawal RTRW sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan • telah didukung oleh Pengelolaan anggaran • didukung oleh kerjasama Pemerintah dan Swasta di Sekitar kawasan
22. Pemerintah dan Swasta di Sekitar	
Indikator	Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar?
Pengertian	Pemerintah dan swasta di sekitar kawasan memegang peran yang penting bagi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. pengelolaan kawasan konservasi diharapkan lebih inklusif, terbuka, transparan, melibatkan banyak pihak namun tidak terjebak dalam pola-pola formalitas, namun dilakukan dengan semangat kebersamaan untuk membangun kepercayaan. kerjasama yang dimaksud mencakup aspek pengelolaan kawasan dan pengelolaan daerah penyangga baik yang dilakukan dengan pemerintah daerah setempat, pemilik ijin pemanfaatan lahan, maupun mitra lainnya (LSM, perguruan tinggi, swasta lainnya). Sebagai contoh kerjasama konservasi dengan KPHP/L, koneksi HPH/ HTI, perkebunan, pertambangan, dan perusahaan lainnya.
Nilai 0	Tidak ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/ pengelola lahan dan air di sekitar
Nilai 1	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/ pengguna lahan dan air disekitar tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama
Nilai 2	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/ pengguna lahan dan air disekitar, tetapi hanya ada kerjasama terbatas
	Sudah jelas
	Sudah jelas
	Terdapat kesepakatan/kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar kawasan baik formal maupun informal, namun masih terbatas.
	Peran Fasilitator
	Mendiskusikan apakah Kerjasama penggunaan lahan dan air: • mendukung tujuan utama kawasan Konservasi • telah terakomodir dalam RPIP dan RPJn, • diarahkan untuk mendukung sistem perlindungan, • diarahkan untuk pengelolaan sumberdaya, termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap fitur utama dan fitur kawasan lainnya. misalnya, kerjasama diarahkan untuk memulihkan nilai-nilai budaya yang kritis. • diinisiasi dan dikawal staf terlatih untuk memastikan memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan tujuannya • telah didukung dengan Pengelolaan anggaran pengelola yang mengisi gap kegiatan yang tidak dapat dikerjakamkan

Nilai 3	Ada komunikasi regular antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar, a nada kerjasama substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi	Terdapat kesepakatan/ kerjasama secara substantif dan menyeluruh antara pengelola dengan mitra. Terdapat pertemuan regulier atau forum pengelolaan kawasan konservasi yang terbangun antara pengelolaa dan mitra.	- dapat mendukung Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air yang sesuai dengan kebutuhan kawasan terakomodir dalam BKPRD - diarahkan untuk mendukung program Pendidikan dan penyadaran - diarahkan untuk mendukung pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan
Bukti yang dibutuhkan	PKS UPT dengan badan/lembaga tertentu lingkup kabupaten/provinsi, Forum Kolaborasi, laporan pelaksanaan kerjasama		Memastikan bukti terungkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	tujuan utama Kawasan Konservasi (2), RPJP (7), RP/Pr (8), sistem perlindungan (10), pengelolaan sumberdaya (12), staf terlatih (14), Pengelolaan anggaran (17), Perencanaan Penggunaan Lahan dan Air (21), Pendidikan dan penyadaran (20), masyarakat lokal (24)		
Tindak Lanjut	Jejaring kerja multi pihak perlu terus dibangun untuk mengawal kerjasama dan mengawal proses pembelajaran bersama, dengan membangun model-model kerjasama skala kecil dan konkrit. Hal tersebut dapat diinisiasi melalui pertemuan-pertemuan regulier untuk membahas hal-hal terkait pengelolaan kawasan. Pertanyaan 22 ditujukan untuk penentuan sejauh mana kawasan konservasi bekerja sama atau memilih tetap terisolasi dari masyarakat luas yang mempengaruhinya. jika skor nol, langkah selanjutnya bisa mendaftar pemerintah dan sektor swasta kunci yang dapat bekerjasama.		
23. Masyarakat Adat dan masyarakat asli/tradisional			
Indikator	Apakah masyarakat adat dan atau masyarakat asli/tradisional yang tinggal atau secara regular menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Kawasan konservasi?		
Pengertian	Masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat adat/aseli/keompok etnis yang diidentifikasi keberadaannya oleh pengelola kawasan (UPT). Yang dimaksud dengan diakui adalah apabila keberadaan masyarakat adat/aseli dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Pertanyaan ditujukan pada adanya proses masukan dari masyarakat adat/aseli dalam pengambilan keputusan pengelolaan. Sedangkan terkait masukan dalam rencana pengelolaan ada di pertanyaan nomor 7.		
Nilai 0	Masyarakat adat dan atau masyarakat aseli/tradisional tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	Peran Fasilitator Mendiskusikan apakah masukan masyarakat adat dan atau masyarakat asli/tradisional
Nilai 1	Masyarakat adat dan atau masyarakat aseli/tradisional dapat memberikan sedikit masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengelolaan	Misalnya hanya terlibat dalam konsultasi publik penyusunan RP dan zonasi/blok.	diperhatikan dalam keputusan pengelolaan atau tidak. Pengambilan keputusan pengelolaan bukan hanya dalam penyusunan rencana pengelolaan, zonasi/blok pengelolaan saja namun pada hal-hal terkait pengelolaan secara umum. misalnya dalam pemberdayaan masyarakat, kegiatan rehabilitasi,

Nilai 2	Masyarakat dan atau masyarakat aseli/tradisional adat secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka perlu ditingkatkan	Masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal berperan dalam penentuan zona/blok, berperan dalam menentukan jenis dan arah kegiatan dalam RPJP kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dll.	intensitas komunikasi dan interaksi antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi dll. Sedangkan terkait masukan dalam rencana pengelolaan ada di indikator nomor 7 Mendiskusikan bagaimana mekanisme masyarakat adat dan atau masyarakat aseli/tradisional untuk dapat berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi? Contohnya di TN Kayan Mentarang dibentuk kelembagaan pengelolaan kolaboratif, proses penyusunan zonasi telah mengkomodifikasi zona-zona adat, sehingga ada kemungkinan kegiatan yang secara aturan bertentangan, namun kegiatan tersebut dimungkinkan dalam rangka pengelolaan kawasan. Kawasan konservasi tanpa keberadaan masyarakat adat di wilayahnya tidak mengisi pertanyaan ini.
Nilai 3	Masyarakat adat dan atau masyarakat aseli/tradisional secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management, diberikan wilayah kelola, dilibatkan dalam FPIC, Jika ada keputusan terkait kawasan yg lebih besar termasuk ke wilayah kelola masyarakat adat maka masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.	Masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional berperan aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan yang substantif.	
Bukti yang dibutuhkan	Dokumen Zonasi, Rencana Pengelolaan Zona Tradisional, PKS dengan masyarakat di zona tradisional, Profil masyarakat adat (hukum, kelembagaan, wilayah)		Memastikan bukti terlampai dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Rencana pengelolaan (7), perencanaan penggunaan lahan dan air (21), pengelolaan sumberdaya (12)		
Tindak Lanjut	Jika skor masih rendah diperlukan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi dan mendorong praktek pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan. Masyarakat di sekitar kawasan konservasi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kawasan dan biasanya memiliki kearifan lokal tersendiri dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat lokal, adat dan lembaga tradisional bisa menjamin keberlanjutan kawasan konservasi, jika didukung dan dikuatkan, akan membantu mengurangi risiko perubahan oleh orang luar serta sekaligus menjaga keamanan kawasan. Namun demikian perubahan sosial, budaya dan tuntutan ekonomi banyak menyebabkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tadinya menjaga kearifan lokal-nya mulai bergeser menjadi masyarakat yang mengeksploitasi sumber daya alam dengan tidak terkendali. Oleh karena itu program-program pemberdayaan yang melibatkan sektor terkait perlu ditingkatkan, serta pembentukan forum-forum komunikasi dengan masyarakat adat maupun lokal dalam upaya membangun komunikasi yang mengikut kebijakan-kebijakan strategis kawasan konservasi perlu ditingkatkan.		

24. Masyarakat Lokal				
Indikator	Apakah masyarakat lokal yang tinggal ada berdekatan dengan kawasan konservasi dapat memberikan masukan?			
Pengertian	Masyarakat lokal dalam satuan desa, dusun, atau permukiman, termasuk enclave dilibatkan dalam pengelolaan kawasan, khususnya dalam fase pengambilan keputusan pengelolaan.			
Nilai 0	Masyarakat lokal tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	Peran Fasilitator Pertanyaan ditujukan pada adanya proses masukan dari masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pengelolaan. Sedangkan terkait masukan dalam rencana pengelolaan ada di pertanyaan nomor 7. Untuk mendapatkan nilai 2 atau 3 dalam indikator ini, masyarakat juga harus memiliki pengaruh yang cukup dalam pengambilan keputusan keseluruhan: konsultasi belaka tidak cukup.	
Nilai 1	Masyarakat lokal dapat sedikit memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan	Masyarakat lokal hanya terlibat dalam konsultasi publik penyusunan RP dan zonasi/blok.		
Nilai 2	Masyarakat lokal secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka dapat ditingkatkan	Masyarakat lokal dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal berperan dalam penentuan zonasi/blok, berperan dalam menentukan jenis dan arah kegiatan dalam RPP/kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dll.		
Nilai 3	Masyarakat lokal secara langsung berpartisipasi terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi	Masyarakat lokal berperan aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan yang substantif.		
Dampak terhadap masyarakat (+1)	Terdapat komunikasi dan kepercayaan yang terbuka antara masyarakat lokal dan/atau tradisional, para pihak dan pengelola kawasan konservasi	Ada forum reguler	Beberapa penjelasan dalam kolom komentar sangat penting jika skor ini diberikan. Informasi Lebih lanjut: Indigenous and Local Communities and Protected Areas: Towards Equity and Enhanced Conservation (Borini-Feyerabend et al., 2004)	
Dampak terhadap masyarakat (+1)	Terdapat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sudah jelas	Ini bisa termasuk program yang berkaitan langsung dengan kawasan konservasi, seperti pengelolaan terhadap produk hasil hutan non kayu atau sumber daya ikan, dan program yang diprakarsai oleh kawasan konservasi untuk kesejahteraan umum, seperti pembangunan sekolah atau sarana kesehatan.	

Dampak terhadap masyarakat (+1)	Masyarakat lokal dan/atau tradisional secara aktif mendukung kawasan konservasi	Terdapat peraturan daerah/peraturan desa, adat istiadat (aktif) yang mendukung kelestarian kawasan	Beberapa penjelasan dalam kolom komentar sangat penting jika skor ini diberikan; contohnya dapat mencakup patroli sukarela, membantu inventarisasi, memberikan dukungan politik antara pemerintah daerah dll
Bukti yang dibutuhkan			Memastikan bukti terlengkap dengan baik
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif		Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Rencana pengelolaan (7), perencanaan penggunaan lahan dan air (21), pengelolaan sumberdaya (12)		
Tindak lanjut	Jika skor masih rendah diperlukan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi dan mendorong praktik pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan		
25. Keuntungan Ekonomis			
Indikator	Apakah Kawasan Konservasi memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal, cth pendapatan, pekerjaan, pembayaran Jasa lingkungan?		
Pengertian	Keuntungan ekonomis yang dimaksud dalam hal ini adalah semua kegiatan yang memberikan keuntungan ekonomi langsung bagi masyarakat baik sebagai pendapatan utama atau tidak. Yang terpenting adalah kegiatan tersebut memberikan keuntungan ekonomis sebagai pendapatan masyarakat setempat yang cukup signifikan. Keuntungan ekonomi langsung didefinisikan adalah aliran pendapatan/dana/uang sesuai dengan fungsi pemanfaatan pada masing-masing kawasan konservasi.		
Nilai 0	Kawasan konservasi tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung bagi masyarakat lokal	Sudah jelas	Peran Fasilitator Mendiskusikan keuntungan ekonomis yang didapatkan secara eksplisit oleh masyarakat lokal, perusahaan pariwisata mungkin disertakan jika mereka mempekerjakan sejumlah besar orang-orang lokal. Poin ini termasuk manfaat ekonomi berupa pekerjaan langsung, Skema Pembayaran Jasa Lingkungan, manfaat tidak langsung dari peningkatan pariwisata atau penjualan produk untuk pengunjungan, dan pilihan lainnya seperti guide lokal.
Nilai 1	Potensi keuntungan ekonomis secara langsung sudah diketahui dan direncanakan untuk direalisasikan	Sudah terdapat data dan informasi potensi kawasan yang dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.	Untuk mendapatkan nilai maksimal, pendapatan dari pengelolaan kawasan konservasi tidak harus menjadi satu-satunya pendapatan utama masyarakat namun merupakan pendapatan yang cukup signifikan memberikan manfaat ekonomi. Tanyakan berapa persen
Nilai 2	Terdapat aliran keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal	Masyarakat yang mendapat keuntungan ekonomi pada lokasi potensi kawasan yang dapat dikembangkan masih terbatas atau bersifat sampingan.	

Nilai 3	Kawasan konservasi memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat lokal	Masyarakat yang mendapat keuntungan ekonomi pada lokasi potensi kawasan yang dapat dikembangkan cukup banyak/lebih luas atau merupakan mata pencaharian utama.	yang dinikmati local community. Signifikan atau tidak? Contoh kasus TN Komodo, manfaat ekonomi sebagian besar diterima oleh orang luar, bukan masyarakat lokal. Indikator ini tidak termasuk kegiatan pemberian bantuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Bukti yang dibutuhkan	Rencana pembinaan daerah penyangga, Laporan2 kegiatan pemberdayaan masyarakat, laporan survey kepuasan masyarakat		Memastikan bukti terungkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator terkait	Operator wisata komersil (28), fasilitas pengunjung (27)		
Tindak Lanjut	Nilai ekonomi yang dimaksud lebih ke kreativitas manajemen dalam mengatasi ancaman. Misalnya jika ada ancaman budidaya kopi di sekitar kawasan konservasi, tindak lanjutnya antara lain bekerjasama dengan masyarakat untuk mendesai area sebagai zona pemanfaatan tradisional dan mengemas produksi sebagai produk taman nasional yang akan mendukung penyelamatan kawasan konservasi bila dibeli oleh konsumen.		
26. Monitoring dan Evaluasi			
Indikator	Apakah monitoring kegiatan pengelolaan mempengaruhi kinerja?		
Pengertian	Monitoring dan Evaluasi tidak terbatas pada implementasi dan penggunaan APBN dan kegiatan mitra, tetapi merupakan money seluruh aspek pengelolaan. Monitoring harus difokuskan terhadap nilai-nilai kawasan, ancaman terhadap nilai-nilai dan tujuan utama pengelolaan dan aktifitas lain yang berdampak kepada efektivitas pengelolaan. Money pengelolaan dapat dilakukan secara berjenjang dan berkala, mulai tingkat resort sampai balai, hasil money kemudian dijadikan dasar untuk perencanaan selanjutnya.		
Nilai 0	Tidak ada monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	Money terhadap pengelolaan kawasan tidak dilakukan. Money masih terbatas pada pengelolaan anggaran.	Peran Fasilitator Mendiskusikan indikator kegiatan monitoring yang difokuskan terhadap nilai-nilai kawasan, ancaman terhadap nilai-nilai dan tujuan utama pengelolaan dan aktivitas lain yang berdampak kepada efektivitas pengelolaan. Fasilitator juga perlu melihat permen baru tentang rencana monitoring dan evaluasi program
Nilai 1	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi secara ad hoc, tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara regular	Money terhadap pengelolaan kawasan masih terbatas dan dilakukan secara insidental.	Nilai maksimal bagi indikator ini diberikan jika program monitoring dan evaluasi sudah terhubung dengan sistem manajemen. Lihat juga Rencana Pengelolaan
Nilai 2	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan	Money terhadap pengelolaan kawasan telah dilaksanakan secara regular menggunakan sistem yang telah disepakati misalnya METT, SMART Patrol atau RBM dsb, namun hasilnya tidak ditindaklanjuti.	apakah money dilakukan terhadap nilai penting/tujuan pengelolaan.
Nilai 3	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	Money dilaksanakan secara regular dan adaptif menggunakan sistem yang telah disepakati dan hasilnya ditindaklanjuti.	

Bukti yang dibutuhkan	Laporan kinerja, e-monev Bappenas, e-monev anggaran,	Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap	Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Tujuan kawasan (4), inventarisasi sumberdaya(9), rencana pengelolaan(7)	
Tindak lanjut	Kebanyakan monitoring dilakukan langsung oleh staf kawasan konservasi, tetapi dalam beberapa kasus relawan atau masyarakat lokal juga akan terlibat. Dalam kolom komentar daftarkan apa yang dipantau dan seberapa sering. Pada langkah selanjutnya mengidentifikasi kesenjangan penting dalam pemantauan yang perlu diisi.	
27. Fasilitas Pengunjung		
Indikator	Apakah fasilitas pengunjung memadai?	
Pengertian	Fasilitas pengunjung berupa: 1) fasilitas utama: yaitu tempat duduk, kios makanan dan minuman, tempat sampah, tempat ibadah, WC umum, dan aksesibilitas; 2) fasilitas penunjang wisata, yaitu: tempat parkir, keamanan; 3) fasilitas tambahan, antara lain: toko cenderamata, penerimaan pengunjung, dan penyewaan peralatan/jasa; 4) Prasarana wisata terdiri dari: telekomunikasi dan shelter/pos; dan 5) fasilitas informasi yaitu papan informasi.	
Nilai 0	Tidak ada fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung meskipun kebutuhannya telah teridentifikasi	Peran Fasilitator Mendiskusikan keberadaan fasilitas dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke kawasan konservasi. Cukup jelas didalam pedoman bahwa apabila kawasan tidak merupakan obyek kunjungan wisata maka pertanyaan ini tidak perlu dijawab.
Nilai 1	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	Sudah jelas Fasilitas terbatas pada salah satu bentuk layanan (hanya sanitasi, atau layanan informasi saja). Terdapat fasilitas (jenis, jumlah, fungsi, namun fungsinya kurang memadai rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya). Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, keamanan, aksesibilitas, informasi, kenyamanan pengunjung).
Nilai 2	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung cukup memadai untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan	
Nilai 3	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung sangat baik untuk tingkat kunjungan saat ini	
Bukti yang dibutuhkan	Desain tapak, Site plan, Data BMN, laporan analisis kepuasan pengunjung, data kunjungan, Master plan wisata,	Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap	Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Pendidikan dan penyadaran, anggaran	
Tindak Lanjut	Mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas bagi pengunjung (jika kawasan menerima kunjungan wisata)	

28. Operator Wisata komersil				
Indikator	Apakah operator wisata komersil berkontribusi pada pengelolaan kawasan konservasi?			
Pengertian	Secara umum, hanya sedikit kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki keterlibatan dengan operator wisata komersil. Namun demikian diharapkan pada UPT yang wilayahnya terdapat keterlibatan operator wisata, perlu menjalin kerjasama agar muatan-muatan nilai konservasi menjadi salah satu yang perlu disampaikan kepada pengunjung, sehingga fungsi kawasan Konservasi sebagai media pendidikan lingkungan dapat berfungsi.			
Nilai 0	Sedikit/tidak ada hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata yang menggunakan kawasan konservasi	Sudah jelas	Peran Fasilitator Mendiskusikan program-program pendidikan lingkungan yang dilakukan operator wisata komersil dan dukungannya terhadap pencapaian tujuan pengelolaan.	
Nilai 1	Terdapat hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan	Terdapat operator luar, namun terbatas pada pengurusan SIMAKSI.		
Nilai 2	Terdapat kerjasama terbatas antara pengelola kawasan dengan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	Terdapat komunikasi dalam upaya menjaga nilai-nilai kawasan konservasi.		
Nilai 3	Terdapat kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	Terdapat kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dan operator wisata yang terdokumentasi dalam bentuk dokumen kerjasama atau MoU.		
Bukti yang dibutuhkan	Dokumen IUPSWA, IUPIWA, Monev IUPSWA dan IUPIWA, Data kunjungan wisata, daftar operator wisata yang bekerja sama dengan UPT			
Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif			
Indikator Terkait	Fasilitas pengunjung (27), pendidikan dan penyadaran (20)			
Tindak Lanjut	Kehadiran kawasan konservasi dapat menarik bagi wisatawan dan menjadi peluang bagi industri pariwisata, karenanya operator pariwisata seharusnya menjadi mitra Kawasan Konservasi secara alami, tetapi ini tidak selalu terjadi. Jika pertanyaan ini menghasilkan skor rendah, langkah selanjutnya bisa mengidentifikasi secara konkret beberapa mitra kunci yang dapat diajak berbicara dan bekerjasama.			
	Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan			
	Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak			

29. Pungutan (PNBP atau Pungutan Lain)			
Indikator	Jika pungutan (cth. Biaya masuk atau denda) diterapkan apakah akan membantu pengelolaan Kawasan Konservasi?		
Pengertian	Pungutan yang dilaksanakan oleh kawasan konservasi adalah PNBP		
Nilai 0	Meskipun secara teori pungutan diterapkan, tetapi pungutan tersebut tidak dikumpulkan	PNBP tidak dipungut di wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.	Peran Fasilitator Mendiskusikan pelaksanaan pungutan oleh pengelola dan mentransfernya ke kriteria nilai. Untuk kawasan konservasi di Indonesia sebagian besar akan mendapat skor 1 karena pungutan yang diberlakukan akan masuk ke pemerintah dan tidak digunakan untuk meningkatkan pengelolaan di kawasan. Skor 2 bisa diberikan apabila ada mekanisme yang memungkinkan pungutan yang dapat berkontribusi kepada kawasan langsung. Misalnya pada TN Bantimurung Bulusaraung yang menjalin kolaborasi pengelolaan dengan pemungutan karcis 1 pintu, sehingga selain PNBP Pemda dapat memungut dan berkontribusi langsung dari hasil pungutan/karcis untuk pembangunan obyek wisata. Sistem kolaborasi ini juga bisa diterapkan dengan masyarakat/kelompok masyarakat. Misalnya pengelolaan bersama jalur pendakian dsb.
Nilai 1	Pungutan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi pada Kawasan Konservasi atau lingkungan sekitarnya	Pungutan hanya PNBP	
Nilai 2	Pungutan dikumpulkan, dan memberikan sedikit kontribusi pada kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya	Ada mekanisme pungutan lain selain PNBP yang berkontribusi kepada kawasan/lingkungan sekitarnya yang biasanya diatur Perda.	
Nilai 3	Pungutan dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial untuk kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya	Belum ada mekanismenya di Indonesia.	
Bukti yang dibutuhkan	Data penerimaan PNBP, Data kunjungan, Dokumen target PNBP (TriPNBP),		Memastikan bukti terlengkapi dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan
Penilaian Partisipatif	Meneksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap		Memimpin penilaian partisipatif dan memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	-		
Tindak Lanjut	Mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai target pungutan atau meningkatkan kunjungan ke kawasan yang dapat memberikan kontribusi bagi kelestarian di luar pungutan. Misalnya dengan melakukan program adopsi pohon, penanaman/rehabilitasi, dsb.		

30. Kondisi Nilai-Nilai				
Indikator	Bagaimana kondisi dari nilai-nilai penting kawasan konservasi bila dibandingkan dengan saat penunjukan kawasan?			
Pengertian	Hasil yang diharapkan dari pengelolaan kawasan konservasi adalah kelestarian fitur-fitur kunci yang menjadi mandat pengelolannya atau nilai-nilai penting kawasan konservasi lainnya. Kondisi fitur-fitur kunci tersebut idealnya dimonitor pada setiap periode tertentu. Dalam banyak kasus, tidak tersedia data & informasi yang memadai tentang kondisi nilai-nilai penting pada saat penunjukan kawasan. Dalam hal ini, penilaian harus mengupayakan informasi yang valid dan dapat dipercaya dari berbagai sumber yang tersedia, termasuk informasi dari masyarakat sekitar.			
Nilai 0	Banyak nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya yang penting sangat menurun/berkurang	Tujuan pengelolaan pada saat penunjukan sudah punah Misal : Apabila badak Jawa di TN Ujung Kulon punah.	Peran Fasilitator Mendiskusikan kondisi nilai-nilai yang dinyatakan dalam kuisioner. METT benar-benar mengukur pengelolaan dan output sehingga tidak mempertimbangkan hasil secara rinci; Pertanyaan ini mencakup nilai-nilai baik biologis dan budaya, dan hanya indikasi sederhana apakah staff dan stakeholder meyakini tujuan fundamental telah tercapai. Selama adanya perubahan masih dalam tataran normal (misal dinamika populasi), maka dapat dinyatakan tidak ada perubahan. Namun hal perlu didapat dari angka yang terukur atau 'expert assessmet' dan dicantumkan dalam catatan sumber yang dirujuk. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap arancaman-ancaman di dalam kuisioner 2 yang mempengaruhi terhadap nilai-nilai untuk memastikan konsistensi isian. Apabila pertanyaan mengenai desain dijelaskan bahwa desain yang ada tidak memungkinkan untuk menjaga populasi jenis tertentu secara viable, maka di dalam jawaban nomor 30 tidak mungkin mendapatkan skor maksimal. Pada beberapa kasus kondisi nilai-nilai yang ada tidak hanya tergantung pada kawasan konservasi tetapi pada skala lanskap yang lebih luas. Hal ini perlu dipertimbangkan. Sehingga perlu melihat pada skala habitat yang lebih luas dan tidak fokus hanya pada jenis-jenis yang terancam punah	
Nilai 1	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya telah sangat menurun/berkurang	Misal : populasi badak sumatera di TNKS yang telah punah, namun masih ada fitur utama pengelolaan lain yang masih ada (harimau sumatera dll).		
Nilai 2	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurang tetapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan	Fitur-fitur kawasan berkurang, tetapi fitur utama masih ada.		
Nilai 3	Nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya relatif utuh	Sudah jelas Data berasal dari hasil monitoring. Mandat kelola utama harus ada datanya. Hasil monitoring bisa oleh mitra atau hasil riset.		
Nilai Tambahan (+1)	Penilaian kondisi nilai-nilai dinilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring	Sudah jelas		
Nilai Tambahan (+1)	Program pengelolaan yang spesifik sedang dilakukan untuk menghadapi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya	Sudah jelas, misal : Program Penangkaran Maleo di SW Bangkriang, Banteng di Baluran, Badak di Way Kambas, Mantangan di TN BBS, savana di Alas Purwo.		
Nilai Tambahan (+1)	Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan Kawasan Konservasi	Sudah jelas, dilakukan secara rutin.		

Bukti yang dibutuhkan	SK Penetapan satwa prioritas, Laporan monitoring satwa prioritas, dokumen sanctuary, hasil riset, laporan kinerja	Memastikan bukti terlengkap dengan baik, kalau tidak lengkap dibuat catatan sebagai respon ke depan.
Penilaian Partisipatif	Mengeksplor lebih lanjut isu dan kriteria melalui bukti yang dikumpulkan secara lengkap dan memimpin penilaian partisipatif	Memastikan bukti terverifikasi dan disepakati semua pihak
Indikator Terkait	Monitoring dan evaluasi (26)	
Tindak Lanjut	Dalam sejumlah kawasan konservasi populer yang sedang bertumbuh, sebagian besar staf ditugaskan untuk manajemen kepada pengunjung dan penegakan peraturan, sehingga pengelolaan konservasi yang sebenarnya akan absen. Pertanyaan tambahan bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen yang kurang dan langkah berikutnya harus mendaftar setiap kebutuhan yang teridentifikasi. Bagian komentar dapat memberikan rincian lebih lanjut, termasuk data jika ini tersedia, dan juga dapat membedakan antara keberhasilan relatif dalam melestarikan nilai-nilai biologis dan kelestarian budaya jika ada perbedaan antara keduanya.	

Lampiran 4

Lembar Kerja IV Resume Hasil Penilaian

Nilai			PERAN FASILITATOR
Skor METT	$\frac{A}{B} \times 100\%$	 %	
Penjelasan Nilai			
Konteks	Kekuatan	Keterangan	Berdasarkan penilaian seluruh indikator dan tindak lanjut yang direkomendasikan pada elemen konteks, fasilitator memandu diskusi untuk menilai kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi. Fokus diskusi diarahkan apakah nilai elemen konteks (yang sudah dikaitkan dengan data dasar dan data ancaman terhadap Kawasan Konservasi) masih memiliki isu penting yang harus diakomodasikan dalam perencanaan Kawasan Konservasi. Fokus rekomendasi yang bersifat strategis didorong untuk diakomodasikan dalam rencana Kawasan Konservasi, sedangkan isu yang bersifat taktis (perlu segera diselesaikan) dinyatakan sebagai rencana aksi.
%	Kelemahan (belum optimal/bisa ditingkatkan)		
	Isu prioritas	Pemilihan isu prioritas dengan pertimbangan: Jika indikator tidak ditangani maka akan berdampak besar pada nilai penting kawasan (perlu melihat lembar kerja 2) Indikator yang secara mandiri dapat dilakukan oleh pengelola Jika mendapatkan dukungan dari para pihak (tersedia sumberdaya)	
	rekomendasi		
Perencanaan	Kekuatan		Berdasarkan penilaian seluruh indikator dan tindak lanjut yang direkomendasikan pada elemen Perencanaan yang sudah diagregasikan, fasilitator memandu diskusi untuk menilai kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi. Fokus diskusi diarahkan apakah perencanaan telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dalam konteks faktual yang dihadapi. Rekomendasi diarahkan untuk penguatan seluruh aspek perencanaan strategis dan taktis untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam konteks faktual yang dihadapi.
%	Kelemahan		
	Isu prioritas		
	rekomendasi		

Input	Kekuatan		Berdasarkan penilaian seluruh indikator dan tindak lanjut yang direkomendasikan pada elemen input yang telah diagregasikan, fasilitator memandu diskusi untuk menilai kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi. Fokus diskusi diarahkan apakah input yang tersedia memadai untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Fokus rekomendasi adalah pada realokasi atau penambahan/pengurangan input yang harus disediakan, termasuk untuk menjalankan rencana yang direkomendasikan dari penilaian METT.
%	kelemahan		
	Isu prioritas		
	rekomendasi		
Proses	Kekuatan		Berdasarkan penilaian seluruh indikator dan tindak lanjut yang direkomendasikan pada elemen Proses yang telah diagregasikan, fasilitator memandu diskusi untuk menilai kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi. Fokus diskusi diarahkan apakah proses-proses pengelolaan telah berlangsung secara efisien, melembaga dan tepat sasaran sesuai rencana yang ditetapkan dan menghasilkan output yang terukur. Fokus rekomendasi diarahkan untuk menguatkan proses yang diperlukan sesuai kebutuhan pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif.
%	Kelemahan		
	Isu prioritas		
	rekomendasi		
Output	Kekuatan		Berdasarkan penilaian seluruh indikator dan tindak lanjut yang direkomendasikan pada elemen Output yang telah diagregasikan, fasilitator memandu diskusi untuk menilai kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi. Fokus diskusi diarahkan apakah output setiap proses pengelolaan telah dihasilkan sesuai rencana (efektif) dan apakah output telah ditetapkan secara memadai dalam rencana. Fokus rekomendasi diarahkan pada penguatan capaian output, proses pengelolaan yang diperlukan, serta input yang harus disediakan.
%	Kelemahan		
	Isu prioritas		
	rekomendasi		

PEDOMAN FASILITATOR

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Outcome	Kekuatan		Berdasarkan penilaian seluruh indikator dan tindak lanjut yang direkomendasikan pada elemen Outcome yang telah diagregasikan, fasilitator memandu diskusi untuk menilai kekuatan, kelemahan, isu prioritas dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi. Fokus diskusi diarahkan apakah outcome telah dicapai sesuai tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi dalam konteks faktual yang dihadapi. Fokus rekomendasi diarahkan pada identifikasi outcome yang terukur serta penguatan perencanaan yang harus dilakukan agar pengelolaan Kawasan Konservasi berlangsung lebih efektif sesuai konteks faktual yang dihadapi saat ini.
%	Kelemahan		
	Isu prioritas		
	rekomendasi		







DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gd. Mangala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. (021) 5720229, Faximile (021) 5720229

ISBN 978-602-17280-8-6



9 786021 728086